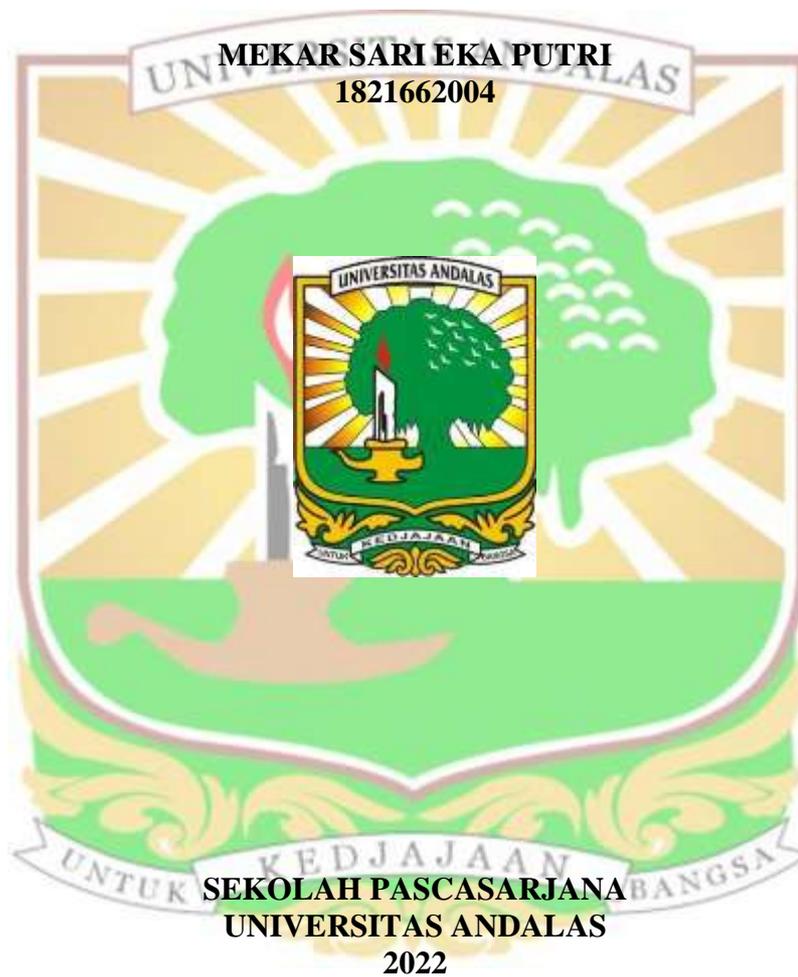


**ANALISIS PARTISIPASI ANGGOTA KELOMPOK TANI HUTAN (KTH)
PADA KEGIATAN KTH DI KOTA PADANG**

Tesis



**ANALISIS PARTISIPASI ANGGOTA KELOMPOK TANI HUTAN (KTH)
PADA KEGIATAN KTH DI KOTA PADANG**

**MEKAR SARI EKA PUTRI
1821662004**



Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Magister Sains pada
Program Pascasarjana
Universitas Andalas**

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tesis : ANALISIS PARTISIPASI ANGGOTA
KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) PADA
KEGIATAN KTH DI KOTA PADANG

Nama Mahasiswa : Mekar Sari Eka Putri
Nomor Pokok : 1821662004
Program Studi : Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan

Tesis telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia ujian akhir Magister Sains pada Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas dan dinyatakan lulus pada tanggal 28 Juli 2022.

Menyetujui,
1. Komisi Pembimbing



Dr. Ir. Hery Bachrizal Tanjung, M.Si.

Ketua

Dr. Ir. Zul Irfan, M.Sc.

Anggota

2. Koordinator Program Studi,

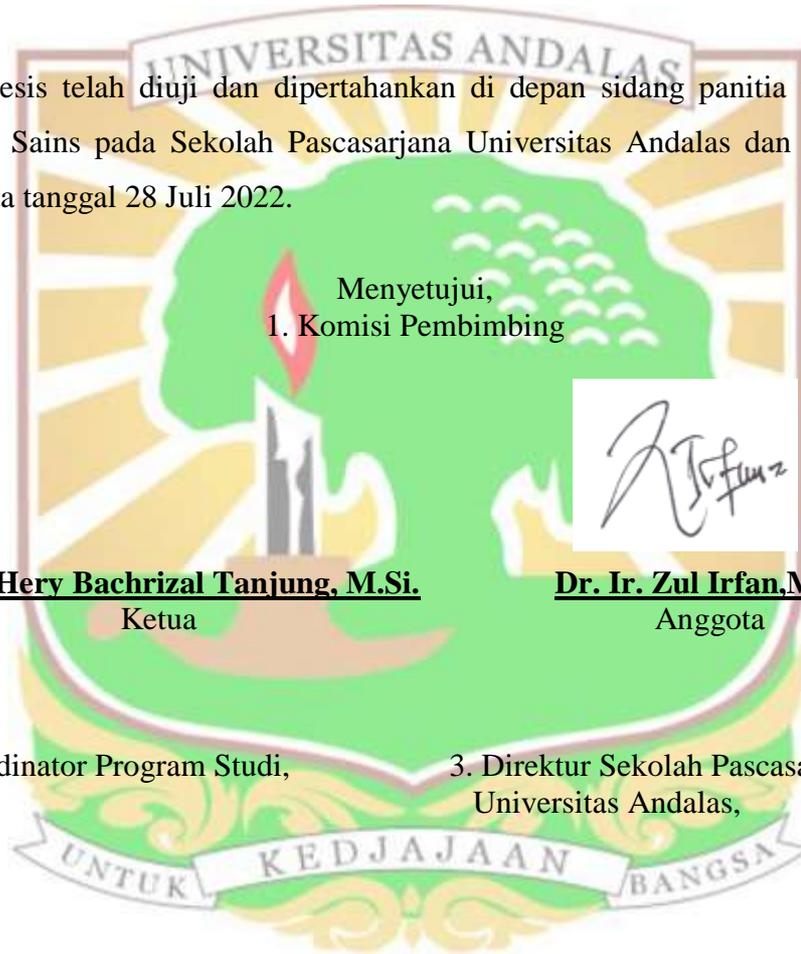
3. Direktur Sekolah Pascasarjana
Universitas Andalas,

Dr. Ir. Hery Bachrizal Tanjung, M.Si.

NIP. 19621225 1989031 005

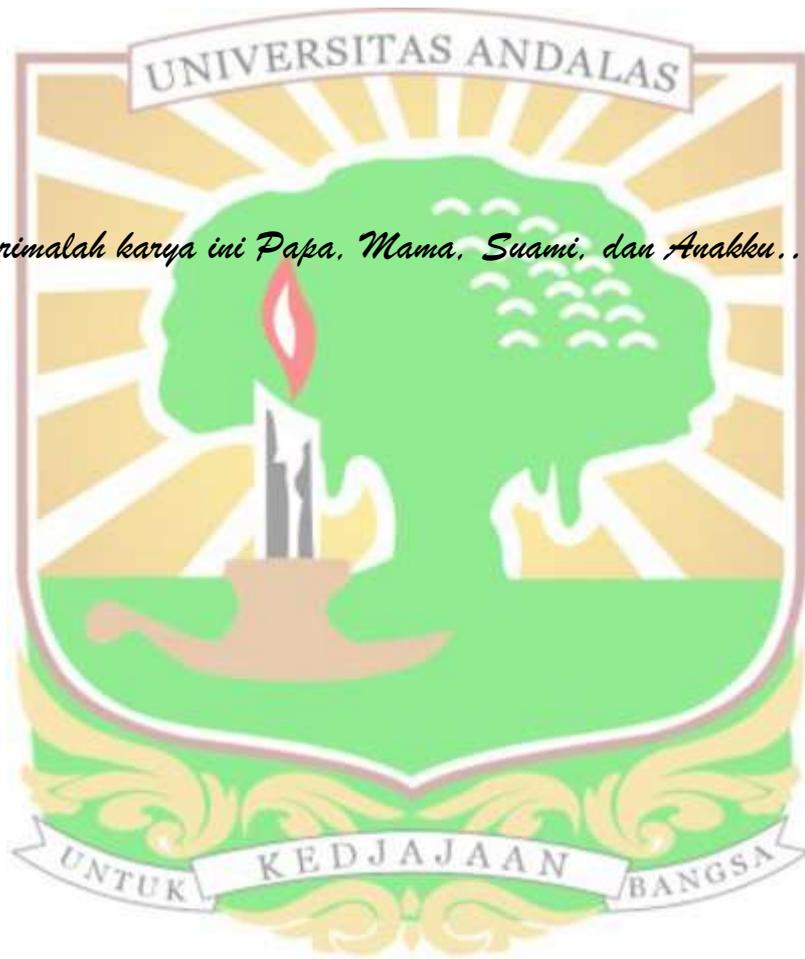
Prof. Dr. rer. soz. Nusyirwan Effendi

NIP. 19640624 199001 1 002



*Allah yang meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (AlZur'an surat
Mujaadilah ayat 11)*

Terimalah karya ini Papa, Mama, Suami, dan Anakku.... tercinta



PERNYATAAN

Dengan ini saya, nama: Mekar Sari Eka Putri yang beralamat di Komplek Kehutanan Blok D No. 10 Gunung Sarik, Padang, Sumatera Barat (kodepos: 25158), menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dicantumkan dalam naskah dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.



Padang,
Penulis,

2022

Mekar Sari Eka Putri

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 29 Juli 1983 di Painan, sebagai anak pertama dari ayah Yaslim, S.Pd. dan Ibu Dra.Asmariati. Penulis menamatkan SD pada tahun 1995, SMP tahun 1998 dan SMA pada tahun 2001 di Taluk Kuantan. Penulis memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Jurusan Teknologi Hasil Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor tahun 2005.

Sejak tahun 2010 sampai sekarang penulis ditugaskan sebagai Penyuluh Kehutanan pada Balai Taman Nasional Siberut. Pada tahun 2018 memperoleh kesempatan meneruskan pendidikan pada Sekolah Pascasarjana Program Studi Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Universitas Andalas di Padang.

Padang,

2022

Mekar Sari Eka Putri



ANALISIS PARTISIPASI ANGGOTA KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) PADA KEGIATAN KTH DI KOTA PADANG

Oleh : Mekar Sari Eka Putri (1821662004)
(Dibawah Bimbingan : Dr. Ir. Hery Bachrizal Tanjung, M.Si.
dan Dr. Ir. Zul Irfan, M.Sc.)

ABSTRACT

Pengelolaan Perhutanan Sosial dilakukan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam bentuk kegiatan KTH meliputi kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha. Dalam mencapai tujuan kegiatan KTH ini diperlukan partisipasi dari anggota KTH. Dalam wilayah Kota Padang terdapat 2 (dua) lokasi Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), namun partisipasi anggota kedua KTH ini masih rendah. Untuk itu, perlu penelitian mendalam untuk menjawab bagaimana partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH di Kota Padang.

Penelitian ini merupakan penelitian *explanatory* (survei) dan kuantitatif. Selanjutnya dalam analisis data digunakan regresi linier berganda yang diolah menggunakan aplikasi *IBM SPSS Statistic 20*.

Tingkat partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH di Kota Padang dalam kategori tinggi. Pada penelitian lainnya ditemukan bahwa hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan formal dukungan pemerintah, dukungan *stake holders* lainnya, dan dukungan pasar. Tingkat partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH Sikayan Balumuik dalam kategori tinggi. Faktor yang mempengaruhinya adalah tingkat pendidikan formal, peran pendamping sebagai advokator, dan dukungan pasar. Sedangkan Tingkat partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH Padang Jariah dalam kategori rendah. Faktor yang mempengaruhinya adalah dukungan pemerintah, dan dukungan pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi ini diketahui berdasarkan hasil penelitian dikesempatan lainnya.

Kata Kunci : Perhutanan Sosial, Partisipasi, Kegiatan KTH

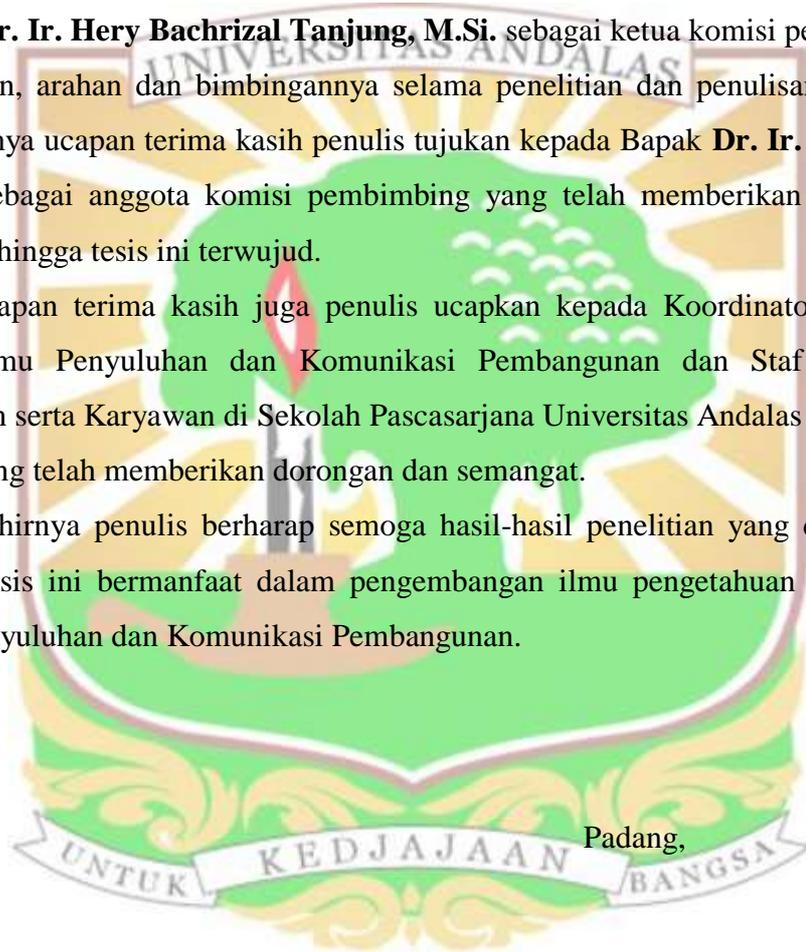
KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas taufik dan hidayahNya penulis telah dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang berjudul "Analisis Partisipasi Anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) pada Kegiatan KTH di Kota Padang".

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak **Dr. Ir. Hery Bachrizal Tanjung, M.Si.** sebagai ketua komisi pembimbing atas saran, arahan dan bimbingannya selama penelitian dan penulisan tesis ini. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis tujukan kepada Bapak **Dr. Ir. Zul Irfan, M.Sc.** sebagai anggota komisi pembimbing yang telah memberikan saran dan kritik, sehingga tesis ini terwujud.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Koordinator Program Studi Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan dan Staf Pengajar, Pimpinan serta Karyawan di Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas dan rekan-rekan yang telah memberikan dorongan dan semangat.

Akhirnya penulis berharap semoga hasil-hasil penelitian yang dituangkan dalam tesis ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan.



Padang,

2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Pembangunan Kehutanan	5
B. Perhutanan Sosial.....	9
C. Kelompok Tani Hutan	11
D. Partisipasi Masyarakat.....	12
E. Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi	19
F. Penelitian Terdahulu	28
G. Kerangka Pikir Penelitian	34
H. Hipotesis Penelitian.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Lokasi dan Waktu.....	37
B. Design Penelitian.....	37
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	39
D. Instrumen Penelitian.....	39
E. Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional.....	40
F. Data dan Sumber Data.....	44
G. Analisis Data	45
H. Uji Instrumen Penelitian.....	47

I. Pengujian Asumsi Klasik	47
J. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumentasi.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
B. Gambaran Umum KTH Sikayan Balumuik	55
C. Gambaran Umum KTH Padang Janiah.....	59
D. Deskripsi Karakter Individu.....	60
E. Deskripsi Peran Pendamping	67
F. Deskripsi Aspek Dukungan.....	71
G. Tingkat partisipasi anggota KTH dalam kegiatan KTH.....	80
H. Hubungan Karakteristik Individu, Peran Pendamping, Aspek Dukungan dengan Tingkat Partisipasi Anggota KTH pada Kegiatan KTH.....	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN.....	104



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Karakteristik tipologi partisipasi	13
Tabel 2. Peran <i>stake holders</i> dalam kegiatan KTH	24
Tabel 3. Sistematis desain penelitian	30
Tabel 4. Indikator, definisi, parameter, dan skala karakteristik Individu	38
Tabel 5. Indikator, definisi, parameter, dan skala pengukuran peran pendamping	41
Tabel 6. Indikator, definisi, parameter, dan skala pengukuran aspek dukungan	42
Tabel 7. Indikator, definisi, parameter, dan skala pengukuran tingkat partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH.....	43
Tabel 8. Sarana pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan menurut kelurahan di wilayah Kecamatan Pauh tahun 2020.....	44
Tabel 9. Jumlah Luas Wilayah dan jumlah penduduk menurut kelurahan di wilayah Kecamatan Pauh tahun 2020.....	54
Tabel 10. Sarana pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan menurut kelurahan di wilayah Kecamatan Pauh tahun 2020.....	54
Tabel 11. Jumlah lulusan berdasarkan jenjang pendidikan menurut kelurahan di wilayah Kecamatan Pauh tahun 2020.....	55
Tabel 12. Profil singkat KTH Sikayan Balumuik tahun 2021.....	56
Tabel 13. Kondisi KTH Sikayan Balumuik tahun 2021	58
Tabel 14. Profil singkat KTH Padang Janiah tahun 2021	59
Tabel 15. Variabel karakteristik individu untuk umur pada anggota KTH di Kota Padang	61
Tabel 16. Variabel karakteristik individu untuk tingkat pendidikan formal pada anggota KTH di Kota Padang	63
Tabel 17. Variabel karakteristik individu untuk jenis kelamin pada anggota KTH di Kota Padang.....	64

Tabel 18. Variabel karakteristik individu untuk proporsi pendapatan dari kegiatan KTH pada anggota di Kota Padang	66
Tabel 19. Sebaran responden berdasarkan penilaian peran pendamping sebagai fasilitator pada kegiatan KTH di Kota Padang	67
Tabel 20. Nilai peran pendamping sebagai fasilitator pada kegiatan KTH di Kota Padang	67
Tabel 21. Sebaran responden berdasarkan penilaian peran pendamping sebagai edukator pada kegiatan KTH di Kota Padang	69
Tabel 22. Nilai peran pendamping sebagai edukator pada kegiatan KTH di Kota Padang.....	69
Tabel 23. Sebaran responden berdasarkan penilaian peran pendamping sebagai advokator pada kegiatan KTH di Kota Padang	71
Tabel 24. Nilai peran pendamping sebagai advokator pada KTH di Kota Padang.....	71
Tabel 25. Sebaran responden berdasarkan penilaian aspek dukungan dari dukungan pemerintah pada kegiatan KTH di Kota Padang	72
Tabel 26. Nilai aspek dukungan dari dukungan pemerintah pada kegiatan KTH di Kota Padang.....	73
Tabel 27. Sebaran responden berdasarkan penilaian aspek dukungan dari dukungan <i>stake holders</i> lainnya pada kegiatan KTH di Kota Padang.....	75
Tabel 28. Nilai aspek dukungan dari dukungan <i>stake holders</i> lainnya pada kegiatan KTH di Kota Padang	76
Tabel 29. Sebaran responden berdasarkan penilaian aspek dukungan dari dukungan pasar pada kegiatan KTH di Kota Padang.....	79
Tabel 30. Nilai aspek dukungan dari dukungan pasar pada kegiatan KTH di Kota Padang	79
Tabel 31. Sebaran responden berdasarkan penilaian tingkat partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH di Kota Padang	81
Tabel 32. Nilai tingkat partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH di Kota Padang.....	81

Tabel 33. Sebaran responden berdasarkan penilaian tingkat partisipasi anggota KTH dalam melaksanakan kegiatan KTH di Kota Padang	82
Tabel 34. Nilai tingkat partisipasi anggota KTH dalam merencanakan kegiatan KTH di Kota Padang.....	82
Tabel 35. Sebaran responden berdasarkan penilaian tingkat partisipasi anggota KTH dalam melaksanakan kegiatan KTH di Kota Padang	85
Tabel 36. Nilai tingkat partisipasi anggota KTH dalam melaksanakan kegiatan KTH di Kota Padang.....	86
Tabel 37. Sebaran responden berdasarkan penilaian tingkat partisipasi anggota KTH dalam memanfaatkan hasil kegiatan KTH di Kota Padang.....	88
Tabel 38. Nilai tingkat partisipasi anggota KTH dalam memanfaatkan hasil kegiatan KTH Sikayan Balumuik, KTH Padang Janiah, dan Kota Padang di Kota Padang	88
Tabel 39. Sebaran responden berdasarkan penilaian tingkat partisipasi anggota KTH dalam mengevaluasi kegiatan KTH di Kota Padang	89
Tabel 40. Nilai tingkat partisipasi anggota KTH dalam mengevaluasi kegiatan KTH di Kota Padang.....	89
Tabel 41. Hasil anova variabel bebas terhadap tingkat partisipasi pada kegiatan KTH Sikayan Balumuik.....	119
Tabel 42. Nilai <i>Adjusted R Square</i> pengaruh variabel bebas terhadap tingkat partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH Sikayan Balumuik	119
Tabel 43. Uji Parsial variabel bebas terhadap tingkat partisipasi pada kegiatan KTH Sikayan Balumuik.....	92
Tabel 44. Hasil anova variabel bebas terhadap tingkat partisipasi pada kegiatan KTH Padang Janiah	119
Tabel 45. Nilai <i>Adjusted R Square</i> pengaruh variabel bebas terhadap tingkat partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH Padang Janiah.....	119
Tabel 46. Uji Parsial variabel bebas terhadap tingkat partisipasi pada kegiatan KTH di Kota Padang.....	94

Tabel 47. Hasil anova variabel bebas terhadap tingkat partisipasi pada kegiatan KTH di Kota Padang.....	120
Tabel 48. Nilai <i>Adjusted R Square</i> pengaruh variabel bebas terhadap tingkat partisipasi anggota pada kegiatanKTH di Kota Padang.....	120
Tabel 49. Uji Parsial variabel bebas terhadap tingkat partisipasi pada kegiatan KTH di Kota Padang.....	96



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Capaian izin perhutanan sosial tahun 2007-2021	10
Gambar 2. Partisipasi berbagai <i>stake holders</i> dalam kegiatan KTH	12
Gambar 3. Fokus skema partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH.....	34
Gambar 4. Kerangka Pikir Penelitian	35
Gambar 5. Wawancara dengan Ketua KTH Sikayan Balumuik.....	45
Gambar 6. Wawancara dengan Ketua KTH Padang Jariah	45
Gambar 7. Letak Kecamatan Pauh di Peta Kota Padang (RTRW Kota Padang 2012-2030)	52
Gambar 8. Batas wilayah Kecamatan Pauh (Badan Pusat Statistik, 2016)	53
Gambar 9. Peta wilayah kelola KTH Sikayan Balumuik	57
Gambar 10. Peta wilayah kelola KTH Padang Jariah	60
Gambar 11. Pelatihan <i>roasting</i> biji kopi	75
Gambar 12. Budidaya serai wangi	77
Gambar 13. Pameran dan penjualan hasil HHBK dan olahannya	80
Gambar 14. Sekretariat/posko KTH Sikayan Balumuik.....	85
Gambar 15. Rumah pengolahan biji kopi	85
Gambar 16. Perencanaan dan berbagai diskusi KTH Padang Jariah	85
Gambar 17. Diskusi KTH Padang Jariah dilakukan di berbagai kesempatan.....	85
Gambar 18. Bibit tanaman untuk pakan lebah madu kelulut.....	86
Gambar 19. Teknik budidaya tanaman bunga untuk pakan lebah madu kelulut	86

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Karakteristik individu responden KTH Sikayan Balumuik.....	105
Lampiran 2. Karakteristik individu responden KTH Padang Janiah.....	112
Lampiran 3. Hasil kuisioner peran pendamping, aspek dukungan, dan tingkat partisipasi pada kegiatan KTH Sikayan Balumuik.....	114
Lampiran 4. Hasil kuisioner peran pendamping, aspek dukungan, dan tingkat partisipasi pada kegiatan KTH Padang Janiah.....	116
Lampiran 5. Hasil uji validitas dan uji reabilitas	117
Lampiran 6. Hasil regresi linear berganda KTH Sikayan Balumuik, KTH Padang Janiah, dan di Kota Padang.....	119
Lampiran 7. Hasil uji asumsi klasik KTH Sikayan Balumuik	121
Lampiran 8. Hasil uji asumsi klasik KTH Padang Janiah	122
Lampiran 9. Hasil uji asumsi klasik KTH di Kota Padang	123



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan kehutanan telah mengalami perubahan paradigma dari konsep *forest timber management* (pengelolaan hutan berorientasi ekonomi) menjadi *forest community management* (pengelolaan hutan berorientasi masyarakat) sehingga pengelolaan kehutanan dapat berkelanjutan (Dipokusumo, 2017). Konsep ini didukung oleh para ahli dan praktisi kehutanan sedunia pada Kongres Kehutanan Sedunia VIII tanggal 16-28 Oktober 1978 di Jakarta.

Salah satu kebijakan pengelolaan hutan bersama masyarakat yang sedang berkembang saat ini adalah Program Perhutanan Sosial. Program ini pertama kali diimplementasikan oleh Perhutani pada tahun 1982 di lahan hutan negara dan di luar kawasan hutan negara untuk membangun hutan pada lahan kosong, membuka peluang kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat (Hindra, 2005 dalam Utama, 2010).

Perhutanan Sosial merupakan program prioritas pemerintah sebagai sistem pengelolaan hutan lestari dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat. Program ini dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ MenLHK Nomor 83 tahun 2016). Perhutanan Sosial dilaksanakan dalam 5 (lima) skema, yaitu: Hutan Nagari (HN) atau Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (KK). Di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 terdapat sebanyak 161 lokasi Perhutanan Sosial yang telah memperoleh izin dari Menteri LHK, yaitu: HN 99 lokasi, HKm 50 lokasi, HA 5 lokasi, HTR 4 lokasi dan Kemitraan Kehutanan 3 lokasi.

Pengelolaan Perhutanan Sosial dilakukan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam bentuk kegiatan KTH yang meliputi kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha. Dalam mencapai tujuan kegiatan KTH ini diperlukan partisipasi aktif dari anggota KTH dan dukungan dari berbagai *stakeholders* seperti masyarakat sekitar hutan, pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan/KLHK, Dinas Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung/ KPHL, pemerintahan kecamatan dan kelurahan), lembaga masyarakat, perusahaan dan pasar.

Partisipasi dari anggota KTH merupakan hal yang paling penting dalam mencapai tujuan KTH. Hal ini sesuai dengan pernyataan Slamet (2003) bahwa partisipasi masyarakat perlu menjadi perhatian utama karena merupakan penentu keberhasilan setiap kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan perwujudan dari kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab masyarakat untuk memperbaiki mutu hidup mereka (Mardikanto, 2009). Fakta ini juga terlihat dari beberapa hasil penelitian empiris mengenai pembangunan kehutanan. Penelitian Sarmila (2012) menunjukkan bahwa semakin baik tingkat partisipasi masyarakat, maka akan semakin terjaga kelestarian hutan mangrove di kawasan pesisir Kelurahan Terusan. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam setiap aktivitas hutan nagari maka tujuan akhir pengelolaan hutan nagari tidak berjalan (Tanjung, 2016). Hasil penelitian Dipokusumo (2017) juga menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, mampu mengubah penghidupan mereka. Namun dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan masih tergolong rendah karena rendahnya tingkat keberdayaan dan kurang optimalnya tingkat kemampuan masyarakat sekitar hutan dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan (Suprayitno, 2011). Partisipasi anggota masyarakat pengelola hutan terutama dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan monitoring evaluasi masih tergolong rendah (Salampessy *et al.*, 2010 dalam Tanjung, 2016) yang disebabkan oleh belum adanya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan (Guniastuti *et al.*, 2014 dalam Tanjung, 2016).

Partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Sebagai suatu kegiatan, Verhangen (1979) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Partisipasi sebagai proses akan menciptakan jaringan sosial baru yang masing-masing berusaha untuk melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan demi

tercapainya tujuan akhir yang diinginkan masyarakat atau struktur sosial yang bersangkutan (Mardikanto,2009).

Merujuk pada beberapa permasalahan di atas, maka dirasa perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai tingkat partisipasi anggota KTH dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasinya.

B. Rumusan Masalah

Provinsi Sumatera Barat memiliki 161 lokasi Perhutanan Sosial yang tersebar di kabupaten dan kota. Dalam wilayah Kota Padang terdapat 2 (dua) lokasi dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Kedua lokasi ini berbatasan langsung dengan hutan lindung Bukit Barisan. Hutan lindung mempunyai fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah. Perbatasan hutan ini berupa areal penggunaan lain (APL) yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dengan berbagai aktivitas seperti berkebun dan pemukiman. Dalam rangka mencegah gangguan terhadap hutan ini, sebagian kawasannya dikelola dalam Program Perhutanan Sosial dengan skema HKm untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan sekitarnya.

HKm di Kota Padang dilaksanakan oleh KTH Sikayan Balumuik dan KTH Padang Jariah. KTH Sikayan Balumuik terletak di Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Sesuai dengan Rencana Kerja Umum Hutan Kemasyarakatan (RKU-IUPHKm) dan Rencana Kerja Tahunan Hutan Kemasyarakatan (RKT-IUPHKm) tahun 2021, KTH ini melakukan berbagai kegiatan yaitu Konservasi, Perlindungan dan Pengamanan Hutan; Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil hutan Bukan Kayu; Pemanfaatan Kawasan Hutan; Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan Pengembangan Kelembagaan.

Sedangkan KTH Padang Jariah terletak di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Sesuai RKU-IUPHKm dan RKT-IUPHKm tahun 2021, KTH ini berbagai kegiatan yaitu Konservasi, Perlindungan dan Pengamanan Hutan; Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil hutan Bukan

Kayu; Pemanfaatan Kawasan Hutan; Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan Pengembangan Kelembagaan.

Menurut laporan pelaksanaan fasilitasi peningkatan kelas KTH Sikayan Balumuik tahun 2018 dan informasi dari penyuluh kehutanan atau pendamping di lokasi ini, partisipasi anggota KTH ini masih rendah sehingga pengelolaannya belum optimal. Kondisi yang hampir sama juga terjadi pada KTH Padang Janiah. Menurut penyuluh kehutanan (yang juga mendampingi KTH Sikayan Balumuik) tingkat partisipasi dan perkembangan pengelolaan perhutanan sosial pada KTH Padang Janiah lebih rendah dibandingkan KTH Sikayan Balumuik.

Namun mengingat partisipasi masyarakat sangat diperlukan sebagai pilar utama dalam pembangunan (Slamet, 2003) dan strategi pembangunan di negara-negara berkembang memerlukan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaannya (Claude dan Zamor, 1985 dalam Anantanyu, 2009). Oleh karena itu partisipasi anggota KTH sangat diperlukan dalam mencapai tujuan KTH. Partisipasi harus ada di setiap kegiatan KTH. Untuk itu, perlu penelitian mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian ini yaitu bagaimana partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH di KTH Kota Padang, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH di Kota Padang.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH di KTH Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam ilmu serta wawasan atas teori yang dipelajari dan data yang telah diteliti.
2. Bagi anggota KTH atau masyarakat pelaku kehutanan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan partisipasi pada setiap kegiatan KTH.

3. Bagi pemerintah dan instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi dalam menyusun peraturan, kebijakan, dan perencanaan pembangunan kehutanan bersama masyarakat.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Kehutanan

Mengingat lebih 67% luas daratan Indonesia berupa hutan maka pengelolaan hutan perlu mendapat perhatian khusus, hal ini juga sesuai Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 33, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Dalam pengelolaan hutan ini dipahami bahwa sumberdaya hutan sebagai *Common Pool Resources* dapat berkurang manfaatnya karena penggunaan secara berlebihan. Oleh karena itu perlu didukung melalui kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pembinaan sehingga tujuan pembangunan kehutanan berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga keseimbangan lingkungan dapat tercapai.

Akses dan hak pemanfaatan berbagai kategori hutan harus diatur sebaik-baiknya bagi semua kelompok masyarakat pelaku pembangunan kehutanan dengan memperhatikan berbagai aspek (Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan). Untuk mewujudkan paradigma kehutanan berbasis masyarakat diperlukan juga *Good Governance* (kepemerintahan yang baik) yang menjalankan prinsip-prinsip berikut (Indrawan *et al.*, 2007 dalam Nursalam, 2007):

- a. Partisipasi; untuk mewujudkannya perlu dikembangkan mekanisme hukum dan ekonomi, yang mendorong agar hak-hak dan kepemilikan (masyarakat) setempat dihargai sewajarnya.
- b. Kepastian hukum; hak-hak masyarakat adat perlu dihormati, dilindungi dan ditegakkan sebagai dasar pembangunan sumber daya manusia, pengelolaan SDA dan pengaturan tata ruang.
- c. Transparansi; salah satu mekanisme yang efektif disini adalah membangun konsultasi publik dan dialog dengan pihak terkait secara terus menerus.
- d. Bersifat tanggap.
- e. Pengembangan kesepakatan dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas.
- f. Kesetaraan.

- g. Efektif dan efisien.
- h. Bertanggung-gugat.
- i. Visi strategis; berupa manajemen sumber daya alam dalam pembangunan berkelanjutan.

Perkembangan pembangunan kehutanan berbasis masyarakat ini telah diarahkan kepada suatu bentuk konsep dan kebijakan yang dikenal dengan Perhutanan Sosial.

A.1 Hutan Lindung

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 41 tahun 1999 jo UU No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan, pemerintah membagi hutan berdasarkan fungsi pokoknya, yaitu: hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi utama sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Fungsi-fungsi tersebut dapat terjadi karena tanaman hutan memberikan pengaruh positif terhadap konservasi tanah dan kualitas hara tanah.

Selanjutnya berdasarkan PP No. 34/2002 jo PP No. 6/2007 jo PP No. 3/2008 tentang Tata Hutan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, bahwa pemanfaatan kawasan hutan lindung dapat dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan bahwa pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah. Pengelolaan dilakukan oleh unit pengelolaan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukan hutan yang dapat dikelola secara efisien dan yang paling penting adalah dikelola secara lestari. Unit pengelolaan hutan lindung disebut dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL). Keunikan suatu daerah serta kondisi sosial dan lingkungan yang sangat berkaitan dengan kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan kemampuan pengelolaan secara khusus, maka pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah tertentu dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

yang bergerak di bidang kehutanan, baik dalam bentuk perusahaan umum, perusahaan jawatan, maupun perusahaan perseroan, dimana pembinaannya di bawah Menteri Kehutanan.

Untuk pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung jenis kegiatan usaha yang dapat dilakukan berupa pemanfaatan jasa aliran air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan penyimpanan karbon. Sedangkan untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung, hasil hutan bukan kayu yang dapat dipungut berupa rotan, bambu, madu, getah, buah, dan jamur.

A.2 Skema Hutan Kemasyarakatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 jo P.18/Menhut-II/2009 jo P.13/Menhut-II/2010 jo P.52/Menhut-II/2011 jo P.88/Menhut-II/2014, Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. HKm bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan kehutanan bukan hanya berpartisipasi namun memiliki tanggung jawab langsung terhadap pengelolaannya. Selain itu, diatur juga tentang azas dan prinsip penetapan areal kerja, perijinan, hak dan kewajiban serta pembiayaan HKm. Kawasan hutan negara yang dapat dimanfaatkan untuk HKm adalah hutan lindung dan hutan produksi.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 31/Kpts-II/2001, pada pasal 5 ayat 2 yang menunjukkan bahwa tidak semua hutan produksi dan hutan lindung dapat dijadikan wilayah kelola HKm, ada beberapa kriteria yang harus dipatuhi antara lain: (1) bukan merupakan wilayah yang kondisi hutannya masih bagus, (2) wilayah kelola HKm tidak diizinkan membuka lahan hutan yang masih baru atau memperluas lahan garapan, dan (3) HKm dapat dilakukan pada lahan kritis dan sudah digarap oleh masyarakat selama beberapa tahun.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan tertera bahwa HKm dilaksanakan dengan prinsip:

tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan kayu dapat dilakukan dari hasil penanaman, mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya, menumbuhkembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan, memerankan masyarakat sebagai pelaku utama, adanya kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas publik, dan partisipatif dalam pengambilan keputusan.

Dalam skema HKm, tahapan proses perijinan meliputi pengajuan permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) oleh kelompok masyarakat setempat, kelompok tani hutan atau ketua koperasi kepada Bupati/Walikota, tim teknisnya akan melakukan verifikasi terhadap kesesuaian areal yang diusulkan dan validitas kelompok pengusul, jika sudah merasa cukup Bupati/Walikota akan melanjutkan usulan kelompok masyarakat tersebut kepada Menteri Kehutanan untuk mendapatkan penetapan areal kerja HKm, setelah mendapatkan pencadangan areal Bupati/Walikota akan segera memberikan IUPHKm. IUPHKm diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 tahun.

IUPHKm bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan. IUPHKm memuat data tentang luas HKm, lokasi, fungsi kawasan, hak dan kewajiban, daftar anggota kelompok, masa berlaku izin, dan sanksi apabila terjadi pelanggaran dalam kegiatan pengelolaan HKm. IUPHKm yang berada pada kawasan hutan lindung kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, serta pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dengan ketentuan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Manfaat adanya program perhutanan sosial dengan skema HKm untuk masyarakat adalah pemberian izin kelola HKm dengan kepastian hak akses masyarakat untuk turut mengelola kawasan hutan. Hasil hutan di lahan HKm dapat dimanfaatkan. Setiap pemegang IUPHKm pada hutan lindung berhak untuk mendapatkan fasilitasi, melakukan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan kawasan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Sedangkan kewajiban pemegang IUPHKm adalah melakukan penataan batas areal kerja

kelompok, menyusun rencana kerja, provisi sumber daya hutan atas hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, serta menyampaikan laporan kegiatan HKM kepada pemberi izin (Cahyaningsing, *et.al* dalam Haryani, 2018).

B. Perhutanan Sosial

Dalam penelitian Utama (2010), berdasarkan catatan Awang (2004) dan Hindra (2005), terdapat beberapa periode konsep dan pelaksanaan pendekatan sosial kemasyarakatan dalam bidang pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia (Jawa dan luar Jawa) yang digagas oleh perusahaan dan pemerintah, yaitu:

1. Periode 1972-1984: *Prosperity approach* (Pendekatan Kesejahteraan). Periode ini digunakan oleh Perhutani di Jawa untuk mengatasi berbagai konflik dengan cara pemanfaatan lahan untuk tumpang sari dengan tanaman pertanian maupun pengembangan ternak. Kegiatan belum menunjukkan hasil yang memuaskan, dengan dominasi kegiatan fisik.
2. Periode 1984-1986: Persiapan dan penelitian kehutanan sosial di Jawa. Disini dilakukan penelitian yang berkaitan dengan aspek sosiologi dan antropologi masyarakat sekitar hutan yang melibatkan Fahutan IPB, Fahutan UGM dan Perhutani.
3. Periode 1982-2000: Implementasi Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) dan Perhutanan Sosial oleh Perhutani di luar kawasan hutan negara.
4. Periode 1992-2000: Hak Pengelolaan Hutan (HPH) Bina Desa di luar Jawa.
5. Periode 1995-2003: Hutan Kemasyarakatan (HKm) sesuai SK Menteri Kehutanan (Menhut) Nomor 31/Kpts-II/2001 yang menekankan prinsip antara lain bahwa masyarakat sebagai pelaku utama, pemerintah sebagai fasilitator, perencanaan partisipatif, manajemen berkeadilan, dan pemberdayaan.
6. Periode 2001-sekarang: PHBM (di Jawa). Sebagai dampak dari reformasi, antara lain dengan meningkatnya dorongan publik tentang transparansi pengelolaan hutan, maka Perhutani membuat kebijakan mengenai Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) melalui SK

Dewan Direksi Perum Perhutani Nomor 136/2001 yang menekankan pengelolaan bersama antara Perhutani dan masyarakat dengan jiwa atau prinsip berbagi. PHBM dimaksudkan untuk memberi arah pengelolaan sumber daya alam yang memadukan aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional.

7. Periode 2003- sekarang: Perhutanan sosial di seluruh Indonesia dengan ciri pokok pengelolaan berbasis pemberdayaan, tidak mengubah status dan fungsi kawasan, tidak memberikan hak kepemilikan, dan strategi pokok melalui kelola kawasan, kelola kelembagaan dan kelola usaha.

Untuk tahun 2015-2019 pemerintah telah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta Ha dalam program Perhutanan Sosial, serta penetapan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) revisi III seluas 13,8 juta Ha. Pada program ini pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat sudah mencapai seluas 3.992.051 Ha, dengan melibatkan lebih dari 679 ribu KK atau telah memberi manfaat kepada kurang lebih 2,7 juta jiwa masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Adapun capaian program Perhutanan Sosial sampai tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Capaian izin Perhutanan Sosial tahun 2007-2021.
 Sumber data: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021).

Masyarakat desa memiliki interaksi atau ketergantungan dengan hutan yang berada di sekitarnya, baik secara ekologis, ekonomi maupun sosial karena

kelangkaan sumberdaya. Sebagian besar masyarakat desa sekitar hutan tergolong masyarakat miskin karena bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Dengan kondisi tersebut, kebutuhan hidup mereka sehari-hari diperoleh dari hutan, misalnya untuk memenuhi kebutuhan kayu bakar, papan, pakan ternak, dan bahan pangan, sehingga ketergantungan masyarakat terhadap hutan menjadi sangat besar (Adryani, 2002 dan Agustinawati, 2011 dalam Haryani, 2018).

Pada umumnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap hasil hutan (Munawaroh, *et.al* 2011 dalam Haryani, 2018). Baharudin (2006) dan Nurhalimah (2014) dalam Haryani (2018) menjelaskan bahwa pemanfaatan sumberdaya hutan umumnya untuk kebutuhan atau kepentingan sendiri dan bangunan umum di desa serta untuk bahan kerajinan masyarakat. Pengelolaan *Non Timber Forest Product* (HHBK) dan pemanfaatan jasa lingkungan secara berkelanjutan sangat penting dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat perdesaan di sekitar hutan (Haryani, 2018).

C. Kelompok Tani Hutan (KTH)

Kelompok Tani Hutan (KTH) merupakan kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Terkait KTH ini diatur dalam PerMenLHK Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan yang menjelaskan bahwa KTH memiliki ciri sebagai berikut:

1. Saling mengenal, akrab dan saling percaya diantara sesama anggota.
2. Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani.
3. Memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan dan ekologi.
4. Ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.

Selanjutnya dijelaskan tentang fungsi KTH yaitu sebagai kelas belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi. Pembinaan KTH dilakukan untuk mewujudkan KTH yang produktif, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

Pembinaan pada kegiatan KTH dapat dilaksanakan oleh penyuluh kehutanan/ pendamping yang meliputi aspek:

1. Kelola kelembagaan
2. Kelola kawasan
3. Kelola usaha

Dalam kegiatan KTH untuk mencapai tujuan pembangunan kehutanan, diperlukan dukungan dan partisipasi dari berbagai *stakeholders* terkait, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Partisipasi berbagai *stakeholders* pada kegiatan KTH.

D. Partisipasi

Menurut Syahyuti (2014), partisipasi dibutuhkan agar terjamin pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta perlu dipahami bahwa individu dan lembaga saling berperan untuk terjadinya perubahan. Partisipasi merupakan proses seluruh pihak dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan. Beberapa karakteristik tipologi partisipasi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik tipologi partisipasi.

Rendah	Sedang	Tinggi
Masyarakat hanya pasif, menerima pemberitahuan, menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan tidak terlibat dalam pembuatan keputusan	Masyarakat berkonsultasi, bertanya, dilibatkan dengan diberi upah, tidak ikut proses pembelajaran, kelompok dibentuk sebagai bagian proyek	Masyarakat berperan dalam analisis perencanaan, mengontrol pelaksanaan keputusan, memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan, inisiatif sendiri dan memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada
Tidak ada input dan terdapat insentif	Masyarakat lokal bekerjasama dengan pihak luar untuk menentukan prioritas, dan pihak luar bertanggung jawab secara langsung kepada proses	Masyarakat lokal dan luar saling membagi pengetahuannya, bekerjasama untuk merencanakan aksi, pihak luar hanya memfasilitasi
Potensi keberlanjutan program rendah	Ada harapan keberlanjutan	Keberlanjutan diyakini akan tinggi, meskipun sudah ditinggalkan petugas pendamping

Sumber: Syahyuti (2014).

Partisipasi masyarakat mengalami proses pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan menumbuhkan motivasi masyarakat agar dapat dan mau memanfaatkan kesempatan yang tersedia. Partisipasi masyarakat terwujud apabila terpenuhi: (a) kemauan, (b) kemampuan, dan (c) kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi (Slamet, 1992 dalam Mardikanto, 2009).

Partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Sebagai suatu kegiatan, Verhangen (1979) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Partisipasi sebagai proses akan menciptakan jaringan sosial baru yang masing-masing berusaha untuk melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan demi tercapainya tujuan akhir yang diinginkan masyarakat atau struktur sosial yang bersangkutan (Mardikanto, 2009).

Beberapa alasan petani berpartisipasi dalam keputusan-keputusan program pembangunan antara lain karena: (1) petani memiliki informasi yang sangat penting untuk merencanakan program; (2) ikut bertanggung-jawab di dalamnya; (3) terkait tujuan yang ingin dicapai; dan (4) banyaknya permasalahan pembangunan pertanian, tidak mungkin dipecahkan secara perorangan, partisipasi kelompok sasaran dalam keputusan kolektif sangat dibutuhkan (Anantanyu, 2009).

Strategi pembangunan di negara-negara berkembang memerlukan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaannya, karena dapat: (a) meningkatkan keterpaduan, (b) meningkatkan hasil dan penerimaan terhadap hasil, (c) membantu menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan, (d) meningkatkan kualitas hasil, (e) meningkatkan jumlah dan ketepatan informasi, dan (f) memungkinkan operasional yang lebih ekonomis dengan penggunaan lebih banyak sumberdaya manusia lokal dan membatasi transportasi serta manajemen yang mahal (Claude dan Zamor, 1985 dalam Anantanyu, 2009). Goldsmith dan Blustain (1988) dalam Nugraha (2012) menyatakan bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika: (1) dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal, (2) memberikan manfaat langsung, dan (3) adanya kontrol oleh masyarakat.

Howard *et.al.* (1994) dalam Anantanyu (2009) membedakan tipe keterlibatan dalam partisipasi yaitu: *physical involvement* (keterlibatan fisik), *social involvement* (keterlibatan sosial), dan *psychological involvement* (keterlibatan psikologis).

Menurut Mardikanto (2009) tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu adanya:

1. kemauan masyarakat untuk berpartisipasi
2. kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi
3. kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi

Slamet (1985) dalam Mardikanto (2009) menyatakan bahwa adanya keragaman partisipasi berdasarkan input yang disumbangkan, meliputi:

1. Ikut memberi input proses pembangunan, menerima imbalan atau input dan ikut menikmati hasilnya
2. Ikut memberi input dan menikmati hasilnya
3. Ikut memberi input dan menerima imbalan tetapi tanpa ikut menikmati hasil pembangunan secara langsung
4. Menikmati/memanfaatkan hasil pembangunan tanpa ikut memberi input
5. Memberi input tetapi tanpa menerima imbalan dan tidak menikmati hasilnya

Berkaitan dengan tingkat kesukarelaan masyarakat untuk berpartisipasi, Dusseldorp (1981) dalam Mardikanto (2009) membedakan adanya beberapa jenjang kesukarelaan, sebagai berikut:

1. Partisipasi spontan, yaitu peranserta yang tumbuh karena motivasi intrinsik berupa pemahaman, penghayatan, dan keyakinan sendiri.
2. Partisipasi terinduksi, yaitu peranserta yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh, dorongan) dari luar, meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi.
3. Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, yaitu peran serta yang tumbuh karena adanya tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya warga masyarakat pada umumnya, atau peranserta yang dilakukan untuk mematuhi kebiasaan, nilai-nilai, atau norma yang dianut oleh masyarakat setempat. Jika tidak berperanserta khawatir akan tersisih atau dikucilkan masyarakatnya.
4. Partisipasi tertekan oleh alasan sosial-ekonomi, yaitu peran serta yang dilakukan karena takut akan kehilangan status sosial atau menderita kerugian/tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan.
5. Partisipasi tertekan oleh peraturan, yaitu peranserta yang dilakukan karena takut menerima hukuman dari peraturan/ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan.

Raharjo (1983) dalam Mardikanto (2009) mengemukakan adanya tiga variasi bentuk partisipasi, yaitu:

1. Partisipasi terbatas, yaitu partisipasi yang hanya digerakkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu demi tercapainya tujuan pembangunan, tetapi untuk kegiatan tertentu yang dianggap menimbulkan kerawanan bagi stabilitas nasional dan pembangunan, diatasi.
2. Partisipasi penuh (*full scale participation*) artinya partisipasi seluas-luasnyadalam segala aspek kegiatan pembangunan.
3. Mobilisasi tanpa partisipasi, artinya partisipasi yang dibangkitkan pemerintah (penguasa), tetapi masyarakat sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mempertimbangkan kepentingan pribadi dan tidak diberi kesempatan untuk turut mengajukan tuntutan maupun mempengaruhi jalannya kebijaksanaan pemerintah.

Selanjutnya dalam penelitian Sarmila (2012) dijelaskan tentang varian partisipasi sebagai berikut:

- a. Kehadiran; merupakan varian partisipasi tingkat pertama yang bersifat kuantitatif dan lebih mudah menjadi tolok ukur, sebab jika seseorang hadir dalam suatu kegiatan maka ia dapat dikatakan telah berperan serta.
- b. Representasi; merupakan peranserta yang secara kualitatif lebih tinggi dan mendalam jika dibandingkan dengan kehadiran. Ini meliputi aktivitas penentuan masalah, perumusan masalah, perumusan metode dan pendekatan serta pembuatan keputusan. Individu dikatakan berperan serta dalam varian ini apabila terlibat dalam penentuan masalah.
- c. Pemilikan dan pengendalian; merupakan varian tertinggi dari peran serta secara kualitatif.
- d. Kepemimpinan
- e. Pendidikan
- f. Komunikasi (Tjokroamidjoyo,1990).

Pretty dan Vodouhe (1997) dalam Anantanyu (2009) mengemukakan tentang tipologi partisipasi dalam tujuh tipe, yaitu:

1. Partisipasi pasif (*passive participation*); masyarakat berpartisipasi secara ikut-ikutan, pemberitahuan sepihak dari pengelola kegiatan tanpa mendengarkan tanggapan masyarakat.
2. Partisipasi dalam pemberian informasi (*participation in information giving*);
3. Partisipasi dengan konsultasi (*participation by consultation*); masyarakat berpartisipasi dengan konsultasi, sedangkan agen luar menetapkan masalah dan jalan keluarnya serta memodifikasinya.
4. Partisipasi untuk memperoleh insentif material (*participation for material incentive*); masyarakat berpartisipasi dengan menyediakan sumberdaya, seperti tenaga kerja, untuk memperoleh insentif material.
5. Partisipasi fungsional (*functional participation*); masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok-kelompok dan terlibat mulai dari tahap awal dengan arahan oleh pihak luar.
6. Partisipasi interaktif (*interactive participation*); masyarakat berpartisipasi dalam melakukan analisis bersama, membuat rencana aksi dan membentuk lembaga lokal baru atau penguatan yang lain, menentukan keputusan dan bertanggung jawab dalam pemeliharaan struktur dan praktik.
7. Pengembangan diri (*self-mobilization*); masyarakat berpartisipasi dengan kebebasan inisiatif dari lembaga eksternal.

Berbagai bentuk partisipasi dalam pembangunan dikemukakan oleh Ndraha (1990) dalam Anantanyu (2009), antara lain:

1. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial.
2. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana). Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditumbuhkan sedini mungkin di dalam masyarakat. Partisipasi ini disebut

juga partisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan politik yang menyangkut nasib mereka, dan partisipasi dalam hal yang bersifat teknis.

4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan.
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Adi (2001) dalam Meliala (2018), partisipasi masyarakat atau keterlibatan warga dalam pembangunan dapat dilihat dari beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Perencanaan

Pada tahapan ini, masyarakat diajak turut membuat keputusan menyangkut kepentingan bersama dengan wujud seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program.

2. Tahap Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati. Wujud nyata partisipasi ini digolongkan menjadi tiga, yaitu: (a) partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, (b) partisipasi dalam bentuk sumbangan materi, (c) partisipasi dalam bentuk keterlibatan sebagai anggota proyek (Cohen dan Uphoff, 1977 dalam Meilala, 2018).

3. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Partisipasi disini dilakukan oleh masyarakat terhadap program yang sedang berjalan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya.

Ripai (2013) menyatakan bahwa peran pemerintah dalam menimbulkan stimulasi dan motivasi yang mengarah pada kreativitas masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk partisipasi masyarakat. Maskun dalam Ripai (2013) menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat atas kebijaksanaan pemerintah ditentukan secara bertahap oleh:

1. Terdapatnya pemahaman timbal balik (*mutual understanding*) antara perangkat pemerintah di tingkat birokrasi pemerintah daerah dengan masyarakat yang bersangkutan.
2. Terdapat sikap solidaritas yang tinggi dari masyarakat atas *good will* dan *political will* pemerintah.
3. Tertampungnya kepentingan-kepentingan dari masyarakat oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah.
4. Terdapat usaha-usaha motivasi dan simulasi yang dapat mendorong kreativitas masyarakat.

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Berdasarkan beberapa penelitian dikemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Hasnawati (1987) dalam Yuwono (2006), bahwa faktor tersebut berupa faktor intern (tingkat pendidikan, status sosial, jumlah tanggungan keluarga) dan faktor ekstern (pengaruh penguasa setempat dan insentif-insentif dari lembaga luar desa). Tarigan (1993) dalam Yuwono (2006) berargumentasi bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh: (1) penyuluhan, (2) keterlibatan dalam organisasi formal, (3) keterlibatan tokoh masyarakat, dan (4) perilaku tradisional. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat menurut Pangestu (1995) dalam Nugraha (2012) adalah:

1. Faktor internal, yaitu karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah beban keluarga, jumlah pendapatan, dan pengalaman berkelompok.
2. Faktor eksternal, hubungan yang terjalin antara pihak pengelola proyek dengan sasaran dapat mempengaruhi partisipasi karena sasaran akan dengan sukarela terlibat dalam suatu proyek jika sambutan pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka.

E.1 Karakteristik Individu

Sari (2016) menyebutkan bahwa karakteristik individu merupakan ciri kepribadian yang melekat pada diri setiap individu yang sudah ada sejak lahir, serta dipengaruhi juga oleh lingkungan. Thoha (1999) dalam Suprayitno (2011) menyatakan bahwa karakteristik individu merupakan salah satu faktor penting yang membentuk perilaku ketika berinteraksi dengan lingkungan. Menurut Pangewa (2004) dalam Tanjung (2016), karakteristik individu meliputi adalah: (1) umur, (2) jenis kelamin, (3) tingkat pendidikan, (4) pendapatan, dan (5) pekerjaan. Karakteristik individu anggota KTH yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: (1) umur, (2) tingkat pendidikan, (3) jenis kelamin, dan (4) proporsi pendapatan.

Umur seseorang menentukan kemampuannya dalam bekerja, merespon sesuatu, dan kemampuannya dalam belajar serta menyerap hal-hal baru (Tanjung, 2016). Padmowihardjo (1999) dalam Suprayitno (2011) menyatakan bahwa umur seseorang mencerminkan akumulasi pengalaman dan bentuk-bentuk proses belajar yang dilaluinya.

Tanjung (2016) menyatakan bahwa tingkat pendidikan memengaruhi kemampuan berpikir secara rasional dan analisis, selanjutnya pendidikan (formal maupun nonformal) dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Menurut Van Den Ban dan Hawkins (1999), pendidikan merupakan sarana untuk membentuk pendapat dan keberanian dalam pengambilan keputusan. Terkait pengelolaan hutan, tingkat pendidikan formal dan nonformal masyarakat pengelola hutan berhubungan dengan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam pengelola hutan (Siswiyanti dan Sugihen, 2006 dan Yanto, 2013 dalam Tanjung, 2016). Selain itu, penelitian Suprayitno (2011) menemukan dalam pengelolaan hutan kemiri, rendahnya tingkat pendidikan petani menyebabkan rendahnya kemampuan petani dalam mengadakan perubahan dan menyerap informasi yang menjadi penghambat bagi peningkatan produksi.

Faktor karakteristik individu selanjutnya yang akan diukur dalam penelitian ini adalah proporsi pendapatan keluarga yang diperoleh dari kelola usaha KTH. Suprayitno (2011) menyebutkan bahwa pendapatan keluarga adalah perolehan uang oleh kepala keluarga dan anggota keluarganya dari berbagai kegiatan yang dilakukan, baik dari kegiatan pengelolaan hutan dan dari luar usaha kehutanan.

Sahidu (1998) dalam Suprayitno (2011) mengemukakan bahwa pendapatan usaha tani merupakan faktor kuat yang mendorong timbulnya kemauan, kemampuan, serta kinerja partisipasi petani.

E.2 Peran Pendamping

Peranan merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban terkait dengan kedudukan seseorang yang selanjutnya mengatur perilaku orang tersebut. Peran dari pekerja pengembangan masyarakat yaitu sebagai: fasilitator, edukator, representatif, dan teknikal (Ife, 1995 dalam Suprayitno, 2011). Dalam pembangunan kehutanan yang berperan sebagai pendamping adalah penyuluh kehutanan. Sumardjo (2010) mengemukakan bahwa penyuluhan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas perilaku seseorang atau individu, yang meliputi peningkatan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik sehingga memiliki individualitas (*human capital*) yang siap mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakatnya. Sejalan dengan itu, petani didorong untuk mengembangkan kebebasan yang luas di dalam pengambilan keputusan (Van Den Ban dan Hawkins, 1999). Oleh karena itu, pendamping atau penyuluh kehutanan menjadi salah satu ujung tombak pembangunan kehutanan yang berperan penting dalam meningkatkan kapasitas masyarakat.

Penyuluh dapat menggunakan berbagai variasi teknik fasilitasi untuk mengefektifkan, mempercepat dan memperlancar jalannya proses atau kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh petani di sekitar hutan. Dalam penelitiannya Suprayitno (2011) menegaskan bahwa dalam pengelolaan hutan kemiri kemampuan petani yang belum optimal sangat dipengaruhi oleh rendahnya intensitas peran penyuluh kehutanan, baik peran sebagai fasilitator maupun sebagai pendidik.

Beberapa peran pendidik meliputi membangkitkan kesadaran, melatih atau membimbing, memberikan tantangan, serta menyediakan dan menyampaikan informasi (Ife, 1995 dalam Suprayitno, 2011). Intensitas peran penyuluh kehutanan akan meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola hutan kemiri (Suprayitno, 2011). Awang (2004) membuktikan dalam penelitiannya bahwa salah satu unsur keberhasilan pengelolaan hutan oleh masyarakat sekitar hutan

adalah adanya bimbingan teknis bagi petani tersebut. Tanjung (2016) mengakui bahwa terjadi peningkatan partisipasi petani yang berpengaruh terhadap kapasitas petani karena adanya dukungan penyuluhan pertanian secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan ini dilakukan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengorganisasian, pematapan dan penguatan terhadap petani dan kelembagaan kelompok petani.

Advokasi merupakan salah satu bentuk peran pekerja pengembang masyarakat untuk menyuarakan atau menyampaikan kepentingan atau hak-hak masyarakat, karena mereka belum memiliki kemampuan dan/atau kekuatan untuk menyuarakannya sendiri (Ife, 1995) dalam Suprayitno, (2011). Advokasi merupakan metode yang ampuh untuk mempengaruhi pendapat publik atau orang lain, dan diharapkan juga dapat mengubah perilaku yang kurang menguntungkan. Dalam advokasi, pendamping dapat membela, memberi saran, memberi pertimbangan, memberi pemahaman kepada masyarakat dan pemerintah, terkait dengan masalah pengelolaan hutan dengan penekanan keberpihakan pada kelompok yang dirugikan. Pada intinya, upaya advokasi yang dilakukan penyuluh kehutanan dapat mempengaruhi pengambil kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat, mengakui dan melindungi hak masyarakat dengan tidak mengabaikan kepentingan yang lebih besar (Suprayitno, 2011).

E.3 Aspek Dukungan

Dukungan pemerintah merupakan hal penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat pembukaan UUD 1945. Dukungan tersebut dapat berupa peraturan, kebijakan, bantuan, dan pendampingan pada kelompok masyarakat atau masyarakat. Dalam penelitian Alfandi (2019), keterlibatan pemerintah ini dapat dianalisis menggunakan teori Arnstein (1969) yaitu sebagai fasilitator dalam bentuk dana dan program, kegiatan, partisipasi informasi dan saran, serta pengambilan keputusan.

Terkait peraturan, Dipokusumo (2011) mengatakan bahwa pola perhutanan sosial patrisipatif didorong oleh terbitnya kebijakan pemerintah (nasional atau daerah) yang melibatkan masyarakat melalui kelompok masyarakat ataupun

kelembagaan seperti koperasi. Hal itu dibuktikan juga dalam penelitian Zulevi (2017) bahwa kebijakan perhutanan sosial telah meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan hutan nagari khususnya di Jorong Simancuang.

Kebijakan pemerintah mengalami perubahan sebagai perbaikan untuk konsistensi antara maksud dan tujuan pelibatan masyarakat serta hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan serta implementasinya. Hal ini diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 tahun 2016 tentang *Perhutanan Sosial*. Kebijakan ini mendapat respon yang berbeda dari pemerintahan provinsi dan kabupaten berkaitan dengan kepentingan dan spirit dalam pembangunan kebijakan tersebut. Kebijakan otonomi daerah misalnya dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam membangun kebijakan pembangunan kehutanan berbasis masyarakat di daerah.

Di Provinsi Sumatera Barat, kebijakan perhutanan sosial diikuti dengan terbitnya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Perhutanan Sosial. Dalam peraturan ini terdapat peran pemerintah daerah melalui berbagai satuan kerja terkait dalam memfasilitasi pengembangan usaha seperti modal, pendampingan, pelatihan, serta mengatur integrasi dan sinkronisasi para pihak untuk mendukung program dan kegiatan Perhutanan Sosial.

Dalam penelitiannya Zulevi (2017) mengakui bahwa Kebijakan Perhutanan Sosial telah membuka ruang akses warga Jorong Simancuang untuk melindungi dan mengelola Hutan Lindung Simancuang sebagai penunjang kehidupan mereka. Akan tetapi kebijakan tersebut juga dapat menciptakan konflik kewenangan antar pemerintahan provinsi, kabupaten, dan *stakeholders* lainnya. Pihak-pihak tersebut bersaing dalam pemanfaatan hutan dengan dalih juga menjaga kelestarian hutan dan ancaman terhadap kondisi sumberdaya hutan yang berbeda.

Keberadaan *stakeholders* juga dapat mendampingi kelompok masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan hidup dalam bentuk bantuan dan pendampingan peningkatan kapasitas pada kegiatan KTH. Hal ini didukung beberapa penelitian misalnya *stakeholder* kunci dan *stakeholder* utama lebih berperan sebagai eksekusi dan koordinasi dalam kegiatan pengembangan hutan

rakyat (Fauziyah, 2014). Terkait peran tokoh masyarakat, Suprayitno (2011) berkeyakinan bahwa tokoh masyarakat adalah figur yang dihargai dan menjadi panutan serta dituruti oleh masyarakat, namun cenderung adanya usaha kooptasi oleh pemerintah terhadap tokoh masyarakat agar mau mengajak warganya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan fisik pengelolaan tanaman yang berada dalam kawasan hutan.

Dipokusumo (2011) mengemukakan bahwa kehadiran LSM dalam pembangunan kehutanan berbasis masyarakat merupakan keharusan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat karena dapat mendampingi masyarakat dalam berbagai kegiatan KTH. Pada penelitian ini, *stakeholders* dan peranannya dalam Kegiatan KTH dijabarkan pada Tabel 2.

Tabel 2. *Stakeholders* dan peranannya dalam kegiatan KTH.

No	Stakeholder	Peran	Keterangan
1	Pemerintah		
	KLHK	Pembuat kebijakan, NSPK, monitoring, evaluasi, pembina dan pengendalian program pembangunan kehutanan di tingkat nasional	Mitra dalam tahap pelaksana pekerjaan Penyedia bibit dan alat
	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Pembuat kebijakan, pendamping monitoring, evaluasi, peminadan pengendalian program pembangunan kehutanan di tingkat provinsi serta bersinergi dengan dinas terkait	
	KPHL Bukit Barisan	Unit pelaksana, pendamping masyarakat, monitoring, evaluasi, pembina dan pengendalian program pembangunan kehutanan	Pendamping merupakan Penyuluh Kehutanan ASN
	Kecamatan Pauh	Mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat program pembangunan	
	Kelurahan Limau Manis	Mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,	

	Selatan/Kelurahan Lambung Bukit	kepentingan masyarakat program pembangunan kehutanan tingkat kelurahan	
2	Swasta: PT Semen Padang	Berkontribusi dalam perlindungan hutan melalui dana CSR	KTH Sikayan Balumuik
3	KTH Sikayan Balumuik dan KTH Padang Jariah		Pelaku utama dan penerima manfaat utama dan dampak dari adanya program dan kegiatan KTH

Sumber: Data diolah, 2021

Kepastian pasar merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong keberlanjutan kelola usaha KTH. Namun beberapa penelitian menemukan bahwa pasar tidak mendukung dalam kegiatan KTH. Penelitian Supriyanto (2011) membuktikan bahwa dalam pemasaran kemiri, petani memiliki posisi tawar yang lebih rendah karena ketersediaan sumberdaya yang terbatas, tidak adanya bentuk usaha bersama, dan tidak menguasai informasi pasar.

E.4 Tingkat Partisipasi Anggota KTH dalam Kegiatan KTH

Menurut Soetrisno (1995) dalam Lestari (2014), partisipasi merupakan kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat menurut Bhattacharya dan Basnyat (2003) dalam Utama (2010) harus difokuskan kepada kegiatan kehutanan mulai dari perencanaan, penerapan, monitoring dan evaluasi dengan pembagian hasil yang adil sehingga tercapai pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

Perencanaan merupakan langkah awal yang penting bagi keberhasilan suatu kegiatan, dalam hal ini adalah kegiatan KTH. Perencanaan yang baik dan sistematis dapat memberikan arah dan menjadi pedoman bagi berlangsungnya suatu kegiatan. Partisipasi dalam kegiatan perencanaan mencakup keikutsertaan seluruh anggota masyarakat pengelola hutan dalam merencanakan.

Rahmi *etal.* (2003) dalam Dipokusumo (2017) menguraikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam yaitu: merumuskan persoalan dan alternatif penyelesaian masalah; memperoleh informasi dan pemahaman di luar jangkauan ilmiah; serta membentuk perasaan memiliki terhadap rencana, penyelesaian dan memudahkan penerapannya. Merujuk pada Zulevi (2017), bentuk partisipasi anggota KTH dalam perencanaan kegiatan KTH adalah melalui hadir dalam rapat perencanaan, ikut serta dalam pengambilan keputusan, memberikan saran, dan terlibat dalam menentukan manfaat kegiatan.

F. Penelitian Terdahulu

Studi terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan bersama masyarakat dengan berbagai program telah banyak dilakukan di Indonesia. Dari hasil studi tersebut terdapat berbagai keberhasilan ataupun kegagalan dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Penelitian-penelitian yang mengkaji tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan telah beberapa kali dilakukan dengan lokus, fokus dan permasalahan yang berbeda. Sepanjang peneliti ketahui, belum ada penelitian yang menganalisis partisipasi anggota KTH yang fokus pada kegiatan KTH, khususnya dalam melaksanakan Perhutanan Sosial. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

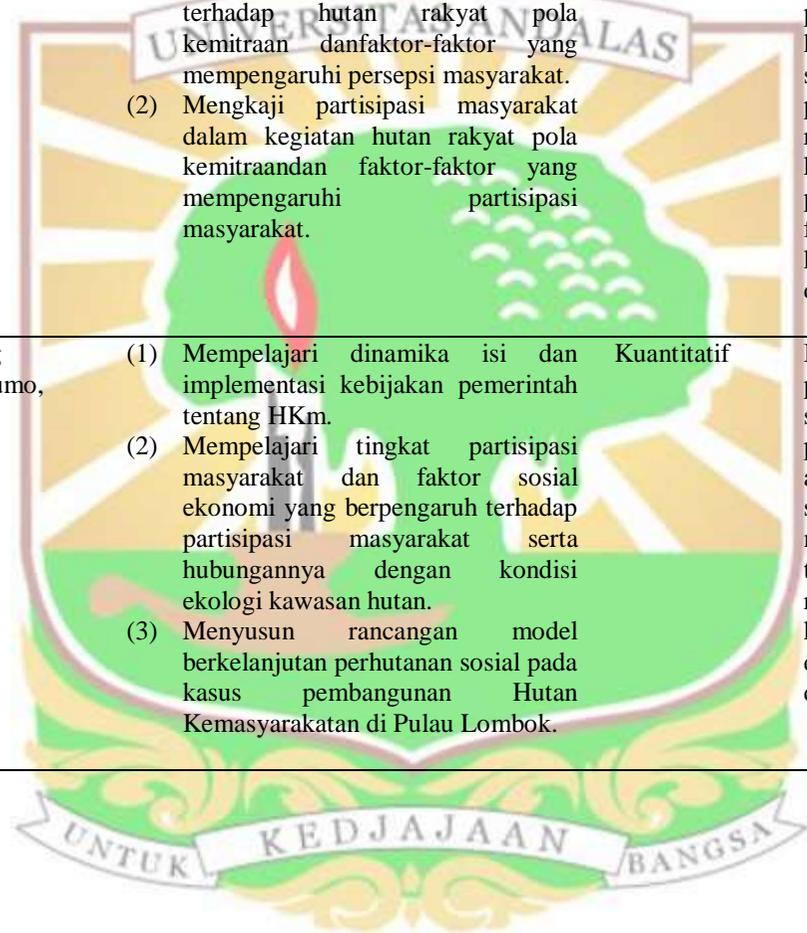
Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung keaslian penelitian ini diuraikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Penelitian Terdahulu.

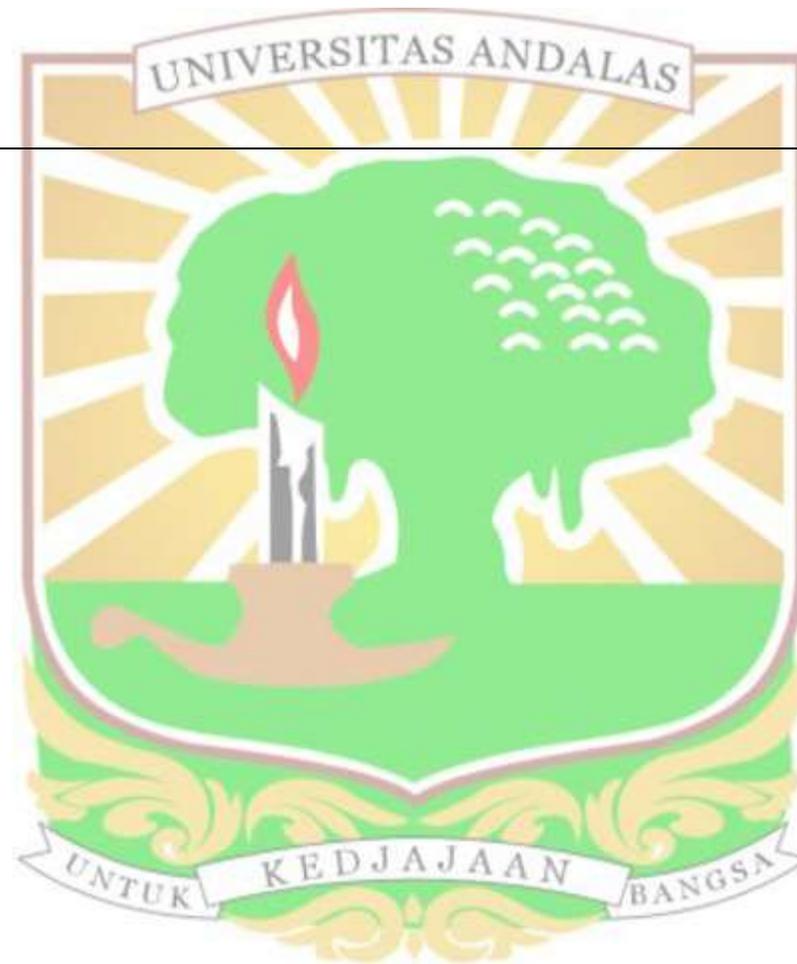
NO	JUDUL	PENULIS/ TAHUN	TUJUAN	METODE	HASIL
1	Partisipasi Petani dalam Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Petani (Kasus di Provinsi Jawa Tengah). (Tesis)	Sapja Anantayu, 2009	<ol style="list-style-type: none"> (1) Mendeskripsikan tingkat partisipasi petani dalam kelembagaan kelompok petani dan tingkat kapasitas kelembagaan kelompok petani dalam mengelola sumberdaya pertanian secara kolektif. (2) Menjelaskan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi anggota dalam kelembagaan kelompok petani. (3) Menjelaskan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kapasitas kelembagaan kelompok petani. (4) Merumuskan strategi penyuluhan yang sesuai untuk meningkatkan daya saing petani melalui kapasitas kelembagaan kelompok petani dalam mengelola sumberdaya pertanian secara berkelanjutan. 	Kuantitatif	<p>Tingkat partisipasi petani dalam kelembagaan kelompok petani rendah, dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan formal, pendapatan petani, tingkat partisipasi sosial petani, tingkat kebutuhan petani, dan dukungan penyuluhan. Rendahnya aspek-aspek tingkat kesadaran atas kebutuhan riil, tingkat kepemimpinan lokal, intensitas peran pihak luar, dan dukungan penyuluhan, berpengaruh pada rendahnya kedinamisan kelompok sebagai wahana pembelajaran.</p> <p>Selanjutnya, rendahnya tingkat pendidikan non-formal, pengalaman berusahatani, pengalaman belajar, tingkat kepemimpinan lokal, dan dukungan penyuluhan berpengaruh terhadap rendahnya kapasitas petani.</p>
2	Model Peningkatan Partisipasi Petani Sekitar Hutan dalam Mengelola Hutan Kemiri Rakyat (Kasus Pengelolaan Hutan Kemiri Kawasan Pegunungan Bulusaraung Kabupaten	Adi Riyanto Suprayitno, 2011	<ol style="list-style-type: none"> (1) Menganalisis faktor-faktor penentu peningkatan partisipasi petani sekitar hutan dalam mengelola hutan kemiri rakyat Kabupaten Maros. (2) Menganalisis dampak partisipasi petani sekitar hutan dalam mengelola hutan kemiri rakyat terhadap keberlanjutan manfaat/fungsi hutan kemiri rakyat Kabupaten Maros. 	Kuantitatif	<p>Tingkat partisipasi petani sekitar hutan dalam pengelolaan hutan kemiri tergolong rendah pada tahap melaksanakan kegiatan dan memanfaatkan hasil hutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah tingkat kemampuan petani dan intensitas peran penyuluh kehutanan (fasilitator dan pendidik). Belum optimalnya tingkat motivasi petani sekitar hutan dipengaruhi oleh rendahnya...</p>

	Maros Provinsi Sulawesi Selatan). (Disertasi)		(3) Merumuskan model efektif dalam upaya meningkatkan partisipasi petani sekitar hutan dalam mengelola hutan kemiri rakyat Kabupaten Maros.		ketersediaan kesempatan terutama dukungan pemerintah.
3	Partisipasi dan Persepsi Masyarakat dalam Pengembangan Hutan Tanaman Industri Pola Kemitraan PT Nityasa Idola Provinsi Kalimantan Barat. (Tesis).	Cindera Syaiful Nugraha, 2012	Mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi dan persepsi masyarakat terhadap hutan tanaman pola kemitraan, serta mengetahui hubungan partisipasi masyarakat terhadap persepsi masyarakat dalam kegiatan hutan tanaman pola kemitraan	Kuantitatif	Partisipasi masyarakat dalam pengembangan hutan tanaman pola kemitraan yang dilaksanakan PT Nityasa Idola termasuk pada kategori sedang, sedangkan persepsi masyarakat termasuk pada kategori tinggi. Hubungan antara persepsi dan partisipasi tidak nyata. Hal ini disebabkan karena adanya variabel lain yang mempengaruhinya, yaitu luas lahan yang dimitrakan, umur, dan mata pencaharian.
4	Komunikasi Partisipatif dalam Pengelolaan Hutan Nagari di Sumatera Barat. (Tesis).	Nala Sari Tanjung, 2016	Mendeskripsikan proses komunikasi partisipatif dalam pengelolaan Hutan Nagari, mendeskripsikan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Nagari, dan menganalisis hubungan komunikasi partisipatif dengan pengelolaan Hutan Nagari secara berkelanjutan.	Kuantitatif	Proses komunikasi dalam pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh dan Hutan Nagari Paru secara umum sudah berlangsung partisipatif. Anggota masyarakat pengelola hutan di Sungai Buluh terutama kurang dilibatkan pada aktivitas penetapan batas areal kerja dan monitoring evaluasi, sedangkan anggota masyarakat pengelola hutan di Paru kurang terlibat pada aktivitas perencanaan, penetapan batas areal kerja, pelaksanaan kegiatan, dan monitoring dan evaluasi. Di LPHN Sungai Buluh, pengelolaan Hutan Nagari secara berkelanjutan paling dominan berhubungan dengan tingkat partisipasi dalam pengelolaan Hutan Nagari. Di LPHN Paru, pengelolaan Hutan Nagari paling dominan berhubungan dengan tingkat dukungan dari pemerintah dan tokoh nagari, serta komunikasi partisipatif.

5	Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. (Thesis)	Setyo Yuwono, 2016	<ol style="list-style-type: none"> (1) Mengkaji persepsi masyarakat terhadap hutan rakyat pola kemitraan dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat. (2) Mengkaji partisipasi masyarakat dalam kegiatan hutan rakyat pola kemitraan dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. 	Kuantitatif	Partisipasi masyarakat pada kegiatan pembangunan hutan rakyat dengan pola kemitraan pada kategori sedang, terjalin pada semua kegiatan, yang meliputi kegiatan perencanaan, aktivitas kelompok tani hutan rakyat, pelaksanaan kegiatan hutan rakyat dan kegiatan pengamanan, evaluasi dan pemanfaatan hasil hutan rakyat. Faktor-faktor yang berpengaruh nyata adalah: kelembagaan, hak dan kewajiban, aktivitas, dan kebijakan pemerintah.
6	Model Partisipatif Perhutanan Sosial menuju Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Kasus Pembangunan Hutan Kemasyarakatan pada Kawasan Hutan Lindung di Pulau Lombok). (Disertasi)	Bambang Dipokusumo, 2017	<ol style="list-style-type: none"> (1) Mempelajari dinamika isi dan implementasi kebijakan pemerintah tentang HKm. (2) Mempelajari tingkat partisipasi masyarakat dan faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat serta hubungannya dengan kondisi ekologi kawasan hutan. (3) Menyusun rancangan model berkelanjutan perhutanan sosial pada kasus pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Pulau Lombok. 	Kuantitatif	Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan HKm pada tingkatan sedang, sebagian besar tidak aktif dalam program perencanaan dan monitoring/evaluasi, tetapi aktif dalam program implementasi. Faktor sosial ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi tingkat partisipasi yaitu tingkat usia, tingkat pendidikan, ukuran rumah tangga, persepsi, kepemimpinan kelompok, pendapatan HKm, luas lahan dikelola, jarak rumah dengan kawasan HKm dan sejarah aktivitas ekonomi pengelola.



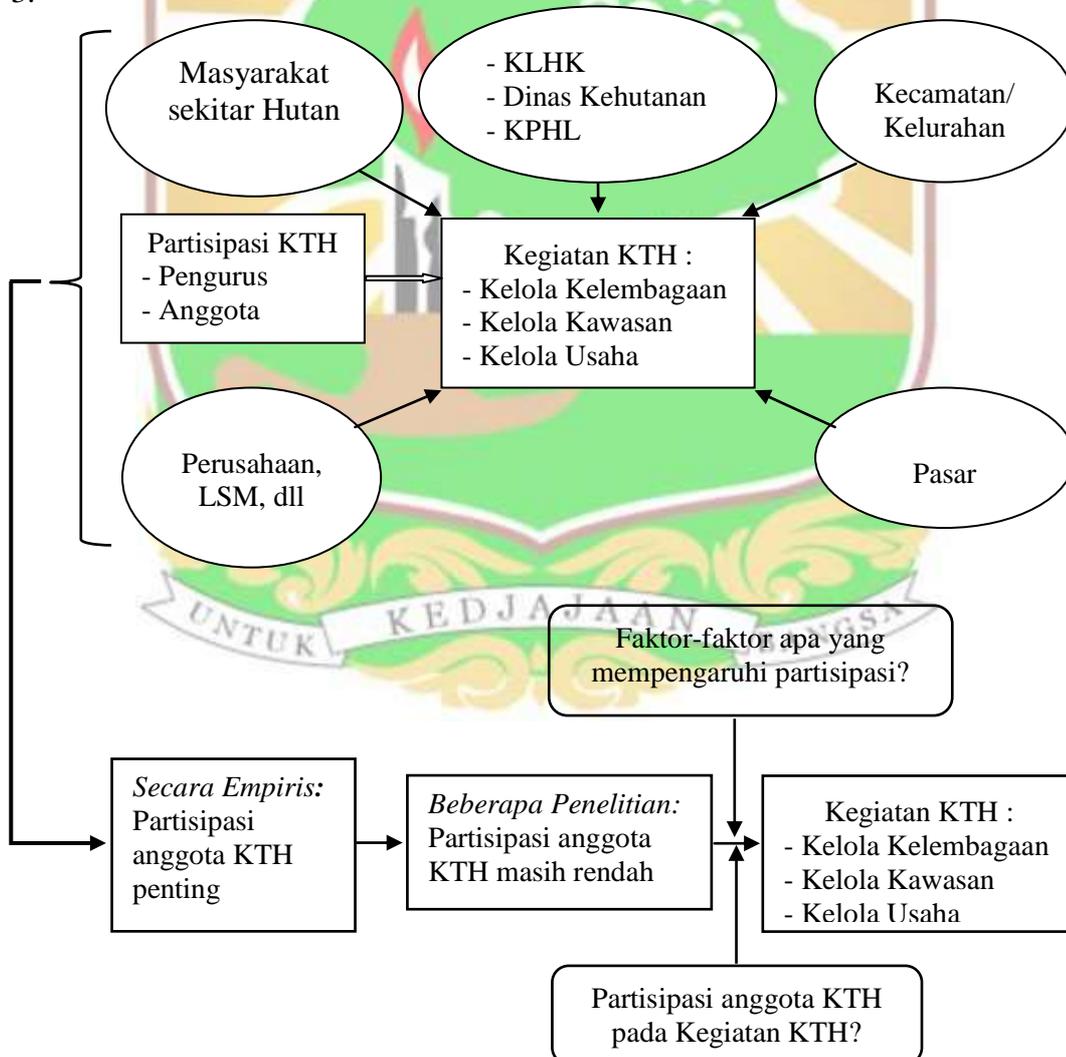
7	Pengaruh Partisipasi dalam Pengelolaan Hutan Nagari Simancuang terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. (Skripsi)	Xezly Fegis Zulevi, 2017	(1) Menganalisis pengaruh kebijakan akses dan program pengelolaan Hutan Nagari terhadap partisipasi warga Nagari Alam Pauh Duo dalam pengelolaan hutan. (2) Menganalisis pengaruh partisipasi warga Jorong Simancuang,	Kuantitatif	Kebijakan Perhutanan Sosial telah meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan hutan nagari Jorong Simancuang. Tingkat partisipasi tinggi (tahapan pemanfaatan hasil) dan rendah (pemantauan dan evaluasi kegiatan).
8	Tingkat pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove di Desa Maccini Baji, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar. (Skripsi)	Abdul asir S, 2018	(1) Mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove. (2) Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove.	Kuantitatif	Tingkat partisipasi masyarakat tentang pelestarian hutan mangrove termasuk kategori sedang karena muncul kesadaran. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang hutan mangrove dan pelestariannya masuk kategori tinggi karena responden sudah mengenyam pendidikan, hadir saat penyuluhan, ada kesadaran, dan mengambil bagian dalam pelatihan dan pembinaan.
9	Analisis Partisipasi Anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) pada Kegiatan KTH di Kota Padang. (Tesis)	Mekar Sari Eka Putri, 2021	(1) Menganalisis partisipasi anggota KTH di KTH Sikayan Balumuik, KTH Padang Jariah, dan Kota Padang. (2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi anggota KTH dalam kegiatan KTH di KTH Sikayan Balumuik, KTH Padang Jariah, dan Kota Padang	Kuantitatif	1. Tingkat partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH di Kota Padang tergolong tinggi yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan formal, dukungan pemerintah, dukungan <i>stakeholders</i> lainnya, dan dukungan pasar. 2. Tingkat partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH Sikayan Balumuik tergolong tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah tingkat pendidikan formal, peran pendamping sebagai advokator, dan dukungan pasar. 3. Selanjutnya tingkat partisipasi anggota



KTH pada kegiatan KTH Padang Janiah dalam kategori rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah dukungan pemerintah dan dukungan pasar.

G. Kerangka Pikir Penelitian

Pembangunan kehutanan perlu melibatkan partisipasi masyarakat dan *stakeholders* lainnya agar tercapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga keseimbangan lingkungan. Sesuai pernyataan Slamet (2003), partisipasi masyarakat merupakan hal utama di setiap pembangunan nasional karena merupakan penentu keberhasilan pembangunan. Namun dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan masih tergolong rendah (Suprayitno, 2011). Merujuk pada beberapa permasalahan di atas, maka perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai tingkat partisipasi anggota KTH dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota KTH dalam kegiatan KTH yang digambarkan sesuai Gambar 3.



Gambar 3. Fokus skema partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH.

Sesuai pokok penelitian tentang analisis partisipasi anggota KTH pada Kegiatan KTH di Kota Padang, maka peneliti memilih konsep partisipasi dari Tanjung (2016) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan diantaranya adalah karakteristik individu (umur, tingkat pendidikan formal, jenis kelamin, jenis pekerjaan dan proporsi pendapatan berasal dari hutan). Tingkat partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH ditinjau dari tahap merencanakan, melaksanakan, memanfaatkan hasil, dan mengevaluasi kegiatan, berpedoman pada penelitian Suprayitno (2011).

Pemilihan konsep partisipasi di atas dilakukan karena peneliti menduga bahwa terdapat variabel-variabel yang mempengaruhi partisipasi anggota KTH pada Kegiatan KTH di Kota Padang. Selanjutnya, peneliti menganalisis hubungan beberapa variabel untuk membuktikan hipotesis dan konsep tersebut serta menjawab tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH di Kota Padang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hubungan antar variabel divisualisasikan dalam kerangka konseptual pada Gambar 4.



Gambar 4. Kerangka Pikir Penelitian

H. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir penelitian pada Gambar 4, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

- a. Terdapat hubungan nyata antara karakteristik individu dengan tingkat partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH.
- b. Terdapat hubungan nyata antara peran pendamping dengan tingkat partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH.
- c. Terdapat hubungan nyata antara aspek dukungan dengan tingkat partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pauh, Kota Padang tepatnya di Kelurahan Limau Manis Selatan dan Kelurahan Batu Busuk. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan mempertimbangkan bahwa lokasi Perhutanan Sosial dengan skema HKm ini merupakan hutan lindung yang mempunyai fungsi sangat penting bagi wilayah Kota Padang yaitu sebagai pengatur tata air, pencegah banjir, pengendali erosi, dan untuk memelihara kesuburan tanah.

Penelitian ini dimulai dengan penyusunan proposal, pengambilan data di lapangan, pengolahan dan analisis data, penulisan draft tesis, sidang tesis, dan perbaikan tesis. Penyusunan proposal mulai dilakukan pada bulan Januari 2021. Penelitian di lapang dilakukan dari minggu pertama bulan September 2021 hingga minggu keempat bulan Oktober 2021. Sidang hasil tesis dilaksanakan pada minggu terakhir bulan Juli 2022 dan dilanjutkan dengan perbaikan tesis selama seminggu.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *explanatory* (survei) yang menjelaskan atas suatu fenomena dengan menganalisis hubungan antar variabel untuk menguji teori atau hipotesis yang digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei yang dilakukan dengan pemberian kuesioner terstruktur kepada responden dan wawancara mendalam kepada beberapa informan. Selain memperoleh data primer, data sekunder juga dikumpulkan seperti data publikasi BPS, jurnal-jurnal penelitian terdahulu, dan juga buku rujukan. Adapun penjelasan tentang teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

- a. *Observation* (pengamatan), yaitu data dikumpulkan dengan mempelajari dan mencatat langsung fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.

- b. *Questioner* (kuesioner), yaitu sejumlah pertanyaan tertutup dan terbuka untuk mengukur variabel penelitian yang ditujukan bagi responden.
- c. *Interview* (wawancara), yaitu melakukan tanya jawab secara lisan dan langsung kepada responden penelitian dan informan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Informan dipilih secara purposif dengan alasan mereka diduga dapat memberikan keterangan yang lebih mendalam mengenai data penelitian.

Selanjutnya untuk memperoleh data yang diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian perlu dibangun suatu desain penelitian yang pada intinya berisi variabel dan tolok ukur. Secara sistematis desain penelitian disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Sistematis desain penelitian

Tujuan Penelitian	Konsep	Metode Pengumpulan Data	Responden dan Jumlah Sampel
Menganalisa partisipasi anggota KTH Sikayan Balumuik dan KTH Padang Janiah	Tingkat partisipasi (Suprayitno, 2011)	Observasi, Kuisisioner, dan Wawancara	Anggota KTH Sikayan Balumuik: 56 orang Anggota KTH Padang Janiah: 22 orang Informan: Ketua dan Pengurus KTH: 2 orang
Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pada kegiatan KTH	Faktor-faktor partisipasi (Tanjung, 2016)		Kepala Seksi Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat: 1 orang Kepala KPHL Bukit Barisan: 1 orang Penyuluh Kehutanan: 1 orang

Sumber: Data Diolah, 2021

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah tertentu dan memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri dan karakteristik tertentu yang akan diteliti (Riduwan, 2005). Populasi pada penelitian ini adalah untuk KTH Sikayan Balumuik sebanyak 68 orang dan KTH Padang Janiah sebanyak 27 orang. Oleh karena itu untuk jumlah populasi di Kota Padang sebanyak 95 orang.

Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara acak sederhana (*Simple Random Sampling*). Cara ini dilakukan karena populasinya homogen, dimana seluruh anggota KTH mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Ukuran sampel dihitung dengan rumus (Syahni, 2019):

$$n = (NZ^2S^2) / (NG^2 + Z^2S^2)$$

Keterangan;

G : Toleransi penyimpangan

S : Simpangan baku

N : Ukuran populasi

n : jumlah sampel

Z : Tingkat Keyakinan 97%

Berdasarkan survei prapenelitian yang dilakukan diperoleh; $G=0,1$, $S=0,9$, dengan $Z=2,17$ sehingga diperoleh jumlah sampel anggota KTH Sikayan Balumuik sebanyak 58 orang. Untuk KTH Padang Janiah diperoleh; $G=0,07$, $S=0,35$, dengan $Z=2,17$ sehingga diperoleh jumlah sampel anggota KTH Padang Janiah sebanyak 23 orang. Oleh karena itu untuk jumlah sampel anggota KTH di Kota Padang sebanyak 81 orang.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan dalam penelitian, dimana menentukan kualitas data dalam penelitian. Instrumen pada penelitian ini adalah kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan variabel-variabel dalam penelitian, dan disebarkan langsung kepada responden. Adapun variabel-variabel yang terdapat dalam kuisisioner adalah:

- a. Karakteristik individu terdiri atas: umur (X1), tingkat pendidikan formal (X2), jenis kelamin (X3), dan proporsi pendapatan keluarga (X4).
- b. Aspek dukungan terdiri atas: dukungan pemerintah (X5), dukungan *stakeholders* lainnya (X6), dan dukungan pasar (X7).
- c. Peran pendamping terdiri atas: Fasilitator (X8), Edukator (X9), dan Advokator (X10).
- d. Partisipasi anggota KTH dalam Kegiatan KTH (Y) ditinjau pada kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha.

E. Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2017) variabel penelitian merupakan atribut atau nilai atau sifat suatu obyek/orang/fenomena yang memiliki variasi yang dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk mempelajari berbagai obyek/orang/fenomena tersebut sehingga diperoleh informasi yang mendalam yang kemudian ditarik kesimpulan. Variabel penelitian menjadi acuan dalam menentukan metode/teknik analisis yang dibutuhkan.

Untuk mendapatkan batasan yang jelas dan memudahkan dalam menentukan indikator pengukuran, diberikan definisi operasional untuk variabel-variabel dalam penelitian. Definisi operasional merupakan pengertian peubah-peubah yang digunakan di dalam penelitian, untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data dan memudahkan pembaca dalam menginterpretasikan serta memahami peubah yang digunakan dalam penelitian (Tanjung, 2016).

Menurut Suprayitno (2011) untuk kepentingan pengujian secara statistik, perlu dilakukan transformasi agar semua data yang terkumpul memiliki kisaran yang sama. Pedoman transformasi dapat dilakukan dengan menentukan nilai indeks terkecil diberikan untuk jumlah skor terendah, dan nilai indeks terbesar diberikan untuk jumlah skor tertinggi dari tiap indikator. Skor yang diperoleh dengan menggunakan skala Likert biasanya dipertimbangkan sebagai data interval walaupun pada dasarnya adalah ordinal. Penjelasan definisi operasional pada masing-masing peubah dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

Karakteristik Individu

Karakteristik individu adalah ciri kepribadian yang melekat pada diri responden (anggota KTH) yang sudah ada sejak lahir dan juga dikarenakan faktor tempatnya tumbuh dan berkembang. Karakteristik individu untuk penelitian ini terdapat pada Tabel 5.

Tabel 5. Indikator, definisi, dan skala pengukuran karakteristik individu

Indikator	Definisi	Parameter	Skala Pengukuran
Umur (X1)	Lama waktu hidup yang telah dilalui responden	Dihitung mulai dari tahun kelahiran dan dibulatkan ke ulang tahun terdekat pada saat penelitian dilakukan	tahun
Tingkat Pendidikan Formal (X2)	Jenjang sekolah yang diikuti responden secara formal sampai selesai	Dihitung berdasarkan jumlah tahun jenjang sekolah yang diikuti responden secara formal sampai selesai	tahun
Jenis Kelamin (X3)	Perbedaan status biologis responden	Dihitung berdasarkan status biologis responden	Dummy: (0)Perempuan (1)Laki-laki
Proporsi pendapatan dari Kegiatan KTH(X4)	Persentase penghasilan responden yang diperoleh dari kelola Usaha KTH terhadap total pendapatannya per bulan.	Diukur berdasarkan persentase penghasilan responden yang diperoleh dari kelola Usaha KTH terhadap total pendapatannya per bulan.	Persen

Peran Pendamping

Peran pendamping merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendamping atau penyuluh kehutanan dalam membantu (fasilitator), mendidik (edukator), dan

menasehati (advokator) responden dalam pencapaian tujuan Perhutanan Sosial. Indikator Peran Pendamping ini tertera pada Tabel 6.

Tabel 6. Indikator, definisi, parameter, dan skala pengukuran Peran Pendamping

Indikator	Definisi	Parameter	Skala Pengukuran
Fasilitator (X5)	Kegiatan penyuluh untuk membantu responden dalam kegiatan KTH	Diukur berdasarkan skor penilaian responden terhadap intensitas kegiatan penyuluh dalam memfasilitasi kegiatan KTH	Jumlah skor penilaian
Edukator (X6)	Kegiatan penyuluh untuk membangun kesadaran, memberikan informasi, melatih responden terkait kegiatan KTH	Diukur berdasarkan skor penilaian responden terhadap intensitas kegiatan penyuluh untuk mengedukasi responden dalam melaksanakan kegiatan KTH	Jumlah skor penilaian
Advokat (X7)	Kegiatan penyuluh untuk memberikan nasehat kepada responden dan <i>stakeholders</i> lainnya dalam menjembatani kepentingan KTH <i>stakeholders</i> lainnya terkait kegiatan KTH	Diukur berdasarkan skor penilaian responden terhadap intensitas kegiatan penyuluh untuk memberi nasehat kepada responden dan <i>stakeholders</i> lainnya dalam menjembatani kepentingan KTH <i>stakeholders</i> lainnya terkait Kegiatan KTH	Jumlah skor penilaian

Aspek Dukungan

Aspek dukungan merupakan berbagai jenis bantuan dan dukungan melalui peraturan, kebijakan, modal, sarana prasarana, pelatihan, dan pendampingan dalam mencapai tujuan Kegiatan KTH. Indikator aspek dukungan dapat dilihat pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7. Indikator, definisi, parameter dan skala pengukuran aspek dukungan

Indikator	Definisi	Parameter	Skala Pengukuran
Dukungan pemerintah (X8)	Sejauh mana pemerintah memberikan akses dan dukungan dalam kegiatan KTH melalui kebijakan atau peraturan, modal, peralatan, peningkatan kapasitas, dan pendampingan	Diukur berdasarkan skor pengetahuan responden tentang sejauh mana pemerintah memberikan akses dan dukungan dalam kegiatan KTH melalui kebijakan atau peraturan, modal, peralatan, peningkatan kapasitas, dan pendampingan	Jumlah skor pengetahuan
Dukungan <i>stakeholders</i> lainnya (X9)	Sejauh mana <i>stakeholders</i> lainnya memberikan akses dan dukungan dalam kegiatan KTH melalui modal, peralatan, peningkatan kapasitas, dan pendampingan	Diukur berdasarkan skor pengetahuan responden tentang sejauh mana <i>stakeholders</i> lainnya memberikan akses dan dukungan dalam Kegiatan KTH melalui modal, peralatan, peningkatan kapasitas, dan pendampingan	Jumlah skor pengetahuan
Dukungan pasar (X10)	Sejauh mana pasar dapat memberikan jaminan pemasaran atas produksi agroforestri dan dijual dengan harga yang layak	Diukur berdasarkan skor pengetahuan responden tentang sejauh mana pasar dapat memberikan jaminan pemasaran atas produksi agroforestri dan dijual dengan harga yang layak	Jumlah skor pengetahuan

Peubah Tingkat Partisipasi Anggota KTH dalam Kegiatan KTH

Tingkat partisipasi dalam Kegiatan KTH merupakan keikutsertaan anggota KTH mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi kegiatan KTH. Indikator tingkat partisipasi secara rinci dijelaskan pada Tabel 8.

Tabel 8. Indikator, definisi, parameter, dan skala pengukuran tingkat partisipasi pada kegiatan KTH

Indikator	Definisi	Parameter	Skala Pengukuran
Merencanakan Kegiatan KTH (Y ₁)	Intensitas keterlibatan responden dalam merencanakan kegiatan KTH	Diukur berdasarkan nilai kehadiran dan pemikiran responden terhadap perencanaan kegiatan KTH	Jumlah nilai Partisipasi
Melaksanakan Kegiatan KTH (Y ₂)	Intensitas keterlibatan responden dalam melaksanakan kegiatan KTH meliputi agroforestri dan perlindungan hutan	Diukur berdasarkan nilai aktivitas responden terhadap pelaksanaan kegiatan KTH	Jumlah skor Partisipasi
Memanfaatkan hasil Kegiatan pengelolaan hutan (Y ₃)	Seberapa jauh responden menikmati dan memanfaatkan hasil dari kegiatan KTH	Diukur berdasarkan nilai aktivitas responden terhadap pemanfaatan hasil kegiatan	Jumlah skor Partisipasi
Mengevaluasi Kegiatan KTH (Y ₄)	Intensitas keterlibatan responden dalam melakukan evaluasi dan penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas kegiatan KTH	Diukur berdasarkan nilai kehadiran dan aktivitas responden terhadap evaluasi dan penilaian kegiatan KTH	Jumlah skor Partisipasi

F. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui observasi, kuesioner dan wawancara. Data sekunder merupakan data mengenai monografi wilayah, dokumen nagari dan KTH yang sudah tersedia dari nagari, kecamatan, dan lembaga/dinas terkait.



Gambar 5. Wawancara dengan Ketua KTH Sikayan Balumuik



Gambar 6. Wawancara dengan Ketua KTH Padang Janiah

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2021

G. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh dianalisis dengan tahapan sebagai berikut: (1) Tabulasi data observasi dan hasil wawancara kemudian disajikan dalam bentuk tabel, gambar dan diagram, (2) Sinkronisasi data hasil wawancara terhadap responden yang berupa catatan dan dokumentasi serta observasi, (3) Melakukan reduksi data yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian, (4) Menyajikan data secara sistematis agar mempermudah dalam proses interpretasi dan analisis data, (5) Membuat kategori untuk mengklasifikasikan jawaban responden yaitu dengan menggolongkan jawaban-jawaban dalam kategori tertentu, (6) Tabulasi data dan menghitung frekuensi pada masing-masing kategori jawaban responden, dan (7) Analisa data dan penyajian data secara deskriptif.

Untuk menentukan tingkat partisipasi anggota KTH dalam kegiatan KTH dilakukan dengan memberi skor terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan besarnya partisipasi. Skor yang diberikan dalam menentukan partisipasi

masyarakat dengan menggunakan nilai 1–3.

Selanjutnya skor tersebut diklasifikasikan ke dalam kelas-kelas tingkat partisipasi yang dikelompokkan dalam tiga kelas, yaitu tingkat partisipasi rendah, tingkat partisipasi sedang dan tingkat partisipasi tinggi. Standar besarnya kelas partisipasi ditentukan dengan menggunakan rumus statistik sebagai berikut:

$I=R / \text{Jumlah Kelas}$

Keterangan;

I = Lebar Interval

R = $R_t - R_r$

R_t = Skor tertinggi

R_r = Skor terendah (Abdul Syani, 1995 dalam Junaedi, 2010)

Berdasarkan rumus di atas maka dapat diperoleh hasil klasifikasi tingkat partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut: $I= (60-1) / 3 = 19,67$ (pembulatan = 20). Maka dapat ditentukan kelompok tingkat partisipasi masyarakat yaitu:

1. Tingkat partisipasi rendah yaitu 1– 20
2. Tingkat partisipasi sedang yaitu 21 – 40
3. Tingkat partisipasi tinggi yaitu 41 – 60

Selanjutnya pada analisis data digunakan analisis regresi linier berganda yang menghubungkan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berpengaruh positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio.

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan;

Y = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

$X_1, X_2,$ dan X_3 = Variabel independen

a = Konstanta (nilai Y' apabila $X_1, X_2, \dots, X_n = 0$)

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yang diolah menggunakan aplikasi *Microsoft Excel 2010* dan *IBM SPSS Statistic 20* kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Pembuatan tabel frekuensi, diagram, serta tabel tabulasi silang untuk melihat data awal responden untuk masing-masing variabel secara tunggal menggunakan aplikasi *Microsoft Excel 2010*.

Data kualitatif merupakan data pendukung yang diolah dan dianalisis dengan konten analisis. Pengolahan dan analisis data kualitatif dilakukan dengan mereduksi atau meringkas data dengan menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga sesuai dengan keperluan untuk menjawab pertanyaan analisis di dalam penelitian. Selanjutnya dilakukan penyajian data dengan menyusun data dan informasi yang diperoleh dalam bentuk matriks dan narasi sehingga mudah dipahami. Verifikasi adalah langkah terakhir yang merupakan penarikan kesimpulan dari hasil yang telah diolah pada tahap reduksi.

H. Uji Instrumen Penelitian

Pengolahan data menggunakan SPSS untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat menggunakan uji F.

1. Jika signifikansi $F > 0,05$ H_0 diterima H_1 ditolak artinya secara serempak tidak ada pengaruh yang signifikan antara karakter individu anggota KTH, kemauan, kemampuan, kesempatan untuk berpartisipasi dalam Perhutanan Sosial, aspek dukungan, dan peran pendamping.
2. Jika signifikansi $F \leq 0,05$ H_1 diterima H_0 ditolak artinya serempak terdapat pengaruh yang signifikan antara karakter individu anggota KTH kemauan, kemampuan, kesempatan untuk berpartisipasi dalam Perhutanan Sosial, aspek dukungan, dan peran pendamping.

I. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan pengujian regresi yang dilakukan untuk menguji hipotesis. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

I.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah residual berdistribusi normal, agar dihasilkan estimasi yang tidak bias. Uji normalitas ini menggunakan uji Non Parametrik *Kolmogorov-Smirnov*. Residual berdistribusi normal apabila angka signifikansi lebih besar dari angka α .

I.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan menguji ada tidaknya korelasi antar variabel independen. Multikolinearitas muncul jika terdapat hubungan linier yang sempurna diantara beberapa atau semua variabel dari model yang ada. Jika dalam model terdapat multikolinearitas, maka akan berakibat koefisien regresi yang diperoleh tidak tertentu atau kesalahan standarnya tidak terhingga, sehingga menimbulkan bias dalam spesifikasi. Multikolinearitas dapat dideteksi dari besaran *variance inflation faktor* (VIF) dan *tolerance*. Jika *tolerance value* di bawah 0.10 atau nilai VIF di atas 10 berarti terdapat multikolinearitas pada model regresi.

I.3 Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk membuktikan apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan *error* pada periode sebelumnya ($t-1$). Jika terdapat korelasi antara residual maka terjadi masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah bebas autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi terhadap variabel-variabel yang diuji, dilakukan pengujian Durbin Watson (DW) dengan ketentuan batas atas (*upper bound/du*) dan batas bawah (*lower bound/dl*). Diketahui terdapat autokorelasi jika:

- a. Nilai DW terletak antara du dan $4-du$, maka tidak terdapat autokorelasi.
- b. Nilai DW lebih rendah dari dl , maka terdapat autokorelasi positif.
- c. Nilai DW lebih besar dari $4-dl$, maka terdapat autokorelasi negatif.
- d. Nilai DW terletak antara du dan dl atau antara $(4-du)$ dan $(4-dl)$, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

I.4 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk membuktikan apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual, dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastis adalah gangguan dalam fungsi regresi dimana variabelnya mempunyai varian yang tidak sama. Homoskedastis terjadi jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap. Pengujian ada tidaknya heteroskedastis dapat dilakukan dengan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresi nilai absolute dari residual (μ_i) terhadap variabel bebas dengan persamaan sebagai berikut:

$$\mu_i = \beta_1 + \beta_2 X_1 + v_1$$

jika hasil signifikansi dari variabel independen tersebut lebih besar dari α , maka di dalam model tidak terdapat heteroskedastisitas.

Untuk uji normal menunjukkan residual berdistribusi normal, bebas autokorelasi, dan tidak terdapat heteroskedastisitas yang dapat dilihat pada Lampiran 7 dan 8. Pada uji multikolinearitas diperoleh hasil nilai *tolerance value* dari semua variabel atau nilai VIF yang menunjukkan tidak terdapat multikolinearitas pada model regresi.

J. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumentasi

Dalam ilmu sosial, instrumen penelitian yang digunakan sering disusun sendiri termasuk menguji validitas dan reliabilitasnya.

J.1 Validitas

Validitas daftar pertanyaan diperlukan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Suatu alat ukur dapat dikatakan valid (sahih) bila dapat mengukur sesuatu yang sebenarnya ingin diukur. Daftar pertanyaan/kuisisioner yang digunakan sebagai instrumen pengukuran, maka kuisisioner yang disusun harus mengukur apa yang ingin diukur. Dalam penelitian ini jenis validitas yang digunakan adalah validitas isi (*content validity*), yaitu suatu alat ukur yang ditentukan dengan memasukkan semua aspek yang dianggap sebagai aspek

kerangka konsep yang akan diukur, untuk mendapatkan daftar pertanyaan/kuisisioner yang mempunyai validitas tinggi, maka daftar pertanyaan/kuisisioner disusun dengan cara: (a) definisi operasional variabel yang akan diukur; (b) *studi literature* (pustaka) sebagai referensi (acuan); (c) konsultasi dengan pembimbing (ahli).

Untuk menguji validitas instrument penelitian, maka harus melalui cara sebagai berikut:

- a. Mendefinisikan secara operasional konsep yang akan diukur.
- b. Melakukan uji coba skala pengukuran tersebut pada sejumlah responden. Responden diminta untuk menyatakan apakah mereka setuju atau tidak setuju dengan masing-masing pertanyaan.
- c. Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban.
- d. Menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan dengan skor total dengan menggunakan rumus teknik korelasi *productmoment*.

Dalam hal analisis item, teknik korelasi untuk menentukan validitas item sampai saat ini merupakan teknik yang paling banyak digunakan. Selanjutnya dalam memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi, Masrun menyatakan item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau korelasi $\geq 0,3$. Jadi, kalau korelasi antar butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir dalam instrument tersebut dinyatakan tidak valid.

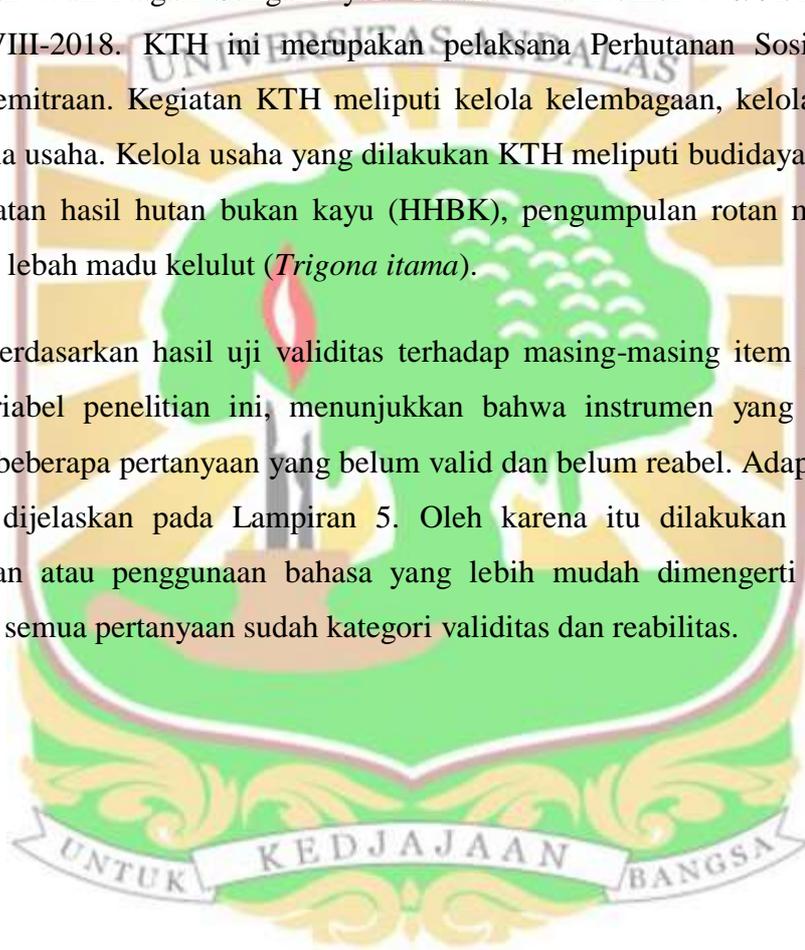
J.2 Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Jika suatu alat ukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliabel. Dengan kata lain reliabilitas menunjukkan konsistensi isu atau alat pengukur didalam mengukur gejala yang sama. Pada penelitian ini, pengujian reliabilitas instrumen dilakukan secara *internal consistency*. Pengujian ini dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu.

Pengujian reliabilitas instrument dilakukan dengan teknik Alfa Cronbach pada software SPSS 26. Suatu instrumen dianggap reliabel apabila nilai Alpha Cronbach $> 0,6$.

Uji Validitas dan uji Reabilitas dilakukan pada KTH Andam Dewi di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. KTH yang beranggotakan 15 orang ini berdiri pada tahun 3 Agustus 2018 dengan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Nomor 140/01/KTH-PAD/SNMA/VIII-2018. KTH ini merupakan pelaksana Perhutanan Sosial dengan skema kemitraan. Kegiatan KTH meliputi kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha. Kelola usaha yang dilakukan KTH meliputi budidaya sampai ke pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), pengumpulan rotan manau, dan budidaya lebah madu kelulut (*Trigona itama*).

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap masing-masing item pertanyaan pada variabel penelitian ini, menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan terdapat beberapa pertanyaan yang belum valid dan belum reabel. Adapun kondisi tersebut dijelaskan pada Lampiran 5. Oleh karena itu dilakukan penggantian pertanyaan atau penggunaan bahasa yang lebih mudah dimengerti responden sehingga semua pertanyaan sudah kategori validitas dan reabilitas.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Pauh merupakan salah satu dari 11 kecamatan yang ada di Kota Padang. Luas wilayah Kecamatan Pauh adalah 146,29 km², berada pada ketinggian 10 - 1.600 m dari permukaan laut, suhu berkisar 22⁰C – 31,7⁰ C, dan curah hujan rata-rata 384,88 mm/bulan. Kecamatan Pauh berada di kawasan barat Kota Padang yang terletak pada posisi 0⁰58'0" Lintang Selatan dan 100⁰21'11" Bujur Timur. Gambar 7 memperlihatkan letak Kecamatan Pauh di peta Kota Padang berdasarkan RTRW Kota Padang 2012-2030.



Gambar 7. Letak Kecamatan Pauh di Peta Kota Padang (RTRW Kota Padang 2012-2030).

Ibukota Kecamatan Pauh terletak di Kelurahan Cupak Tengah. Sebelah Utara Kecamatan Pauh berbatasan dengan Kecamatan Koto Tangah, sebelah selatan dengan Kecamatan Lubuk Kilangan dan Lubuk Begalung, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Solok, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kuranji dan Padang Timur.



Gambar 8. Lokasi penelitian di Kecamatan Pauh.

Kecamatan Pauh memiliki 9 (sembilan) kelurahan yang terdiri dari daratan dan perbukitan yang merupakan kawasan Hutan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 (Statistik Kota Padang, 2013). Kelurahan terluas adalah Lambung Bukit ($38,80 \text{ km}^2$) dan yang terkecil adalah Kelurahan Binuang Kampung Dalam ($2,97 \text{ km}^2$). Lokasi penelitian berada di Kelurahan Limau Manis Selatan dan Kelurahan Lambung Bukit di Kecamatan Pauh (Gambar 8).

Jumlah penduduk Kecamatan Pauh pada tahun 2020 tercatat 75.387 jiwa dengan *sex ratio* penduduk perempuan 37.268 jiwa dan penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 38.119 jiwa. Luas wilayah dan jumlah penduduk menurut kelurahan di Kecamatan Pauh dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Luas wilayah dan jumlah penduduk menurut kelurahan di Kecamatan Pauh tahun 2020.

Kelurahan	Luas (km ²)	Jumlah penduduk (jiwa)
1. Pisang	3,99	9.947
2. Binuang Kampuang Dalam	2,97	6.767
3. Piai Tengah	4,97	4.310
4. Cupak Tengah	2,99	10.856
5. Kapalo Koto	35,83	10.046
6. Koto Lua	18,92	8.952
7. Lambung Bukik	38,80	3.841
8. Limau Manih Selatan	12,96	11.892
9. Limau Manih	24,86	8.776
Jumlah	146,29	75.387

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.

Untuk sarana pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan menurut kelurahan di wilayah Kecamatan Pauh tahun 2020 disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Sarana pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan menurut kelurahan di Kecamatan Pauh tahun 2020.

Kelurahan	SD	SLTP	SMU	PT
1. Pisang	4	-	-	-
2. Binuang Kampuang Dalam	3	1	-	-
3. Piai Tengah	2	-	-	-
4. Cupak Tengah	1	1	1	-
5. Kapalo Koto	3	1	1	-
6. Koto Luar	3	1	-	-
7. Lambung Bukik	2	-	-	-
8. Limau Manih Selatan	3	1	2	-
9. Limau Manih	3	-	1	2
Jumlah	24	5	5	2

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.

Selanjutnya jumlah lulusan berdasarkan jenjang pendidikan menurut kelurahan di wilayah Kecamatan Pauh tahun 2020 disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Jumlah lulusan berdasarkan jenjang pendidikan menurut kelurahan di wilayah Kecamatan Pauh tahun 2020.

Kelurahan	SD	SLTP	SMU	PT
1. Pisang	90	-	-	-
2. Binuang Kampuang Dalam	98	75	-	-
3. Piai Tengah	52	-	-	-
4. Cupak Tengah	104	201	242	-
5. Kapalo Koto	90	114	130	-
6. Koto Luar	76	219	-	-
7. Lambung Bukik	42	-	-	-
8. Limau Manih Selatan	151	125	120	-
9. Limau Manih	188	-	297	-
Jumlah	-	-	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.

B. Profil KTH Sikayan Balumuik

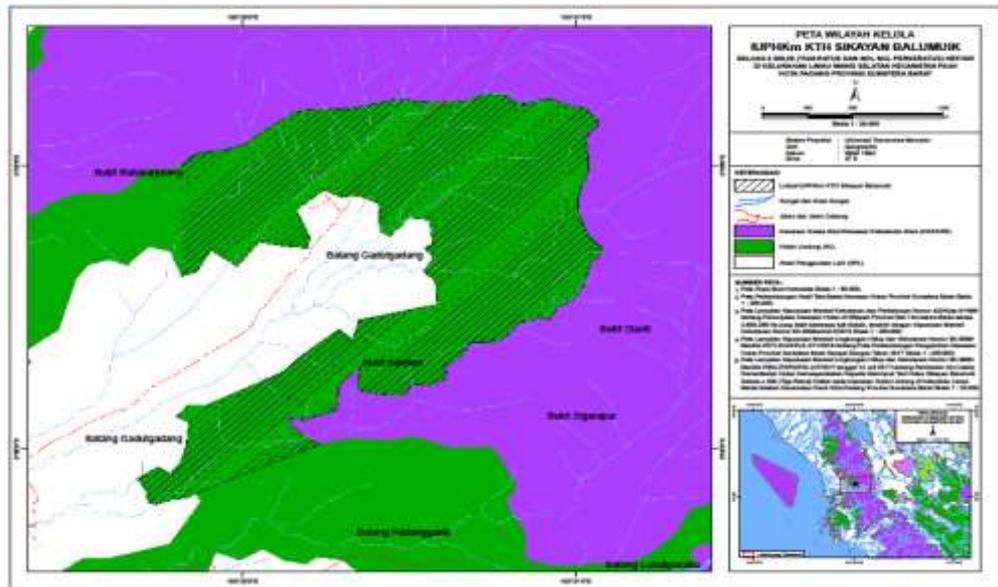
KTH Sikayan Balumuik terletak di Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Profil singkat KTH Sikayan Balumuik ini disajikan pada Tabel 12.



Tabel 12. Profil singkat KTH Sikayan Balumuik Tahun 2021.

Nama Kelompok	: Hutan Kemasyarakatan (HKm) Sikayan Balumuik
Jumlah Anggota Kelompok	: 79 orang (tahun 2021: 68 orang)
Legalitas Pembentukan KTH	1. Kelas Pemula : SK Lurah Limau Manis Selatan 2. Kelas Madya : SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Nama Ketua	Nomor Sertifikat : 522/110/PPMHA/2018 Salmi Akhyar, S.Sos.
Alamat Kelompok	: Koto Baru RT 02 RW 06 Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang
Nama Penyuluh/ Pendamping	: Nelmi, S.Si, M.Si
Nama Instansi	: KPHL Bukit Barisan-Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Jarak dari pusat kelurahan	: 3 km
Kondisi Jalan	: Baik dan dapat dilewati kendaraan jenis roda 4 dan roda 2
Kegiatan KTH	: Konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan; Pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu; Pemanfaatan kawasan hutan; Pemanfaatan jasa lingkungan; dan Pengembangan kelembagaan
Sumber: KPHL Bukit Barisan, 2021	

Wilayah kelola KTH ini berada dalam Hutan Lindung Bukit Barisan dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) melalui Surat Keputusan (SK) Nomor SK.3880/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017 seluas ± 300 hektar selama 35 tahun. Wilayah kelola KTH Sikayan Balumuik digambarkan pada peta Gambar 9.



Gambar 9. Peta Wilayah Kelola KTH Sikayan Balumuik Tahun 2021.

Dalam SK ini dijelaskan tentang areal hutan lindung yang diberikan, ketentuan izin, cakupan izin usaha pemanfaatan, serta hak dan kewajiban pemegang izin. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin adalah: menjaga areal dari kerusakan dan pencemaran lingkungan, memberi tanda batas areal kerja, menyusun rencana kerja usaha (RKU) dan rencana kerja tahunan (RKT), menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pemberi izin, melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerja, melaksanakan tata usaha hasil hutan, membayar provisi sumber daya hutan, mempertahankan fungsi hutan serta melaksanakan perlindungan hutan.

IUPHKm diberikan pada hutan produksi dan/atau hutan lindung yang belum dibebani izin, dan wilayah tertentu dalam KPH. IUPHKm dapat diberikan di luar areal yang telah ditetapkan dalam PIAPS berdasarkan permohonan masyarakat yang dibantu oleh Pokja PPS. Selanjutnya pemanfaatan hutan dalam IUPHK ini pada hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan serta pemungutan hasil hutan bukan kayu, dan/atau pada hutan produksi berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam IUPHKm di hutan produksi

atau IUPHHK-HTR dilaksanakan berdasarkan rencana kerja usaha yang telah disahkan.

Menurut laporan pelaksanaan fasilitasi peningkatan kelas KTH Sikayan Balumuik Tahun 2018, kondisi KTH ini pada tahun 2018 digambarkan sesuai Tabel 13.

Tabel 13. Kondisi KTH Sikayan Balumuik pada tahun 2018.

No	Kondisi KTH
I Kelola Kelembagaan	
1	Kepengurusan KTH lengkap, namun uraian tugas belum ada
2	Perlu penyempurnaan AD/ART KTH
3	Perlu penyempurnaan Rencana Kerja KTH
4	KTH belum memiliki buku administrasi yang lengkap dan belum terselenggara dengan baik
5	KTH sudah memiliki sekretariat, namun belum difungsikan dengan baik dan belum memiliki kelengkapan sarana dan prasarananya
6.	Keterlibatan pengurus dan anggota dalam kegiatan peningkatan kapasitas SDM masih kurang
7	Kaderisasi pengurus dan anggota untuk menjadi PKSM masih kurang
8	KTH sudah melaksanakan pertemuan rutin, namun belum melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan KTH
9	Perlu peningkatkan kerjasama KTH dengan lembaga pemerintah dan swasta
II Kelola Kawasan	
1	Pengurus dan anggota KTH belum memahami wilayah kelola dan batas kawasan hutan di sekitarnya
2	Belum dilakukan identifikasi secara rinci potensi dan daya dukung wilayah, permasalahan, serta kearifan lokal
3	Wilayah kelola KTH belum ditata dan dipetakan secara partisipatif, serta rencana pemanfaatan wilayah kelola belum disusun dengan baik
4	Wilayah kelola KTH masih perlu upaya pengembalian fungsi kawasan
III Kelola Usaha	
1	Akses KTH terhadap sumber modal, teknologi dan informasi dari berbagai sumber masih kurang
2	Volume usaha belum optimal
3	Kemitraan KTH dengan pelaku usaha masih lemah

Sumber: Laporan fasilitasi peningkatan kelas KTH Sikayan Balumuik, 2018

Selanjutnya dalam RKT tahun 2021, KTH ini melakukan berbagai kegiatan seperti Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Pengamanan Hutan, dan Pengembangan Kelembagaan. Dalam kelola usaha KTH ini melakukan Pemanfaatan HHBK dengan jenis tanaman yaitu durian, manggis, petai, pinang, dan kopi.

C. Gambaran Umum KTH Padang Janiah

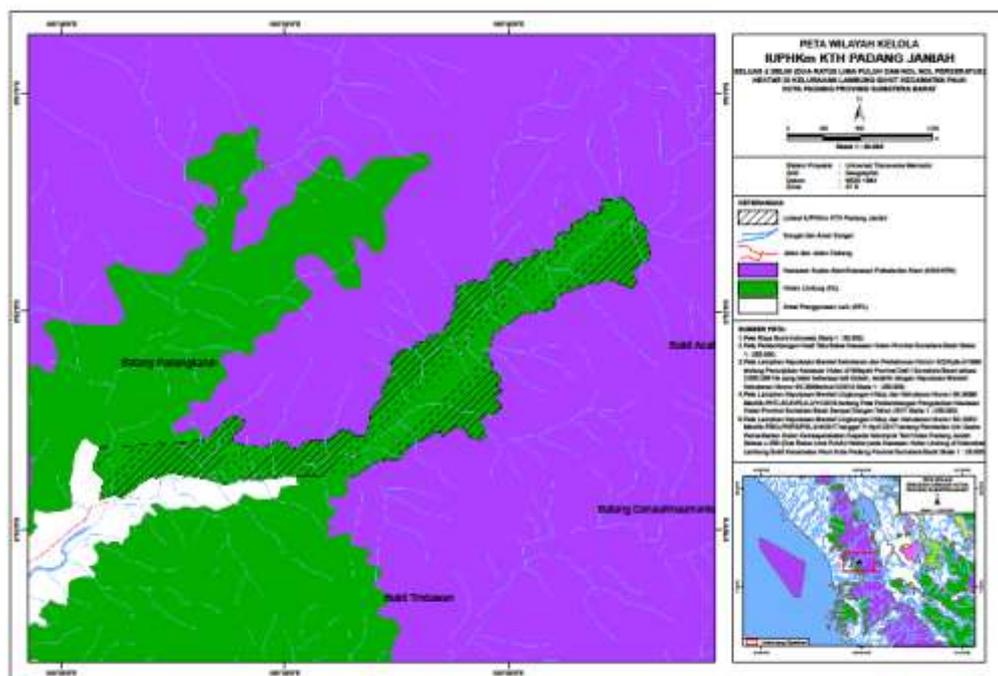
KTH Padang Janiah terletak di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, dengan profil singkat seperti disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Profil singkat KTH Padang Janiah Tahun 2021.

Nama KTH	: Hutan Kemasyarakatan (HKm) Padang Janiah
Jumlah Anggota KTH	: 29 orang, (tahun 2021: 27 orang)
Legalitas Pembentukan KTH	: Kelas Pemula : SK. Lurah Limau Manis Selatan
Nama Ketua	: Abdul Rahman
Alamat Kelompok	: Blok Bukik Jirek, Kelurahan Batu Busuk, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
Nama Penyuluh/ Pendamping	: Nur Hidayat, S.Si
Nama Instansi	: KPHL Bukit Barisan-Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Jarak dari pusat kelurahan	: 3 km
Kondisi Jalan	: Baik dan dapat dilewati kendaraan jenis roda 4 dan roda 2
Kegiatan KTH	: Konservasi, Perlindungan dan Pengamanan Hutan; Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu; Pemanfaatan Kawasan Hutan; Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan Pengembangan Kelembagaan

Sumber: KPHL Bukit Barisan, 2021

KTH Padang Janiah memperoleh IUPHKm dari MenLHK melalui SK Nomor SK.2051/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017 seluas 250 hektar selama 35 tahun. Wilayah kelola KTH Padang Janiah dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Peta Wilayah Kelola KTH Padang Janiah Tahun 2021.

Dalam RKT tahun 2021, KTH Padang Janiah melakukan berbagai kegiatan seperti Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Pengamanan Hutan, dan Pengembangan Kelembagaan. Dalam hal kelola usaha KTH ini melakukan pemanfaatan HHBK dengan tiga jenis tanaman yaitu durian, manggis, dan petai.

D. Karakteristik Individu Responden

Peneliti memfokuskan pada empat karakteristik individu utama yaitu umur, tingkat pendidikan formal, jenis kelamin, dan proporsi pendapatan dari hutan. Berikut ini adalah penjelasan kondisi masing-masing variabel karakteristik individu anggota KTH di Kota Padang.

1. Umur

Umur merupakan lama waktu hidup responden atau anggota KTH yang dihitung sejak tahun kelahirannya hingga waktu penelitian ini dilakukan. Umur responden dalam penelitian ini dibagi ke dalam tiga kategori yaitu umur muda

(17-29 tahun), dewasa (30-49 tahun), dan tua (≥ 50 tahun) (Tanjung, 2016). Data umur anggota KTH di Kota Padang dijabarkan pada Tabel 15.

Tabel 15. Umur anggota KTH di Kota Padang.

Umur	Kota Padang		KTH Sikayan Balumuik		KTH Padang Jariah	
	Jumlah (orang)	Persen	Jumlah (orang)	Persen	Jumlah (orang)	Persen
Muda (17-29 tahun)	1	2	1	1	0	0
Dewasa (30-49 tahun)	36	40	23	40	13	57
Tua (≥ 50 tahun)	44	59	34	59	10	43
Jumlah	81	100	58	100	23	100

Sumber: Data diolah, 2021.

Data pada Tabel 15 menunjukkan bahwa sebagian besar anggota KTH di Kota Padang berumur 50 tahun ke atas yaitu sebanyak 59%. Kondisi yang sama juga terdapat di KTH Sikayan Balumuik (59%) dan KTH Padang Jariah (57%). Berdasarkan kategori kelompok umur BPS, anggota KTH Sikayan Balumuik yang tergolong pada umur produktif (15-64 tahun) adalah sebanyak 45 orang atau 78 %, KTH Padang Jariah sebanyak 21 orang atau 91 % dan di Kota Padang sebanyak 55 orang atau 68%.

Anggota KTH di Kota Padang, terutama KTH Sikayan Balumuik, didominasi oleh kategori berumur tua tetapi masih produktif. Anggota KTH yang lebih tua dan masih dalam kategori umur produktif, umumnya memiliki lebih banyak pengalaman hidup, wawasan yang lebih luas, lebih bijak, sikap positif, dan lebih terampil mengelola kegiatan KTH dibandingkan dengan yang berusia muda. Hasil penelitian Tanjung (2016) menunjukkan bahwa usia produktif lebih mudah menerima perubahan, ide-ide dan inovasi serta merupakan sumberdaya yang penting dalam pembangunan berkelanjutan.

Namun dalam pelaksanaan kegiatan KTH, beberapa anggota yang berumur tua dibantu keluarga atau menggunakan tenaga kerja harian dengan sistem upah. Hal ini karena kemampuan fisik yang sudah berkurang. Siswiyanti dan Sugihen (2006) serta Tanjung (2016) menyatakan bahwa semakin tua umur seseorang maka akan semakin rendah ketersediaan tenaganya.

Di KTH Padang Jariah, pada saat penelitian, hanya tujuh orang anggota kategori umur produktif yang telah melaksanakan kegiatan KTH mulai penanaman sampai pemanfaatan hasil HHBK dari lahan masing-masing. Sementara anggota lainnya mencari pekerjaan lain seperti menjadi buruh tani dan tukang bangunan sehingga lahannya masih dibiarkan tumbuh secara alami. Mencari pekerjaan sampingan tersebut dilakukan karena menurut pengetahuan mereka memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan lebih cepat dibandingkan dengan bertani atau mengelola lahan. Menurut Ketua KTH Padang Jariah, hal ini yang menyebabkan kegiatan KTH ini belum banyak dilaksanakan.

2. Pendidikan formal

Tingkat pendidikan formal merupakan jenjang sekolah yang diikuti responden sampai selesai. Tingkat pendidikan formal anggota KTH di Kota Padang disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Tingkat pendidikan anggota KTH (responden) di Kota Padang.

Tingkat Pendidikan formal	Kota Padang		KTH Sikayan Balumuik		KTH Padang Jariah	
	Jumlah (orang)	Persen	Jumlah (orang)	Persen	Jumlah (orang)	Persen
Tidak Sekolah	3	4	2	3	1	4
SD	28	37	19	33	9	39
SLTP	19	23	10	17	9	39
SLTA	30	35	26	45	4	17
Perguruan Tinggi	1	1	1	2	0	0
Jumlah	81	100	58	100	23	100

Sumber: Data diolah, 2021.

Data pada Tabel 16 menunjukkan bahwa anggota KTH di Kota Padang paling banyak mengikuti pendidikan formal tingkat SD sebesar 37% (28 orang). Anggota KTH Sikayan Balumuik banyak pada kategori SLTA sebesar 43% (26 orang) dan KTH Padang Jariah mengikuti pendidikan formal yang sama banyak pada kategori SD dan SLTP masing-masing sebesar 39% (9 orang).

Hasil analisis tabel 16 diketahui bahwa terdapat perbedaan nyata antara tingkat pendidikan formal kedua KTH. Tidak adanya biaya untuk melanjutkan sekolah, sarana prasarana yang kurang memadai, dan jarak yang jauh dapat

menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan (Rimbawati *et al.*, 2018). Hal itu tentunya berlaku untuk pendidikan formal, tetapi tidak berlaku untuk pendidikan informal dan pendidikan nonformal. Berdasarkan informasi di lapangan diketahui bahwa kemampuan anggota KTH di Kota Padang dalam mengelola berbagai kegiatan KTH, baik teknis maupun kelembagaan tidak jauh berbeda. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan tidak hanya bersumber dari pendidikan formal namun dapat pula diperoleh melalui pendidikan informal. Pendidikan informal dapat diperoleh dari orang tua dan lingkungan seperti sanak keluarga, tetangga, pertemanan, kelompok informal, penyuluhan dan pelatihan yang mereka ikuti. Pengetahuan ini memperkaya pengalaman anggota KTH dalam melaksanakan kegiatan KTH. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Suprayitno (2011) yang menemukan bahwa petani di sekitar hutan memperoleh pendidikan informal dari orang tua yang merupakan sumber utama pembentukan kemampuan teknis dalam pengelolaan hutan kemiri di Kabupaten Maros.

Tanjung (2016) menemukan bahwa tingkat pendidikan menjadi salah satu penyebab lancarnya pengelolaan Hutan Nagari karena terkait dalam menerima informasi dan berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya, Sumardjo (2010) menyatakan, pendidikan informal merupakan salah satu pilar utama bagi pengembangan kemandirian masyarakat. Kemandirian merupakan suatu prasyarat bagi masyarakat untuk berdaya dalam mengelola sumberdaya, termasuk sumberdaya hutan, dan beradaptasi terhadap berbagai perubahan lingkungan. Sejalan pula dengan pernyataan Sadono *et al.* (2014) bahwa rendahnya tingkat pendidikan menjadi penyebab rendahnya kemampuan petani dalam mengelola usahatani yang pada akhirnya dapat menjadi penghambat dalam meningkatkan produksi dan pengelolaan pertanian berkelanjutan.

Sejalan dengan hasil-hasil penelitian tersebut, maka pendidikan formal dan nonformal sangat penting diperhatikan karena berhubungan dengan kelancaran menerima informasi dan komunikasi, kemampuan, kemandirian serta partisipasi anggota KTH dalam kegiatan KTH untuk pembangunan hutan lestari.

3. Jenis Kelamin

Faktor jenis kelamin menggambarkan peran laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan hutan. Gambaran jenis kelamin anggota KTH di Kota Padang dijabarkan pada Tabel 17.

Tabel 17. Jenis kelamin anggota KTH (responden) di Kota Padang.

Jenis Kelamin	Kota Padang		KTH Sikayan Balumuik		KTH Padang Janiah	
	Jumlah (orang)	Persen	Jumlah (orang)	Persen	Jumlah (orang)	Persen
Laki-laki	73	86	50	86	23	100
Perempuan	8	14	8	14	0	0
Jumlah	81	100	58	100	23	100

Sumber: Data diolah, 2021.

Dari tabel di atas diketahui bahwa pada KTH di Kota Padang terdapat responden sebanyak 70 orang laki-laki (86%) dan 8 orang perempuan (14%), serta KTH Sikayan Balumuik terdapat laki-laki sebanyak 50 orang (86%) dan perempuan sebanyak 8 orang (14%). Untuk KTH Padang Janiah semua responden adalah laki-laki.

Menurut informasi ketua KTH Sikayan Balumuik, masih ada perbedaan partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan KTH, karena masih terdapat pandangan bahwa pengambil keputusan merupakan tugas laki-laki, meskipun tidak menutup kemungkinan perempuan untuk memberikan pendapatnya. Hal ini sesuai dengan temuan Wibowo *et al.* (2012) dan Tanjung (2016) bahwa dalam usaha tani, masih ada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa meski tidak terlibat di setiap kegiatan KTH namun perempuan aktif dalam menghadiri kegiatan pelatihan-pelatihan dan acara sosialisasi yang diadakan oleh penyuluh kehutanan. Dalam melaksanakan kegiatan KTH perempuan berperan sama dengan laki-laki, mulai dari penanaman, pemeliharaan, hingga pemanfaatan hasil agroforestri seperti durian dan manggis. Pada kesempatan tertentu, perempuan dibantu oleh laki-laki, baik dari anggota keluarga maupun pihak lainnya sebagai tenaga upah. Namun dalam tahapan evaluasi dan pelaporan kegiatan KTH, perempuan lebih menyerahkan kepada pengurus inti yang didominasi oleh laki-laki.

4. Proporsi Pendapatan dari Kegiatan KTH

Proporsi pendapatan dari kegiatan KTH merupakan persentase penghasilan individu anggota KTH yang diperoleh dari kegiatan KTH terhadap total pendapatannya per bulan. Proporsi pendapatan dari hutan menurut Tanjung (2016) dibagi ke dalam kategori: rendah (< 20%), sedang (20% - 49%), dan tinggi (> 50%). Pada KTH di Kota Padang, proporsi pendapatan dari hutan dijabarkan pada Tabel 18.

Tabel 18. Proporsi pendapatan dari hutan anggota KTH di Kota Padang.

Proporsi Pendapatan dari Hutan (Rp)	Kota Padang		KTH Sikayan Balumuik		KTH Padang Janiah	
	Jumlah (orang)	Persen	Jumlah (orang)	Persen	Jumlah (orang)	Persen
Rendah (< 20%)	18	22	1	2	17	74
Sedang (20%-49%)	14	17	12	21	2	9
Tinggi (\geq 50%)	49	60	45	78	4	17
Jumlah	81	100	58	100	23	100

Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan Tabel 18 dapat dilihat terdapat perbedaan nyata proporsi pendapatan responden dari kegiatan KTH. Di Kota Padang, responden yang proporsi pendapatannya dari kegiatan KTH tergolong tinggi sebanyak 60,5%, di KTH Sikayan Balumuik sebesar 77,6% dan KTH Padang Janiah hanya 17%. Di KTH Padang Janiah, sebagian besar (73,9%) responden memperoleh proporsi pendapatan dari kegiatan KTH tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena pada KTH Padang Janiah baru terdapat tujuh orang responden yang telah melaksanakan budidaya dan memanen HHBK di lahan mereka, artinya hanya tujuh anggota KTH yang telah memperoleh pendapatan dari kegiatan KTH.

Di lapangan diperoleh informasi bahwa walaupun beberapa anggota KTH memiliki berbagai pekerjaan lainnya, mereka tetap melakukan kelola usaha HHBK di lahannya. Hal tersebut karena HHBK sudah menjadi sumber pendapatan rumah tangga yang penting bagi anggota KTH. Hal ini seiring dengan penelitian Suhardjito (2000); Awang (2003); dan Suprayitno (2011) yang menunjukkan bahwa walaupun kontribusi pendapatan rumah tangga dari pengelolaan hutan rakyat tergolong kecil, namun dapat digunakan sebagai tabungan.

E. Peran Pendamping

Indikator peran pendamping pada penelitian ini difokuskan pada tiga faktor utama yaitu peran pendamping sebagai fasilitator, sebagai edukator, dan sebagai advokator.

1. Pendamping sebagai Fasilitator

Sejak pembentukan KTH di Kota Padang pada tahun 2015, kegiatan kedua KTH pada penelitian ini, yaitu KTH Sikayan Balumuik dan KTH Padang Janiah, didampingi oleh seorang Penyuluh Kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Kemudian pada tahun 2021 kedua KTH ini didampingi oleh seorang Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat nomor: 522.4/1225/PPMHA-21 tanggal 17 Mei 2021 tentang Penetapan PKSM Lingkup Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Peran pendamping sebagai fasilitator pada KTH Sikayan Balumuik, KTH Padang Janiah, dan Kota Padang dideskripsikan pada Tabel 19 dan Tabel 20.

Tabel 19. Sebaran responden berdasarkan penilaian mengenai peran pendamping sebagai fasilitator pada kegiatan KTH di Kota Padang.

Peran Pendamping	Kategori	Kota Padang		KTH Sikayan Balumuik		KTH Padang Janiah	
		Jumlah (orang)	Persen	Jumlah (orang)	Persen	Jumlah (orang)	Persen
Fasilitator	Sedang	24	29,6	14	25	10	43
	Tinggi	57	70,4	44	76	13	57
	Jumlah	81	100,0	58	100,0	23	100,0

Sumber: Data Diolah, 2021

Tabel 20. Nilai peran pendamping sebagai fasilitator pada kegiatan KTH di Kota Padang.

Peran Pendamping	Kategori	Kota Padang	KTH Sikayan Balumuik	KTH Padang Janiah
Fasilitator	Sedang	0	0	0
	Tinggi	26,20	26,28	26,13

Kriteria: Rendah (11-18), Sedang (>18-25), dan Tinggi (>25-33).

Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan Tabel 19 dan Tabel 20, peran pendamping sebagai fasilitator pada kegiatan KTH di Kota Padang, KTH Sikayan Balumuik, KTH Padang Janiah dinilai tinggi oleh responden dengan nilai masing-masing sebesar 26,20 (70%), 26,68 (76%), dan 26,13 (57%).

Berdasarkan wawancara diperoleh informasi bahwa pendamping KTH di Kota Padang secara umum sudah memfasilitasi berbagai jenis kegiatan KTH, mulai dari pembentukan KTH, penyusunan rencana, pelaksanaan sampai monitoring dan evaluasi kegiatan KTH. Pendamping juga berperan aktif dalam berkoordinasi dengan KPHL Bukit Barisan terkait sarana prasarana, pelatihan, dan memberikan informasi lainnya dalam rangka kegiatan KTH.

Menurut anggota KTH, frekuensi kunjungan pendamping cukup sering atau sesuai dengan tahapan kegiatan KTH. Sejak awal tahun 2021 kunjungan Pendamping lebih intensif seiring pelaksanaan kegiatan KTH untuk program Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.16/PSKL/SET/PSL.0/12/2016, KUPS merupakan pemegang izin atau Hak Perhutanan Sosial yang akan dan/atau telah melakukan usaha dan Hutan Rakyat yang telah ditetapkan sebagai KUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingginya nilai peran pendamping sebagai fasilitator didukung letak wilayah KTH Sikayan Balumuik dan KTH Padang Janiah yang dekat dengan jalan poros dan kondisi jalan yang cukup bagus sehingga lebih cepat dan mudah bagi PKSM untuk berkunjung. Kendaraan pribadi berupa motor dan mobil merupakan alat transportasi utama untuk menuju posko atau wilayah kelola masing-masing KTH. Ketua KTH Sikayan Balumuik menyatakan: *“Jalan ke lokasi sudah dibeton, tapi harus hati-hati apalagi di musim hujan. Mobil bisa parkir di posko, untuk ke lahan kita jalan kaki. Kalau motor bisa terus ke ladang”*.

Peran pendamping sebagai fasilitator sangat penting dalam kegiatan KTH. Dalam menjalankan perannya, pendamping menggunakan berbagai variasi teknik fasilitasi untuk mengaktifkan, mempercepat, dan memperlancar jalannya proses kegiatan KTH. Hal ini sejalan dengan penelitian Suprayitno (2011) bahwa dalam pengelolaan hutan kemiri kemampuan petani belum optimal yang sangat

dipengaruhi oleh rendahnya intensitas peran penyuluh kehutanan, baik peran sebagai fasilitator maupun sebagai pendidik.

2. Pendamping sebagai Edukator

Berdasarkan kuisioner diperoleh sebaran peran pendamping sebagai edukator pada KTH di Kota Padang yang disajikan pada Tabel 21 dan Tabel 22.

Tabel 21. Sebaran responden berdasarkan penilaian peran pendamping sebagai edukator pada Kegiatan KTH di Kota Padang

Peran Pendamping	Kategori	Kota Padang		KTH Sikayan Balumuik		KTH Padang Jariah	
		Jumlah (orang)	Persen	Jumlah (orang)	Persen	Jumlah (orang)	Persen
Edukator	Rendah	1	2	1	2	0	0
	Sedang	57	70	48	83	9	41
	Tinggi	23	28	9	15	14	61
	Jumlah	81	100	58	100	23	100

Sumber: Data Diolah, 2021

Tabel 22. Nilai peran pendamping sebagai edukator pada Kegiatan KTH di Kota Padang

Peran Pendamping	Kategori	Kota Padang	KTH Sikayan Balumuik	KTH Padang Jariah
		Jumlah	Jumlah	Jumlah
Edukator	Sedang	11,67	11,26	0
	Tinggi	0	0	12,78

Kriteria; Rendah (5-8), Sedang (>8-12), dan Tinggi (>12-15).

Sumber: Data Diolah, 2021

Peran pendamping sebagai edukator pada KTH Kota Padang dan KTH Sikayan Balumuik dalam kategori sedang dengan jumlah masing-masing sebesar 11,67 (70%) dan 11,26 (83%) sedangkan KTH Padang Jariah dalam kategori tinggi dengan jumlah sebesar masing-masing 12,78 dan (61%). Penilaian ini dilakukan terhadap intensitas kegiatan pendamping untuk mengedukasi responden dalam melaksanakan kegiatan KTH.

Berdasarkan wawancara diperoleh informasi bahwa PKSM kedua KTH ini merupakan sarjana biologi yang baik di bidang ilmu tanaman dan pemeliharannya. Namun secara teknis pengelolaan HKm, pendamping ini belum memahami dengan baik, disebabkan karena PKSM mempunyai latar belakang pendidikan diluar kehutanan. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Kehutanan Propinsi

Sumatera Barat mewajibkan setiap pendamping KTH di Kota Padang khususnya dan lingkup Propinsi Sumatera Barat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan terkait baik yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat maupun mitra.

Dalam perkembangannya, menurut responden saat ini pendamping telah membantu anggota KTH untuk membangkitkan kesadaran, melatih, membimbing, dan menyampaikan informasi terkait kegiatan KTH. Pentingnya peran pendamping sebagai edukator diperkuat dengan hasil penelitian Suprayitno (2011) yang menyatakan bahwa intensitas peran penyuluh kehutanan akan meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola hutan kemiri. Awang (2004) juga membuktikan dalam penelitiannya bahwa salah satu unsur keberhasilan pengelolaan hutan oleh masyarakat sekitar hutan adalah adanya bimbingan teknis bagi petani tersebut.

Peran Pendamping sebagai Advokator (X7)

Peran penyuluh sebagai advokator merupakan peran dimana pendamping memposisikan dirinya sebagai wakil anggota KTH dalam rangka membela dan membantu mengartikulasikan kebutuhan dan aspirasi anggota KTH kepada pemangku kepentingan tertentu terutama pemerintah untuk mempengaruhi pandangan, pendapat serta kebijakan pengelolaan hutan kemiri sehingga dapat lebih berpihak kepada anggota KTH atau petani.

Hasil penelitian terhadap variabel peran pendamping sebagai advokator pada KTH di Kota Padang yang dideskripsikan pada Tabel 23 dan Tabel 24.

Tabel 23. Sebaran responden berdasarkan penilaian peran pendamping sebagai advokator pada kegiatan KTH di Kota Padang

Peran Pendamping	Kategori	Kota Padang		KTH Sikayan Balumuik		KTH Padang Jariah	
		Jumlah (orang)	Persen	Jumlah (orang)	Persen	Jumlah (orang)	Persen
Advokator	Rendah	3	4	3	5	0	0
	Sedang	70	86	53	91	17	74
	Tinggi	8	10	2	3	6	27
	Jumlah	81	100	58	100	23	100

Sumber: Data Diolah, 2021

Tabel 24. Nilai peran pendamping sebagai advokator pada Kegiatan KTH di Kota Padang

Peran Pendamping	Kategori	Kota Padang	KTH Sikayan Balumuik	KTH Padang Janiah
		Jumlah	Jumlah	Jumlah
Advokator	Sedang	11,26	7,97	8,70

Kriteria; Rendah (4-6), Sedang (>6-9), dan Tinggi (>9-12).

Sumber: Data Diolah, 2021

Penilaian responden terhadap peran pendamping sebagai advokator dinilai responden pada KTH di Kota Padang dalam kategori tinggi sebesar 11,26 (86%) dan kedua KTH dalam kategori sedang dengan jumlah nilai sebesar 7,97 (91%), 8 (74%). Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor misalnya berdasarkan observasi dan wawancara pada responden diketahui bahwa masing-masing PKSM baru 9 (sembilan) bulan mendampingi KTH, sehingga dapat membuat kedekatan dan ikatan emosional dengan anggota KTH belum cukup kuat khususnya dalam memahami permasalahan KTH.

Namun seiring waktu, anggota KTH dari masing-masing KTH tersebut semakin terbuka dalam menyampaikan aspirasinya kepada PKSM. Disinilah peran pendamping sangatlah penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi terkait kegiatan KTH seperti kelembagaan, kelola kawasan, kelola usaha, kemitraan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi.

F. Deskripsi Aspek Dukungan

Aspek Dukungan pada peneliti ini difokuskan pada tiga indikator yaitu dukungan pemerintah, dukungan *stakeholders* lainnya dan dukungan pasar.

Dukungan Pemerintah (X8)

Dukungan pemerintah merupakan hal penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat pembukan UUD 1945. Dukungan tersebut dapat berupa peraturan, kebijakan, bantuan, dan pendampingan pada kelompok masyarakat atau masyarakat. Dalam penelitian Alfandi (2019), keterlibatan pemerintah ini dapat dianalisis menggunakan teori Arnstein (1969) meliputi: sebagai fasilitator berupa dana dan program, kegiatan, Partisipasi Informasi dan saran, serta pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi dukungan pemerintah pada KTH di Kota Padang dideskripsikan pada Tabel 25 dan Tabel 26.

Tabel 25. Sebaran responden berdasarkan penilaian dukungan pemerintah pada kegiatan KTH di Kota Padang

Aspek Dukungan	Kategori	Kota Padang		KTH Sikayan Balumuik		KTH Padang Janiah	
		Jumlah (orang)	Persen	Jumlah (orang)	Persen	Jumlah (orang)	Persen
Dukungan pemerintah	Rendah	16	20	7	12	10	39
	Tinggi	62	80	51	88	13	51
	Jumlah	81	100	58	100	23	100

Sumber: Data Diolah, 2021

Tabel 26. Nilai dukungan pemerintah pada Kegiatan KTH di Kota Padang

Aspek Dukungan	Kategori	Kota Padang	KTH Sikayan Balumuik	KTH Padang Janiah
		Jumlah	Jumlah	Jumlah
Dukungan pemerintah	Rendah	0	0	0
	Tinggi	6,46	7,07	5,04

Kriteria; Rendah (0-4,5), dan Tinggi (>4,5-9).

Sumber: Data Diolah, 2021

Pemerintah pada penelitian ini difokuskan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bukit Barisan. Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 dijelaskan tentang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Untuk luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung dikelola oleh KPHL.

Penilaian responden terhadap dukungan pemerintah pada KTH di Kota Padang, KTH Sikayan Balumuik, dan KTH Padang Janiah dalam kategori tinggi dengan jumlah secara berurutan sebesar dan 6,46 (79%), 7,07 (90%), dan 5,04 (57%). Berdasarkan data tersebut dapat dilihat sejauh mana kesungguhan pemerintah dalam memberikan dukungan pada kegiatan masing-masing KTH untuk berpartisipasi dalam mengelola hutan.

Pada KTH Sikayan Balumuik dukungan pemerintah lebih banyak secara pendampingan, sarana prasarana, dan pelatihan. Seiring perkembangan KTH ini dukungan pemerintah ditingkatkan sesuai kebutuhan KTH seperti pelatihan pengolahan biji kopi dan dibantu pemasarannya secara *online*.

Secara umum dukungan kebijakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat lokal/petani sekitar hutan mulai terakomodasi dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Disini sedikitnya terdapat tiga bab yang berkaitan dengan dukungan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat lokal, yakni: Bab VIII tentang Penyerahan Kewenangan, Bab X tentang Peran serta Masyarakat, dan Bab XI tentang Gugatan Perwakilan.

Kebijakan pemerintah mengalami perubahan dengan tujuan memperluas pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan. Hal ini diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Dalam penelitiannya Zulevi (2017) mengakui bahwa warga Jorong Simancuang memiliki akses dan terlindungi dan mengelola Hutan Lindung Simancuang sebagai penunjang kehidupan mereka dengan adanya Kebijakan Perhutanan Sosial.

Selanjutnya dukungan tersebut diikuti dengan seiring terbitnya beberapa peraturan terkait seperti Peraturan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Kebijakan ini mendapat respon yang berbeda dari pemerintahan provinsi dan kabupaten berkaitan dengan kepentingan dan spirit dalam pembangunan kebijakan tersebut. Kebijakan otonomi daerah misalnya dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam membangun kebijakan pembangunan kehutanan berbasis masyarakat di daerah. Kebijakan tersebut juga dapat menciptakan konflik kewenangan antar pemerintahan provinsi, kabupaten, dan *stakeholders* lainnya. Pihak-pihak tersebut bersaing dalam pemanfaatan hutan dengan dalih juga menjaga kelestarian hutan dan ancaman terhadap kondisi sumberdaya hutan yang berbeda. Untuk mensinergikan pembangunan perhutanan social di Propinsi Sumatera Barat, kebijakan perhutanan sosial diikuti dengan terbitnya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2018 tentang

Pelaksanaan Fasilitasi Perhutanan Sosial. Dalam peraturan ini terdapat peran pemerintah daerah melalui berbagai satuan kerja terkait dalam memfasilitasi pengembangan usaha seperti modal, pendampingan, pelatihan, serta mengatur integrasi dan sinkronisasi para pihak untuk mendukung Perhutanan Sosial.

Bentuk dukungan pemerintah berupa dana dan sarana prasarana telah diterima KTH melalui beberapa jenis program. Adapun program-program pada KTH Sikayan Balumuik sebagai berikut:

1. Kebun Bibit Rakyat (KBR) oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dengan jenis yang dibutuhkan oleh anggota KTH seperti durian, manggis, dan jengkol. Bantuan ini berupa pembuatan dan perawatan bibit dikelola oleh KTH kemudian dibagikan kesetiap anggota KTH untuk ditanam dilahan masing-masing dalam wilayah kelola KTH Sikayan Balumuik.
2. Pelatihan dari KPHL Bukit Barisan sebagai pengelola kawasan lindung Bukit Barisan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas KTH Sikayan Balumuik. Pelatihan yang diberikan diantaranya adalah peningkatan kelas KTH dan pengolah biji kopi (*roasting*) pada bulan oktober 2021.



Gambar11. Pelatihan *roasting* biji kopi

Untuk KTH Padang Jariah pada tahun 2021 program Perhutanan Sosial ini diaktifkan kembali melalui kemitraan KPHL Bukit Barisan dengan Universitas Andalas dalam budidaya lebah madu kelulut/ galo-galo (*Trigona itama*).

Dukungan *Stakeholders* lainnya (X9)

Keberadaan *stakeholders* juga dapat mendampingi kelompok masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan hidup dalam bentuk bantuan, dan pendampingan peningkatan kapasitas pada kegiatan KTH. Dukungan *Stakeholders* lainnya pada kedua KTH yang diamati dipersepsikan tinggi oleh responden. Berdasarkan hasil penelitian, kondisi dukungan pemerintah pada KTH di Kota Padang dideskripsikan pada Tabel 27 dan Tabel 28.

Tabel 27. Sebaran responden berdasarkan penilaian aspek dukungan *stakeholders* lainnya pada kegiatan KTH di Kota Padang

Aspek Dukungan	Kategori	Kota Padang		KTH Sikayan Balumuik		KTH Padang Janiah	
		Jumlah (orang)	Persen	Jumlah (orang)	Persen	Jumlah (orang)	Persen
Dukungan <i>stakeholders</i> lainnya	Rendah	50	62	17	29	23	100
	Tinggi	31	38	41	71	0	0
	Jumlah	81	100	58	100	23	100

Sumber: Data Diolah, 2021

Tabel 28. Nilai dukungan *stakeholders* lainnya pada Kegiatan KTH di Kota Padang

Aspek Dukungan	Kategori	Kota Padang	KTH Sikayan Balumuik	KTH Padang Janiah
		Jumlah	Jumlah	Jumlah
Dukungan <i>stakeholders</i> lainnya	Rendah	0	0	2,87
	Tinggi	4,60	5,40	0

Kriteria; Rendah (0-4) dan Tinggi (>4-8).

Sumber: Data Diolah, 2021

Tabel 27 dan Tabel 28 menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap dukungan *stakeholders* lainnya pada KTH di Kota Padang dan KTH Sikayan Balumuik dalam kategori tinggi dengan jumlah sebesar 5,40 (71%) dan 4,60 (50%), sedangkan pada KTH Padang Janiah dalam kategori rendah dengan jumlah sebesar 2,87 (100%). Terdapat perbedaan nyata dari dukungan *stakeholders* lainnya pada kedua KTH. Hal ini dapat disebabkan oleh perkembangan pelaksanaan kegiatan kedua KTH yang juga berbeda. Pada KTH Sikayan Balumuik, kegiatan KTH telah dilaksanakan melalui berbagai kelola usaha sehingga mendorong *stakeholders* lainnya mendukung melalui:

1. Pendampingan Penyusunan *Master Plan* Ekowisata Hutan Kemasyarakatan Sikayan Balumuik dari Universitas Andalas. *Master Plan* ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Usaha/RKU tahun 2018-2027 KTH Sikayan Balumuik yang memuat beberapa kegiatan seperti Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil hutan Bukan Kayu dengan sub program budidaya berbagai jenis tanaman, Pemanfaatan Kawasan Hutan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan, dan Pengembangan Kelembagaan. Selanjutnya *Master Plan* dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan/RKT KTH Sikayan Balumuik Tahun 2021 dengan sub kegiatan Pengelolaan Potensi Eko Wisata.
2. Program CSR dari PT. Semen Indonesia berupa Alat Produksi Pemecahan Biji Kopi yang Diluar kawasan hutan lindung Bukit Barisan, PT. Semen Indonesia memberikan CSR dalam bentuk jalan menuju wilayah kelola KTH Sikayan Balumuik dan bangunan masjid disamping posko kesekretariatan KTH Sikayan Balumuik.
3. CV. Wana Sejahtera mendukung kegiatan budidaya serai wangi mulai dari bibit, pelatihan teknis, panen dan pasca panen.



Gambar12. Budidaya serai wangi

4. Balai Minyak Atsiri Propinsi Sumatera Barat memberi bantuan dengan alat suling serai wangi.

Untuk KTH Padang Jariah, sejak KTH ini terbentuk beberapa anggota hanya melaksanakan budidaya durian. Pada perkembangannya, oktober 2021 KTH ini memperoleh bantuan berupa bibit untuk pakan lebah madu kelulut/galo-galo (*Trigona itama*) dari Universitas Andalas, dilanjutkan pelatihan budidaya dan pascapanen. Ke depan rencananya akan diserahkan beberapa *stup* lebah madu tersebut pada KTH ini.

Dukungan *stakeholders* lainnya pada kedua KTH mempengaruhi kelancaran Kegiatan KTH. Menurut informasi dari masing-masing ketua KTH, dalam KTH terdapat beberapa tokoh masyarakat alim ulama, dan ninik mamak yang dianggap oleh anggota KTH atau petani sekitar hutan memiliki pengaruh, status sosial, pola pikir, wawasan, karisma atau kewibawaan. Tokoh masyarakat juga dianggap sebagai pusat informasi karena berada di posisi jaringan kontak dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap upaya pembangunan dan pengembangan masyarakat, termasuk Kegiatan KTH dalam pembangunan kehutanan.

Umumnya tokoh masyarakat lebih kosmopolit, banyak menerima informasi dan mengkomunikasikan informasi ke luar yang jarang diperoleh oleh masyarakatnya. Kemampuan dan kepemilikan informasi disebarkan kepada anggota KTH. Tokoh-tokoh masyarakat tersebut juga sebagai anggota KTH sehingga secara langsung dapat mendukung di setiap kegiatan KTH mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan peningkatan KTH. Hal ini seiring dengan hasil penelitian Suprayitno (2011) bahwa dalam pengelolaan hutan kemiri, tokoh masyarakat sekitar hutan kemiri terkadang memberikan informasi dan membantu petani. Diperkuat oleh Fauziyah (2014) melalui penelitiannya yang menyimpulkan bahwa peran tokoh masyarakat sebagai *stakeholder* kunci dan *stakeholder* utama yang lebih berperan sebagai eksekusi dan koordinasi dalam kegiatan pengembangan hutan rakyat.

Selanjutnya *stakeholders* lainnya yang peran penting dalam Kegiatan KTH adalah akademisi, lembaga, dan perusahaan. Sesuai penelitian Dipokusumo (2011) yang mengemukakan bahwa kehadiran LSM dalam pembangunan kehutanan berbasis masyarakat merupakan keharusan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat karena dapat mendampingi masyarakat dalam berbagai

kegiatan KTH. Beberapa *Stakeholders* lainnya juga telah mendukung melalui berbagai program dan ada yang dilengkapi sarana prasarananya.

Dukungan Pasar (X10)

Dukungan atau kepastian pasar merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong kesinambungan khususnya Kegiatan KTH dalam usaha kelola HHBK KTH. Pada KTH Sikayan Balumuik dalam kelola usaha sudah menghasilkan beberapa HHBK meliputi durian dan manggis yang dipasarkan secara konvensional serta kopi yang telah dipasarkan secara konvensional maupun *online*. Sedangkan pada KTH Padang Janiah beberapa anggota KTH telah memanfaatkan HHBK durian dan manggis yang dipasarkan secara konvensional. Kondisi aspek dukungan pasar pada kegiatan KTH di Kota Padang ditampilkan pada Tabel 29 dan Tabel 30.

Tabel 29. Sebaran responden berdasarkan penilaian dukungan pasar pada kegiatan KTH di Kota Padang

Aspek Dukungan	Kategori	Kota Padang		KTH Sikayan Balumuik		KTH Padang Janiah	
		Jumlah (orang)	Persen	Jumlah (orang)	Persen	Jumlah (orang)	Persen
Dukungan pasar	Rendah	69	89	49	84	23	100
	Tinggi	9	11	9	16	0	0
Jumlah		81	100	58	100	23	100

Sumber: Data Diolah, 2021

Tabel 30. Nilai dukungan pasar pada kegiatan KTH di Kota Padang

Aspek Dukungan	Kategori	Kota Padang	KTH Sikayan Balumuik	KTH Padang Janiah
		Jumlah	Jumlah	Jumlah
Dukungan pasar	Rendah	1,36	1,76	0,43

Kriteria; Rendah (0-2) dan Tinggi (>2-4).

Sumber: Data Diolah, 2021

Dukungan pasar pada KTH di Kota Padang, KTH Sikayan Balumuik, dan KTH Padang Janiah dinilai rendah oleh responden dengan jumlah sebesar 1,36 (88%), 1,76 (84%), dan 0,4 (100%). Rendahnya penilaian responden ini dapat disebabkan oleh pemasaran hasil budidaya HHBK umumnya masih dilaksanakan

secara langsung atau konvensional ke penampung. Untuk pemasaran secara *online* baru dilakukan pada biji kopi yang telah dikemas melalui pemasaran *online* dan pameran.

Berdasarkan observasi dan wawancara diperoleh informasi bahwa di Kota Padang umumnya pemasaran HHBK tidak menemui banyak hambatan karena sudah ada penampung yang membeli hasil produksi tersebut. Setiap anggota KTH melaporkan jumlah atau berat hasil panen HHBK dan langsung menjual tersebut pada penampung sesuai harga pasar konvensional saat itu. Disini anggota KTH memiliki posisi tawar yang lebih rendah karena saat panen ketersediaan hasil HHBK ini melimpah, belum adanya usaha bersama atau koperasi yang dapat menampung hasil HHBK, dan petani umumnya tidak menguasai informasi pasar. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Supriyanto (2011) yang menemukan bahwa petani memiliki posisi tawar yang rendah karena tidak menguasai informasi pasar, tidak adanya bentuk usaha bersama, dan ketersediaan sumberdaya yang terbatas.



Gambar 13. Pameran dan penjualan hasil HHBK dan olahannya

Oleh karena itu, dukungan pasar merupakan faktor penting, sebagaimana Mosher (1978) menyatakan bahwa ketersediaan pasar merupakan faktor esensial dalam menggerakkan dan membangun pertanian. Semakin tinggi dukungan pasar akan semakin meningkatkan motivasi anggota KTH untuk berpartisipasi dalam Kegiatan KTH. Tujuan akhir dari kelola usaha Kegiatan KTH adalah hasilnya dapat memberikan keuntungan finansial untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Awang *et. al*(2000) bahwa titik paling menentukan yang memberikan dampak positif atau negatif atas

keberadaan sumberdaya alam terhadap masyarakat di sebuah desa adalah mekanisme pasar yang ada di tengah masyarakat tersebut.

G. Tingkat Partisipasi Anggota KTH dalam Kegiatan KTH (Y)

Supriyanto (2011) menjelaskan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam suatu kegiatan atau program pembangunan. Tingkat partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH dilihat dari keaktifan anggota saat menjalankan aktivitas KTH. Adapun sebaran responden berdasarkan penilaian partisipasi pada kegiatan KTH di Kota Padang ditampilkan pada Tabel 31 dan Tabel 32.

Tabel 31. Sebaran responden berdasarkan penilaian tingkat partisipasi pada kegiatan KTH di Kota Padang

Tingkat Partisipasi Anggota KTH	Kategori	Kota Padang		KTH Sikayan Balumuik		KTH Padang Janiah	
		Jumlah (orang)	Persen	Jumlah (orang)	Persen	Jumlah (orang)	Persen
	Rendah	18	22	0	0	18	78
	Tinggi	63	78	58	100	5	22
	Jumlah	81	100	58	100	23	100

Sumber: Data Diolah, 2021

Tabel 32. Nilai partisipasi pada kegiatan KTH di Kota Padang

Tingkat Partisipasi Anggota KTH	Kategori	Kota Padang	KTH Sikayan Balumuik	KTH Padang Janiah
		Jumlah	Jumlah	Jumlah
	Rendah	0	0	7,35
	Tinggi	12,21	15,17	0

Kriteria; Rendah (0-10) dan Tinggi (>10-20).

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 31 dan Tabel 32 diketahui bahwa tingkat partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH di Kota Padang dan KTH Sikayan Balumuik dan dinilai oleh responden dengan kategori tinggi dengan jumlah sebesar 12,21 (78%) dan 15,17 (100%). Sedangkan tingkat partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH Padang Janiah dalam kategori rendah dengan jumlah rendah sebesar 7,35 (74%).

Terdapat perbedayaan nyata terhadap tingkat partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH Sikayan Balumuik, KTH Padang Janiah, dan Kota Padang.

Berdasarkan hasil analisa sebelumnya menunjukkan bahwa perbedaan kategori tingkat partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH disebabkan oleh beberapa faktor yang disimpulkan sebagai berikut:

1. KTH memiliki kategori umur yang berbeda dimana KTH Sikayan Balumuik didominasi umur tua dan KTH Padang Janiah didominasi umur muda.
2. Kategori tingkat pendidikan formal yang berbeda pada kedua KTH. KTH Sikayan Balumuik didominasi SLTA dan KTH Padang Janiah memiliki anggota KTH yang didominasi SD dan SLTP.
3. KTH Sikayan Balumuik memiliki proporsi pendapatan yang lebih tinggi dari KTH Padang Janiah
4. Bentuk peran pendamping sebagai fasilitator, edukator, dan advokator yang berbeda pada kedua KTH yang berhubungan dengan perkembangan kegiatan KTH. KTH Sikayan Balumuik telah melaksanakan berbagai kegiatan yang lebih banyak.
5. Dukungan pemerintah, *stakeholders* lainnya, serta pasar yang juga berbeda pada kedua KTH. Hal ini juga berhubungan dengan perkembangan kegiatan KTH. KTH Sikayan Balumuik telah melaksanakan berbagai kegiatan, mendapatkan dukungan berupa kebijakan, sarana prasarana, pelatihan, dan pemasaran yang lebih luas dari berbagai pihak.
6. Secara umum tingkat partisipasi anggota pada kegiatan KTH di Kota Padang dipengaruhi oleh faktor-faktor mempengaruhi antara kedua KTH tersebut. Dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi anggota pada kegiatan KTH di Kota Padang dalam kategori tinggi karena berhubungan dengan umur kategori tua, tingkat pendidikan formal SLTA, anggota memiliki proporsi pendapatan yang tinggi dari kegiatan KTH, kategori peran pendamping yang tinggi pada KTH yang telah melaksanakan berbagai kegiatan, serta dukungan dari berbagai pihak yang tinggi pada KTH yang telah melaksanakan berbagai kegiatan tersebut.

Analisa selanjutnya dilakukan pada setiap tahapan kegiatan KTH. Diperkuat oleh hasil penelitian Adi (2001) dalam Meliala (2018), partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dari tahap perencanaan,

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Adapun tahapan tersebut dijabarkan di bawah ini:

Merencanakan Kegiatan KTH

Partisipasi dalam merencanakan kegiatan KTH mencakup keikutsertaan seluruh anggota KTH dalam merencanakan kegiatan KTH mulai dari pelaksanaan, pemanfaatan hasil, monitoring, dan evaluasi. Diperkuat oleh Adi (2001) dalam Meliala (2018), pada tahapan perencanaan, masyarakat diajak turut membuat keputusan menyangkut kepentingan bersama dengan wujud seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diperoleh sebaran responden berdasarkan penilaian partisipasi dalam merencanakan kegiatan KTH di Kota Padang yang diuraikan pada Tabel 33 dan Tabel 34.

Tabel 33. Sebaran responden berdasarkan penilaian tingkat partisipasi anggota KTH dalam merencanakan kegiatan KTH di Kota Padang

Tingkat Partisipasi Anggota KTH	Kategori	Kota Padang		KTH Sikayan Balumuik		KTH Padang Jariah	
		Jumlah (orang)	Persen	Jumlah (orang)	Persen	Jumlah (orang)	Persen
Merencanakan Kegiatan KTH	Rendah	50	62	37	54	13	57
	Tinggi	31	38	21	36	10	43
	Jumlah	81	100	58	100	23	100

Sumber: Data Diolah, 2021

Tabel 34. Nilai partisipasi tingkat partisipasi anggota KTH dalam merencanakan kegiatan KTH di Kota Padang

Tingkat Partisipasi Anggota KTH	Kategori	Kota Padang	KTH Sikayan Balumuik	KTH Padang Jariah
		Jumlah	Jumlah	Jumlah
Merencanakan Kegiatan KTH	Tinggi	3,46	3,48	3,52

Kriteria; Rendah (0-2) dan Tinggi (>2-4).

Sumber: Data Diolah, 2021

Tingkat partisipasi anggota KTH dalam merencanakan kegiatan KTH dinilai tinggi oleh responden pada KTH di Kota Padang dan kedua KTH dengan jumlah

sebesar 3,46 (38%), 3,48 (36%), dan 3,52(43%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa anggota KTH secara umum di Kota Padang menyadari bahwa perencanaan merupakan langkah awal yang penting bagi keberhasilan suatu kegiatan khususnya kegiatan KTH. Mereka berusaha untuk hadir dalam berbagai rapat KTH termasuk merencanakan kegiatan KTH.

Untuk mengelola kegiatan KTH yang sesuai dengan tujuan Pembangunan Kehutanan perlu disusun rencana kerja yang baik, sistematis dan partisipatif sehingga menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan. Rencana kerja juga bertujuan untuk mendapatkan gambaran rencana kelola jangka panjang dan jangka pendek.

Rencana kerja KTH Sikayan Balumuik dan KTH Padang Janiah terbagi dua yaitu Rencana Kerja Umum Hutan Kemasyarakatan (RKU-IUPHKm) dan Rencana Kerja Tahunan Hutan Kemasyarakatan (RKT-IUPHKm). Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.16/PSKL/SET/PSL.0/12/2016, RKU-IUPHKm merupakan rencana kerja yang disusun oleh pemegang IUPHKm yang berisi kegiatan penandaan batas areal kerja, blok atau zonasi areal kerja, pemanfaatan hutan, perlindungan, pengamanan hutan dan pengembangan kearifan lokal berdasarkan perencanaan partisipatif. RKU-IUPHKm disusun untuk jangka waktu 10 tahun (tahun 2018-2027) dan dijabarkan dalam RKT-IUPHKm.

Partisipasi sudah terjadi pada saat rancangan perencanaan kemudian diangkat ke dalam rapat Bersama dilanjutkan penyusunan RKU dan RKT yang didampingi oleh PKSM. Seluruh *draft* perencanaan ini dibahas dalam rapat bulanan KTH ini karena keputusan akhir tetap berada pada seluruh anggota Sikayan Balumuik.

Sama halnya pada KTH Padang Janiah dimana penyusunan rencana-rencana kerja tersebut diserahkan pada pengurus inti dan PKSM karena dianggap mampu dan dipercaya dalam mengurus beberapa hal terkait KTH serta dan dekat dengan pihak luar seperti pemerintah. Bahkan terdapat beberapa anggota yang kurang memahami jenis-jenis rencana kerja tersebut. Namun beberapa informasi sering anggota peroleh di posko sebelum berangkat menuju lahan.

Sekretariat atau biasa disebut Posko KTH Sikayan Balumuik merupakan tempat berkumpul anggota KTH setiap pagi dan sore, sehingga berbagai informasi, diskusi dan komunikasi terjadi lebih intensif pada KTH. Hal ini sangat mendukung dalam pembangunan KTH ini menuju KTH mandiri. Dengan intensif pertemuan tersebut, untuk pertemuan bulanan tidak sering lagi dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu responden sebagai berikut:

Syafrizal (anggota KTH Sikayan Balumuik) menyampaikan: *“Saya tidak sering ikut dalam membuat rencana kerja KTH karena kesibukan lainnya. Kami serahkan dan percayakan pada pengurus saja karena sudah paham akan kondisi dan kebutuhan anggota dalam KTH ini. Biasanya ketua atau pengurus menyampaikan informasi di posko, pagi saat kami akan ke ladang, atau sore saat pulang dari ladang. Di posko kami banyak diskusi”*.



Gambar 14. Sekretariat/Posko KTH Sikayan Balumuik



Gambar 15. Rumah Pengolahan Biji kopi

Sesuai tujuan pengelolaan Kegiatan KTH khususnya dan tujuan pembangunan kehutanan secara umum yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan menjaga kelestariannya maka mulai dari perencanaan Kegiatan KTH perlu disusun strategi upaya meningkatkan pendapatan anggota KTH dengan memperhatikan faktor sosial ekonomi masyarakat dan kondisi hutan. Faktor sosial ekonomi ini akan menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi pengelolaan lahan HKm oleh anggota KTH. Sejalan dengan temuan (Birgantoro dan Nurrochmat, 2007 dalam Suprayitno (2011) dalam penelitiannya, bahwa masyarakat di sekitar hutan tidak dapat diabaikan karena yang mempunyai akses langsung maupun tidak langsung

terhadap kawasan hutan dan memanfaatkan sumberdaya hutan hal ini yang dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap kelestarian hutan.



Gambar 16. Perencanaan dan berbagai diskusi KTH Padang Jariah

Gambar 17. Diskusi KTH Padang Jariah dilakukan diberbagai kesempatan

Melaksanakan Kegiatan KTH

Menurut Adi (2001) dalam Meliala (2018), tahap pelaksanaan partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan lanjutan dari rencana yang telah disepakati. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diperoleh hasil sebaran tingkat partisipasi anggota KTH dalam melaksanakan kegiatan KTH Sikayan Balumuik dan KTH Padang Jariah yang diuraikan pada Tabel 35 dan Tabel 36.

Tabel 35. Sebaran responden berdasarkan penilaian tingkat partisipasi anggota KTH dalam melaksanakan kegiatan KTH di Kota Padang

Tingkat Partisipasi Anggota KTH	Kategori	Kota Padang		KTH Sikayan Balumuik		KTH Padang Jariah	
		Jumlah (orang)	Persen	Jumlah (orang)	Persen	Jumlah (orang)	Persen
Melaksanakan Kegiatan KTH	Rendah	18	22	0	0	18	73
	Tinggi	63	78	58	100	5	22
	Jumlah	81	100	58	100	23	100

Sumber: Data Diolah, 2021

Tabel 36. Nilai partisipasi tingkat partisipasi anggota KTH dalam melaksanakan kegiatan KTH di Kota Padang

Tingkat Partisipasi Anggota KTH	Kategori	Kota Padang	KTH Sikayan Balumuik	KTH Padang Jariah
		Jumlah	Jumlah	Jumlah
Melaksanakan Kegiatan KTH	Rendah	0	0	1,09
	Tinggi	3,15	3,87	0

Kriteria; Rendah (0-2) dan Tinggi (>2-4).

Sumber: Data Diolah, 2021

Secara statistik, terdapat perbedaan nyata partisipasi pada tahapan melaksanakan kegiatan yang ditunjukkan dengan penilaian responden pada KTH di Kota Padang dan KTH Sikayan Balumuik dan berada dalam kategori tinggi yang ditunjukkan oleh nilai jumlah sebesar 3,15(78%), dan 3,87 (100%) sedangkan KTH Padang Jariah dalam kategori rendah dengan jumlah sebesar 1,09(73%). Hal ini berhubungan dengan perkembangan masing-masing KTH di Kota Padang tersebut sampai bulan September 2021 saat penelitian ini dilakukan.

Kegiatan KTH Sikayan Balumuik untuk RKT Tahun 2021 sudah berjalan sampai pada pemeliharaan dan pemanfaatan HHBK (durian manggis, dan kopi) pemeliharaan, pemanfaatan, mengikuti pelatihan *roasting* kopi dan memasarkan hasil produksi KTH secara konvensional dan *online*. Anggota KTH Sikayan Balumuik selalu berusaha untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan apalagi ketika kegiatan tersebut mengundang pihak luar seperti pelatihan. Selain itu keaktifan pengurus inti dalam meningkatkan kemitraan juga mendorong pembangunan KTH yang diwujudkan dengan banyaknya CSR terutama dari PT. Semen Padang. beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan pada kedua KTH di tahun 2021 tersebut sehingga dimasukkan dalam RKT tahun 2022.

KTH Padang Jariah belum seluruhnya anggota KTH yang melakukan kegiatan penanaman HHBK di wilayah kelola KTH Padang Jariah sehingga kondisi lahan yang masih tegakan alami. Baru 7 orang (28%) telah menanam durian dan jenis lainnya di lahan masing-masing. Untuk RKT Tahun 2021 KTH ini baru melaksanakan pemeliharaan dan pemanfaatan HHBK durian dan jenis lainnya dan memasarkan hasil produksi KTH langsung pada pengumpul. KTH ini juga telah mengikuti pelatihan budidaya lebah madu kelulut dari Universitas Andalas.



Gambar 18. Bibit tanaman bunga untuk pakan lebah madu kelulut pada KTH Padang Jariah

Gambar 19. Teknik budidaya tanaman bunga untuk pakan lebah madu kelulut

Memanfaatkan Kegiatan KTH

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diperoleh hasil sebaran tingkat partisipasi anggota KTH dalam kegiatan KTH di Kota Padang yang ditunjukkan pada Tabel 37 dan Tabel 38.

Tabel 37. Sebaran responden berdasarkan penilaian tingkat partisipasi anggota KTH dalam memanfaatkan hasil kegiatan KTH di Kota Padang

Tingkat Partisipasi Anggota KTH	Kategori	Kota Padang		KTH Sikayan Balumuik		KTH Padang Jariah	
		Jumlah (orang)	Persen	Jumlah (orang)	Persen	Jumlah (orang)	Persen
Memanfaatkan Hasil Kegiatan KTH	Rendah	20	25	2	3	18	78
	Tinggi	61	75	56	97	5	22
Jumlah		81	100	58	100	23	100

Sumber: Data Diolah, 2021

Tabel 38. Nilai partisipasi tingkat partisipasi anggota KTH dalam memanfaatkan hasil kegiatan KTH di Kota Padang

Tingkat Partisipasi Anggota KTH	Kategori	Kota Padang	KTH Sikayan Balumuik	KTH Padang Jariah
		Jumlah	Jumlah	Jumlah
Memanfaatkan Hasil Kegiatan KTH	Rendah	0	0	0
	Tinggi	3,31	3,76	2,17

Kriteria; Rendah (0-2) dan Tinggi (>2-4).

Sumber: Data Diolah, 2021

Tingkat partisipasi anggota KTH dalam memanfaatkan hasil kegiatan KTH dipersepsikan tinggi oleh responden pada KTH di Kota Padang, KTH Sikayan

Balumuik, dan KTH Padang Jariah dengan jumlah masing-masing sebesar 3,31 (75%), 3,76 (97%), dan 2,17 (22%). Terkait dengan tahapan melaksanakan kegiatan KTH, dimana KTH Sikayan Balumuik seluruh anggotanya sudah melaksanakan budidaya HHBK sehingga dapat memanfaatkan hasil kegiatan KTH secara lebih banyak dibandingkan pada KTH Padang Jariah yang baru 7 (tujuh) orang melakukan budidaya HHBK.

Partisipasi anggota pada kedua KTH dalam memanfaatkan kegiatan KTH terdapat dalam aktivitas pemanenan hasil dilanjutkan penjualan secara langsung pada pengumpul. Hasil penjualan HHBK seperti durian, manggis, dan biji kopi dapat dimanfaatkan langsung sebagai pendapatan rumah tangga masing-masing anggota KTH. Selain itu, menurut Zulevi (2017) dalam memanfaatkan hasil kegiatan KTH dapat berupa mengikuti penyuluhan dalam pemanfaatan hasil dari Dinas, mengikuti kegiatan dalam pemanfaatan hasil dari Dinas Kehutanan, serta berperan dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya hutan.

Mengevaluasi Kegiatan KTH

Menurut Adi (2001) dalam Meliala (2018), partisipasi masyarakat pada tahap monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diperoleh hasil sebaran tingkat partisipasi anggota KTH dalam mengevaluasi hasil kegiatan KTH di Kota Padang yang ditampilkan pada Tabel 39 dan Tabel 40.

Tabel 39. Sebaran responden berdasarkan tingkat partisipasi anggota KTH dalam mengevaluasi kegiatan KTH di Kota Padang

Tingkat Partisipasi Anggota KTH	Kategori	Kota Padang		KTH Sikayan Balumuik		KTH Padang Jariah	
		Jumlah (orang)	Persen	Jumlah (orang)	Persen	Jumlah (orang)	Persen
Mengevaluasi Kegiatan KTH	Rendah	62	73	39	62	23	100
	Tinggi	19	22	19	38	0	0
	Jumlah	81	100	58	100	23	100

Sumber: Data Diolah, 2021

Tabel 40. Nilai partisipasi tingkat partisipasi anggota KTH dalam mengevaluasi kegiatan KTH di Kota Padang

Tingkat Partisipasi Anggota KTH	Kategori	Kota Padang	KTH Sikayan Balumuik	KTH Padang Jariah
		Jumlah	Jumlah	Jumlah
Mengevaluasi Kegiatan KTH	Rendah	2,30	0	0,57
	Tinggi	0	3,97	0

Kriteria; Rendah (0-3) dan Tinggi (>3-6).

Sumber: Data Diolah, 2021

Partisipasi responden dalam mengevaluasi kegiatan KTH di Kota Padang dan KTH Padang Jariah dalam kategori rendah dengan jumlah sebesar 2,30 (73%) dan 0,57 (100%), sedangkan pada KTH Sikayan Balumuik berada dalam kategori tinggi dengan jumlah sebesar 3,97 (38%). Terdapat perbedaan nyata antara penilai responden dalam mengevaluasi kegiatan pada kedua KTH tersebut, hal ini disebabkan karena perkembangan kegiatan yang lebih banyak pada KTH Sikayan Balumuik sehingga kegiatan yang evaluasi ditambah keikutsertaan anggota KTH menyebabkan nilai jumlah tahap mengevaluasi kegiatan KTH Sikayan Balumuik menjadi tinggi.

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada kedua KTH ini umumnya dilaksanakan oleh pengurus inti didampingi pendamping. Seluruh *draft* hasil monitoring evaluasi dibawa ke forum rapat bulanan KTH karena keputusan akhir tetap berada pada seluruh anggota KTH ini. Rendahnya partisipasi anggota dalam kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan KTH Padang Jariah disebabkan oleh beberapa hal, terutama karena kurang terlibatnya anggota dalam aktivitas manajemen kelembagaan, yaitu aspek perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan monitoring evaluasi. Sejalan dengan hal tersebut Tanjung (2016) menemukan bahwa masih kurang optimalnya realisasi rencana kegiatan yang telah disusun menyebabkan partisipasi anggota masyarakat rendah dalam kegiatan monitoring dan evaluasi.

Pada kedua KTH yang diteliti, anggota KTH tidak melakukan pengawasan secara rutin dan pencatatan dalam pemeliharaan HHBK. Jika terdapat serangan hama atau penyakit akan segera dicegah agar tidak berdampak ke tanaman lain. Pemeliharaan lainnya yang dilakukan adalah penyiangan, peremajaan dan

pengkayaan tanaman. Penilaian pada akhir masa panen dalam bentuk melakukan pencatatan dan dilaporkan pada pengurus KTH terkait. Selain itu petani sudah terbiasa dengan budidaya tanaman yang dilakukan secara turun temurun secara konvensional.

Dalam kegiatan KTH secara umum di Kota Padang, untuk pelaporan, monitoring dan evaluasi dilakukan secara partisipatif yaitu suatu forum pengambilan keputusan bersama dalam menilai kesesuaian hasil dengan tujuan kegiatan, apa yang ingin dilakukan oleh anggota dan mengembangkan program. Pelaporan ditujukan pada Kepala KPHL Bukit Barisan sebagai pemangku kawasan Hutan Lindung Bukit Barisan. Berdasarkan observasi di lapangan pada kedua KTH ini, pelaporan, monitoring dan evaluasi LPHN Sungai Buluh dilakukan oleh pihak pengurus mengikutsertakan anggota KTH didampingi oleh PKSM masing-masing.

Partisipasi anggota KTH dalam kegiatan KTH perlu menjadi perhatian penting karena keberhasilan suatu kegiatan ditentukan juga oleh seberapa intensif pengawasan dan penilaian yang dilakukan terhadap kegiatan tersebut sehingga dapat dilakukan perbaikan dengan segera apabila dijumpai kesalahan dalam pelaksanaannya, serta perbaikan untuk kegiatan selanjutnya. Didukung oleh Haryani (2018) yang mengatakan bahwa agar penyimpangan dalam pengelolaan hutan lebih minimal maka evaluasi pengelolaan HKM oleh masyarakat perlu untuk terus dievaluasi oleh pemerintah.

H. Hubungan Karakter Individu, Peran Pendamping, Aspek Dukungan Tingkat Partisipasi Anggota pada Kegiatan KTH.

KTH di Kota Padang

Berdasarkan Tabel 47 (lampiran 6), diketahui bahwa besarnya nilai $F_{hitung} > F_{tabel} = 9.856 > 1.95$ dan nilai signifikan-F yang nilainya sebesar $0.000 < 0.05$ sehingga untuk Kota Padang dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas berpengaruh secara serempak terhadap tingkat partisipasi anggota KTH pada Kegiatan KTH.

Tabel 48 (lampiran 6), menunjukkan bahwa nilai R sebesar 0.765, dapat diartikan adanya hubungan bersifat kuat antara variabel dependen dengan variabel

independen. Koefisien determinasi (R²) yang dihasilkan sebesar 0.585 artinya naik turunnya nilai variabel dependen secara bersama-sama dipengaruhi oleh variabel independen hanya sebesar 58,5%, sisanya dipengaruhi sebesar 42,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Pada variabel dependen, *Adjusted R Square* diperoleh sebesar 0.525. Hal ini menunjukkan bahwa 52,5% tingkat partisipasi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang diteliti sedangkan sisanya sebesar 48,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Selanjutnya berikut hasil uji-t untuk variabel bebas terhadap tingkat partisipasi dalam kegiatan KTH di Kota Padang yang ditunjukkan oleh Tabel 49.

Tabel 49. Uji Parsial variabel bebas terhadap tingkat partisipasi dalam kegiatan KTH di Kota Padang

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.784	4.893		-.160	.873
Umur	.058	.039	.155	1.464	.148
Tingkat Pendidikan Formal	.394	.141	.265	2.802	.007
Jenis Kelamin	.593	1.171	.041	.506	.614
Proporsi Pendapatan dari Kegiatan KTH	.001	.014	.005	.050	.960
Fasilitator	-.104	.160	-.061	-.650	.518
Edukator	-.373	.295	-.139	-1.266	.210
Advokator	.306	.389	.080	.786	.434
Dukungan Pemerintah	.927	.250	.371	3.713	.000
Dukungan <i>Stakeholders</i> Lainnya	.761	.302	.272	2.520	.014
Dukungan Pasar	.649	.334	.176	1.942	.056

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa secara parsial, tingkat pendidikan formal, dukungan pemerintah, dan dukungan *stakeholders* lainnya berpengaruh terhadap tingkat partisipasi dalam kegiatan KTH di Kota Padang. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan-t yang nilainya lebih kecil dari 0,05.

Koefisien Beta terbesar yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi dalam kegiatan KTH Padang Jariah adalah variabel dukungan pemerintah yakni sebesar

0.963, pada kolom *Unstandardized Coefficients* sebesar 0.383 pada kolom *Standardized Coefficients* bila dibandingkan dengan variabel yang lainnya.

Berdasarkan koefisien beta pada model hubungan variabel bebas tingkat partisipasi dalam kegiatan KTH di Kota Padang dapat diketahui persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = -1.669 + 0.054X_1 + 0.408X_2 + 0.601X_3 + 0.001X_4 - 0.101X_5 - 0.395X_6 + 0.367X_7 + 0.963X_8 + 0.810X_9 + 0.725X_{10}$$

Secara umum tingkat pendidikan formal merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi anggota KTH dalam kegiatan KTH di Kota Padang. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tingkat pendidikan formal dapat mempengaruhi motivasi, kelancaran menerima informasi, komunikasi, kemampuan, dan kemandirian anggota KTH. Hal ini selanjutnya akan mempengaruhi dalam melaksanakan kegiatan KTH dalam rangka pengelolaan dan pembangunan hutan yang dikelolanya.

Dukungan dari pemerintah merupakan faktor utama dalam upaya meningkatkan partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH di Kota Padang. Beberapa KTH yang melaksanakan pembangunan kehutanan seperti program perhutanan sosial tentunya sangat membutuhkan dukungan pemerintah mulai dari kebijakan, sarana prasarana, pelatihan, dan pendampingan. Kebijakan yang dibuat diharapkan agar lebih berpihak pada kepentingan anggota KTH atau masyarakat sekitar hutan dengan memberikan kesempatan yang luas dalam mengakses pengelolaan hutan sesuai kearifan lokal dan menjaga kelestarian hutan. Hal ini akan menciptakan sikap positif anggota KTH terhadap pemerintah, rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kelestarian hutan.

Selanjutnya dukungan *stakeholders* lainnya juga sangat diperlukan dalam meningkatkan partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH di Kota Padang. Dukungan awal yang diperlukan dari *stakeholders* lainnya adalah dari tokoh masyarakat, ninik mamak, dan tokoh agama karena dianggap lebih kosmopolit, banyak menerima informasi, mampu mengkomunikasikan informasi ke luar dan menyebarkannya kepada anggota KTH. Dukungan selanjutnya dapat berasal dari akademisi, lembaga swadaya, dan swasta. Dukungan ini penting karena menurut

Salampessy *et al.* (2010), perlu menciptakan partisipasi dan aksi bersama *stakeholders* untuk mengurangi berbagai kelemahan, saling melengkapi dan teratasi. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa materi, dana, sarana prasarana, fasilitas, dan kebijakan dari berbagai pihak.

Berdasarkan observasi dan wawancara diketahui bahwa faktor lain yang mempengaruhi tingkat partisipasi anggota KTH dalam kegiatan KTH khususnya pada KTH Sikayan Balumuik adalah dinamika KTH. Dinamika KTH merupakan kekuatan-kekuatan yang terdapat dalam KTH yang mempengaruhi perilaku KTH dan anggota dalam mencapai tujuan KTH. Salah satu faktor dinamika KTH yang muncul adalah kekompakan yang merupakan keterikatan antara anggota KTH. Kekompakan ini dipengaruhi oleh kepemimpinan, keanggotaan, nilai tujuan, homogenitas kelompok, integrasi, kerjasama kelompok, dan ukuran kelompok, Slamet (1978) dalam (Purwanto, 2011). Kekompakan KTH Sikayan Balumuik dapat dilihat pada kepemimpinan yang memiliki wibawa dan memiliki kemampuan dalam memimpin sehingga tidak adanya perselisihan yang dan telah muncul kerjasama dalam kelompok tersebut dalam mencapai efektivitas KTH. Efektivitas KTH ini dapat diamati pada tingkat peran anggota, tingkat keberhasilan kegiatan KTH, dan moral anggota.

Selanjutnya kepemimpinan ketua KTH Sikayan Balumuik dinilai anggota KTH mampu menjaga konsiderasi atau kedekatan hubungan dengan anggota KTH sehingga berdampak positif seperti pada profesionalitas, tanggung jawab masing-masing, mempertahankan kekeluargaan, struktur kelompok yang terbentuk berdasarkan potensi dan kesiapan, dan mencapai kemandirian (Rahayu dan Malia, 2018). Hal ini seiring pernyataan Stogdill (1947) dalam Madarisa (2020), sifat-sifat pemimpin yang baik adalah memiliki kecerdasan, kemampuan berbicara, kemampuan menilai, pengetahuan, ketekunan, agresif, percaya pada diri, keinginan untuk unggul, aktif berpartisipasi, kemampuan bergaul, kerja sama, mudah beradaptasi, humoris, dan ketenaran. Selanjutnya pemimpin dapat menjalankan fungsinya untuk menetapkan tujuan, mencapai tujuan, mempertahankan kelompok, menilai serta mendapat umpan balik. (Mardikanto, 2014).

Penelitian lainnya menunjukkan bahwa peran pendamping sebagai fasilitator, edukator, dan advokator merupakan sangat penting dalam

pembangunan KTH sebagaimana yang ditunjukkan dari hasil penelitian Awang (2004) bahwa salah satu unsur keberhasilan pengelolaan hutan oleh masyarakat sekitar hutan adalah adanya bimbingan teknis bagi petani tersebut. Oleh karena itu peran pendamping harus senantiasa diperkuat secara kuantitas dan kualitas yang didukung dengan kebijakan, sarana serta prasarana yang memadai.

KTH Sikayan Balumuik

Berdasarkan Tabel 41 (lampiran 6), diketahui bahwa besarnya nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel ($F_{hitung} > F_{tabel}$) = $3.505 > 2.04$ dan nilai signifikan-F yang nilainya sebesar $0.002 < 0.05$. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa secara serempak variabel bebas meliputi umur (X1), tingkat pendidikan formal (X2), jenis kelamin (X3), proporsi pendapatan dari kegiatan KTH (X4), peran pendamping sebagai fasilitator (X5), peran pendamping, sebagai edukator (X6), peran pendamping sebagai advokator (X7), dukungan pemerintah (X8), dukungan *stakeholders* lainnya (X9) dan dukungan pasar (X10) berpengaruh terhadap tingkat partisipasi dalam kegiatan KTH Sikayan Balumuik.

Selanjutnya dari Tabel 42 (lampiran 6) menunjukkan dengan nilai R sebesar 0.654 dapat diartikan bahwa terjadi hubungan (korelasi) yang erat antara variabel dependen dengan variabel-variabel independen pada KTH Sikayan Balumuik. Koefisien determinasi (R^2) diperoleh adalah 0.427 yang berarti bahwa naik turunnya nilai variabel tingkat partisipasi (Y) secara bersama-sama dipengaruhi oleh variabel independen hanya sebesar 42,7% sisanya sebesar 58,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain atau variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

Untuk nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh terhadap tingkat partisipasi anggota KTH dalam kegiatan KTH Sikayan Balumuik sebesar 0.305. Hal ini berarti bahwa 30,5% tingkat partisipasi dipengaruhi oleh variabel bebas yang diteliti sedangkan sisanya sebesar 69,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Analisis selanjutnya dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen melalui uji-t (*T-test*) dengan hasil yang dijabarkan pada Tabel 43.

Tabel 43. Uji Parsial variabel bebas terhadap tingkat partisipasi dalam kegiatan KTH Sikayan Balumuik

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9.548	4.980		1.917	.061
Umur	-.038	.036	-.160	-1.053	.298
Tingkat Pendidikan Formal	.272	.120	.322	2.257	.029
Jenis Kelamin	.938	.860	.126	1.091	.281
Proporsi Pendapatan dari Kegiatan KTH	-.017	.014	-.144	-1.227	.226
Fasilitator	-.219	.149	-.195	-1.467	.149
Edukator	.027	.276	.015	.099	.922
Advokator	.799	.339	.315	2.358	.023
Dukungan Pemerintah	.126	.239	.069	.526	.601
Dukungan <i>Stakeholders</i> Lainnya	.414	.286	.192	1.445	.155
Dukungan Pasar	.387	.255	.174	1.519	.135

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 43 di atas dapat diketahui bahwa secara parsial, tingkat pendidikan formal dan peran pendamping sebagai advokator berpengaruh terhadap tingkat partisipasi dalam kegiatan KTH Sikayan Balumuik. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan-t yang nilainya lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat hubungan nyata antara peran pendamping sebagai advokator dengan tingkat partisipasi anggota KTH dalam kegiatan KTH diterima.

Koefisien Beta terbesar yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi dalam kegiatan KTH adalah variabel peran pendamping sebagai advokator yakni sebesar 0.799 pada kolom *Unstandardized Coefficients* dan sebesar 0.315 pada kolom *Standardized Coefficients* bila dibandingkan dengan variabel yang lainnya.

Berdasarkan Koefisien Beta pada model hubungan variabel bebas tingkat partisipasi dalam kegiatan KTH Sikayan Balumuik dapat diketahui persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 8.525 - 0.041X_1 + 0.278X_2 + 0.982X_3 - 0.0214X_4 - 0.198X_5 - 0.010X_6 + 0.803X_7 + 0.177X_8 + 0.414X_9 + 0.445X_{10}$$

Tingkat pendidikan formal mempengaruhi tingkat partisipasi anggota KTH dalam kegiatan KTH Sikayan Balumuik karena berhubungan dengan motivasi, kelancaran menerima informasi, komunikasi, kemampuan, dan kemandirian. Hal ini terbukti dengan perkembangan pembangunan KTH Sikayan Balumuik yang lebih pesat dibandingkan KTH Padang Jariah. Sesuai hasil penelitian Suprayitno (2011) yang menemukan dalam pengelolaan hutan kemiri, rendahnya tingkat pendidikan petani menyebabkan rendahnya kemampuan petani dalam mengadakan perubahan dan menyerap informasi yang menjadi penghambat bagi peningkatan produksi. Diperkuat oleh Tanjung (2016) yang membuktikan bahwa tingkat pendidikan responden menjadi salah satu penyebab lancarnya pengelolaan Hutan Nagari karena terkait dalam menerima informasi dan berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya Sumardjo (2010) menyatakan, pendidikan informal merupakan salah satu pilar utama bagi pengembangan kemandirian masyarakat. Kemandirian merupakan suatu prasyarat bagi masyarakat untuk berdaya dalam mengelola sumberdaya, termasuk sumberdaya hutan, dan beradaptasi terhadap berbagai perubahan lingkungan.

Pada KTH Sikayan Balumuik peran pendamping sebagai advokator sangat penting dalam peningkatan partisipasi anggota KTH. PKSM sebagai pendamping harus mampu melaksanakan peranannya dan membuat kedekatan emosional dengan anggota KTH sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan terkait kegiatan KTH.

KTH Padang Jariah

Berdasarkan Tabel 44 (lampiran 6), diketahui bahwa besarnya nilai Fhitung $< F_{tabel} = 2.503 < 2.98$ dan nilai signifikan-F yang nilainya sebesar $0.065 > 0.05$ sehingga pada KTH Padang Jariah dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara serempak tidak berpengaruh terhadap tingkat partisipasi anggota pada kegiatan KTH.

Tabel 45 (lampiran 6), menunjukkan bahwa nilai R sebesar 0.795 dapat diartikan adanya hubungan kuat antara variabel dependen dengan variabel-variabel independen. Koefisien determinasi (R^2) yang dihasilkan sebesar 0.634 yang berarti bahwa naik turunnya nilai variabel dependen secara bersama-sama

dipengaruhi oleh variabel independen hanya sebesar 63,4% sisanya dipengaruhi sebesar 36,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Pada variabel dependen, *Adjusted R Square* diperoleh sebesar 0.381. Hal ini menunjukkan bahwa 38,1% tingkat partisipasi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang diteliti sedangkan sisanya sebesar 62,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Selanjutnya berikut hasil uji-t untuk variabel bebas terhadap tingkat partisipasi dalam kegiatan KTH Padang Jariah yang ditunjukkan oleh Tabel 46.

Tabel 46. Uji Parsial variabel bebas terhadap Tingkat Partisipasi dalam Kegiatan KTH Padang Jariah

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-8.187	10.273		-.797	.440
Umur	.148	.077	.419	1.911	.078
Tingkat Pendidikan Formal	.367	.357	.224	1.028	.323
Proporsi Pendapatan dari Kegiatan KTH	-.052	.042	-.311	-1.241	.237
Fasilitator	-.116	.326	-.090	-.356	.728
Edukator	-.060	.707	-.022	-.085	.934
Advokator	.403	.933	.126	.433	.672
Dukungan Pemerintah	1.451	.487	.598	2.980	.011
Dukungan <i>Stakeholders</i>	-.931	1.298	-.144	-.717	.486
Dukungan Pasar	3.699	1.478	.464	2.502	.026

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa secara parsial, dukungan pemerintah dan dukungan pasar berpengaruh terhadap tingkat partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH Padang Jariah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan-t yang nilainya lebih kecil dari 0,05.

Tabel 46 menunjukkan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat hubungan nyata antara dukungan pemerintah dan dukungan pasar terhadap tingkat partisipasi pada kegiatan KTH Padang Jariah diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa untuk peningkatan partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH Padang Jariah perlu dilakukan upaya peningkatan terhadap faktor-faktor tersebut.

Koefisien Beta terbesar yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi dalam kegiatan KTH Padang Jariah adalah variabel dukungan pasar yakni sebesar 3.699,

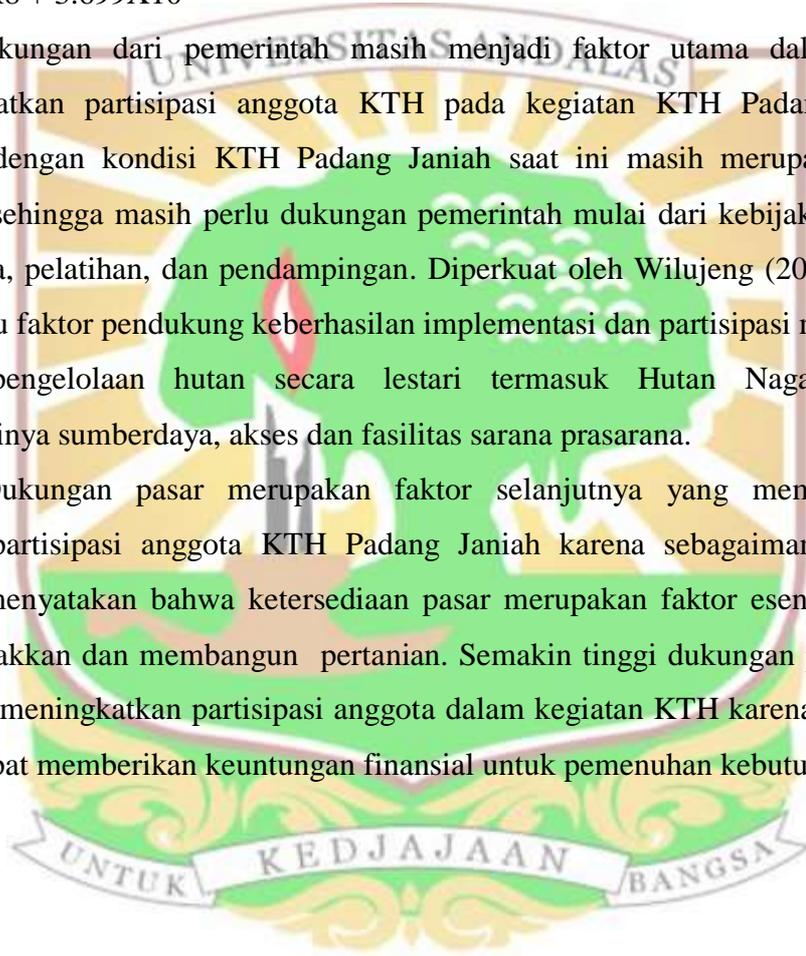
pada kolom *Unstandardized Coefficients* adalah variabel dukungan pemerintah dan sebesar 0.599 pada kolom *Standardized Coefficients* bila dibandingkan dengan variabel yang lainnya.

Berdasarkan koefisien beta pada model hubungan variabel bebas tingkat partisipasi dalam kegiatan KTH Padang Jariah dapat diketahui persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = -10.979 + 0.148 X_1 + 0.367 X_2 - 0.052 X_4 - 0.116 X_5 - 0.060 X_6 + 0.403 X_7 + 1.451 X_8 + 3.699 X_{10}$$

Dukungan dari pemerintah masih menjadi faktor utama dalam upaya meningkatkan partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH Padang Jariah. Seiring dengan kondisi KTH Padang Jariah saat ini masih merupakan KTH Pemula sehingga masih perlu dukungan pemerintah mulai dari kebijakan, sarana prasarana, pelatihan, dan pendampingan. Diperkuat oleh Wilujeng (2015) bahwa salah satu faktor pendukung keberhasilan implementasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari termasuk Hutan Nagari adalah tercukupinya sumberdaya, akses dan fasilitas sarana prasarana.

Dukungan pasar merupakan faktor selanjutnya yang mempengaruhi tingkat partisipasi anggota KTH Padang Jariah karena sebagaimana Mosher (1978) menyatakan bahwa ketersediaan pasar merupakan faktor esensial dalam menggerakkan dan membangun pertanian. Semakin tinggi dukungan pasar akan semakin meningkatkan partisipasi anggota dalam kegiatan KTH karena kepastian pasar dapat memberikan keuntungan finansial untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH Kota Padang dalam kategori tinggi yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan formal dukungan pemerintah, dukungan *stakeholders* lainnya, dan dukungan pasar.
2. Tingkat partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH Sikayan Balumuik dalam kategori tinggi. Faktor yang mempengaruhinya adalah tingkat pendidikan formal, peran pendamping sebagai advokator, dan dukungan pasar.
3. Selanjutnya untuk tingkat partisipasi anggota KTH pada kegiatan KTH Padang Janiah dalam kategori rendah. Faktor yang mempengaruhinya adalah dukungan pemerintah, dan dukungan pasar.
4. Hasil regresi linear berganda dengan aplikasi SPSS. 20 menunjukkan bahwa secara serempak, seluruh variabel bebas pada penelitian ini meliputi karakteristik individu (umur, tingkat pendidikan formal, jenis kelamin, proporsi pendapatan dari kegiatan KTH), peran pendamping (fasilitator, edukator, dan advokator), dan aspek dukungan (pemerintah, *stakeholders* lainnya, dan pasar) mempengaruhi tingkat partisipasi anggota KTH dalam kegiatan KTH Sikayan Balumuik, KTH Padang Janiah, dan di Kota Padang.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Upaya peningkatan partisipasi anggota KTH dapat berupa penghargaan dalam KTH ataupun berjenjang mulai dari tingkat desa.
2. Peningkatan peran pendamping juga sangat penting baik secara kuantitas, kualitas, dan didukung dengan kebijakan, sarana serta prasarana yang memadai.
3. Perlu penelitian lebih lanjut untuk melihat faktor-faktor lain yang belum diteliti tentang tingkat partisipasi anggota KTH di Kota Padang.

4. Perlu penelitian lebih lanjut untuk melihat persepsi terhadap tingkat partisipasi anggota KTH di Kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfandi,D., R. Qurniati., dan I.G. Febryano. 2019. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Mangrove. Jakarta: Jurnal Sylva Lestari Vol. 7 No. 1, Januari 2019 (30-41).
- Basir, A. 2018. Tingkat Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Mangrove di Desa Maccini Baji Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar [Skripsi]. Makasar. Fakultas Pertanian. Universitas Muhammadiyah Makasar. 88 hal.
- Asmin, F. 2017. Modal Sosial dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Sumatera Barat [Disertasi]. Bogor. Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. 237 hal.
- Azmi, Z. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Petani Mengikuti Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan dan Curahan Kerja [Skripsi]. Bogor. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. 141 hal.
- Chowdhury, S.A. 2004. Participation in forestry: a Study of People's Participation On The Social Forestry [Tesis]. Spring.Department of administration and organization theory University of Bergen. 110 hal.
- Dipokusumo, B. 2017. Model Partisipatif Perhutanan Sosial menuju Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Kasus Pembangunan Hutan Kemasyarakatan pada Kawasan Hutan Lindung di Pulau Lombok) [Disertasi]. Bogor. Sekolah Pasca Sarjana.Institut Pertanian Bogor. 309 hal.
- Gunmas. 2008. Partisipasi Masyarakat Kabupaten Gayo Lues terhadap Pemanfaatan Kawasan Peyangga (Buffer Zona) di Taman Nasional Gunung Leuser [Tesis]. Medan. Sekolah Pasca Sarjana. Universitas Sumatera Utara. 101 hal.
- Haryani. 2018. Ketergantungan Kelompok Tani Hutan terhadap Hutan Lindung dengan Skema Hkm di Dusun Kalibiru Kabupaten Kulon Progo [Tesis]. Yogyakarta. Program Pascasarjana. Universitas Gajah Mada. 195 hal.
- Haq, H.M. 2018. Hubungan Gaya Kepemimpinan dengan Efektifitas Kelompok Tani Pertanian Organik (Kasus: Kelompok Tani Langgeng Mandiri, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu). [Skripsi]. Malang. Universitas Brawijaya. 81 hal.
- Jallah C.H., A.O. Amoakoh., K.Boateng., D. D.N. Nortey., dan R. Assumadu., 2017. Community Participation in Forest Management in the Bleih Community Forest, Nimba County, Liberia. North Asian International Research Journal of Multidisciplinary. Vol. 3, Issue 1, Jan. 2017.

- Junaedi.2010. Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Secara Lestari di Dusun Ubah Desa Pahauman Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Kalimantan Barat [Skripsi]. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. 127 hal.
- Lama A.G., S. Kharel., and T. Ghale. 2017. When the Men Are Away: Migration and Women's Participation in Nepal's Community Forestry. Nepal: Mountain Research and Development Vol. 37, No. 3, pp. 263-270.
- Lestari T., Agussabti., dan M.R. Alibasyah. 2014. Partisipasi Masyarakat Adat dalam Konservasi Sumberdaya Hutan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar. Banda Aceh. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Banda Aceh dan Fakultas Pertanian Unsyiah.
- Mardikanto, T. 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian. Surakarta: UNS Press. 468 hal.
- Meilala, D.P. 2018. Partisipasi Kelompok Tani dalam Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Ub Forest (di Dusun Sumbersari, Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang [Skripsi]. Malang. Fakultas Pertanian. Universitas Brawijaya. 100 hal.
- Mutmainah R, dan Sumardjo. 2014. Peran Kepemimpinan Kelompok Tani dan Efektivitas Pemberdayaan Petani. Jurnal Sosiologi Pedesaan. ISSN : 2302 - 7517, Vol. 02, No. 03 hlm : 182-199
- Nugraha, C.S. 2012. Partisipasi dan Persepsi Masyarakat Dalam Pengembangan Hutan Tanaman Industri Pola Kemitraan PT. Nityasa Idola Provinsi Kalimantan [Skripsi]. Bogor. Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor. 65 hal.
- Nurhidayat, M., A.Tjoneng., dan Saida. 2019. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Model Desa Konservasi di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Jakarta. Jurnal Agrotek Vol. 3 No. 2 September 2019.
- Nursalam. 2007. Kebijakan Pelestarian Sumber Daya Hutan dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Jurnal Kehutanan.
- Norah, W. 2019. Determinants Of Community Participation in Sustainability of Indigenous Forest in Kakamega East Sub-County. Kenya: The International Journal Of Humanities & Social Studies, vol 7 issue 4.
- Permatasari, D.A. 2015. Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) di Taman Nasional Baluran Kabupaten Situbondo [Skripsi]. Jember. Fakultas Pertanian. Universitas Jember. 169 hal.

- Purwanto, 2011. *Dinamika Kelompok Tani Hutan dalam Pengelolaan Hutan Rakyat (Kasus pada Kelompok Tani Hutan di Desa Jugalajaya, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. [Skripsi]. Bogor. Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor. 50hal.*
- Rahayu T dan Malia R, 2018. *Pengaruh Kepemimpinan Ketua Kelompok Terhadap Tingkat Kemandirian Anggota Kelompok di Gabungan Petani Organik (Gpo) Nyi-Sri Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur. Jurnal Agrosience vol 8 no. 1.*
- Rangga *et.al.* 2018. *Hubungan Kepemimpinan Ketua Kelompok dengan Keefektifan Kelompok Tani Padi Sawah di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.*
- Rifai, A. 2013. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar [Skripsi]. Makasar. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 109 hal.*
- Rochmayanto Y, Friyanto, D. 2000. *Analisis Partisipasi pada Program Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus di Koto Panjang, Riau).*
- Santosa, A.B. 2018. *Pembangunan Taman Nasional Berkelanjutan.Dompu. Balai Taman Nasional Tambora. 433 hal.*
- Sarmila. 2012. *Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Hutan Mangrove di Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak [Tesis]. Jakarta. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Terbuka. 130 hal.*
- Slamet, M. 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Bogor : IPB Press. 292 hal.*
- Sukhmawati, D.N. 2012. *Partisipasi Masyarakat Desa Hutan dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di KPH Cepu Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah [Tesis]. Bogor. Institut Pertanian Bogor. 153 hal.*
- Suprayitno, A.R. 2011. *Model Peningkatan Partisipasi Petani Sekitar Hutan dalam Mengelola Hutan Kemiri Rakyat (Kasus Pengelolaan Hutan Kemiri Kawasan Pegunungan Bulusaraung Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan) [Disertasi]. Bogor. Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. 321hal.*
- Syahyuti. 2012. *Pengorganisasian secara Personal dan Gejala Individualisasi Organisasi sebagai Karakter Utama Pengorganisasian Diri Petani di Indonesia. Bogor. Jurnal Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.*

Syahyuti. 2014. Mau Ini Apa Itu?. Jakarta :PT. Nagakusuma Media Kreatif. 430 hal.

Tanjung, N.S. 2016. Komunikasi Partisipatif dalam Pengelolaan Hutan Nagari di Sumatera Barat [Tesis]. Bogor. Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. 126 hal.

Utama, S. 2010. Pemberdayaan Masyarakat sekitar Hutan melalui Pendekatan Kelompok (Kasus Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat pada Areal Hutan Produksi Perum Perhutani Unit I Provinsi Jawa Tengah) [Disertasi]. Bogor. Institut Pertanian Bogor.

Van Den Ban, A.W. dan H.S. Hawkin. 1999. Penyuluhan Pertanian. Yogyakarta :Kanisius. 364 hal.

Yuwono. 2016. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan di Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan [Tesis]. Bogor. Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. 127 hal.

Zulevi, X.F. 2017. Pengaruh Partisipasi dalam Pengelolaan Hutan Nagari Simancuang terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. [Skripsi]. Bogor. Fakultas Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor. 130 hal.



PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 jo PP Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 jo P.18/Menhut-I/2009 jo P.13/Menhut-II/2010 jo P.52/Menhut-II/2011 jo P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Tani Hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Pendampingan Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.

Peraturan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.2/PSKL/SET/KUM.1/5/2018 tentang Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial.

Peraturan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.16/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan, dan Rencana Kerja Usaha Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Fasilitas Perhutanan Sosial.

LAMPIRAN

